



**KONSENTRASI SPASIAL SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS PENGOLAHAN  
PERIKANAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

*Acc oleh  
16/1/2018*

*Acc Benda  
16/1/18*

Oleh

Imam Mustofa Al Mamfaluti  
NIM 151520201002

*Acc oleh  
16/1/18*

*Benda  
10/2/18*

PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**KONSENTRASI SPASIAL SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS PENGOLAHAN  
PERIKANAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Agribisnis (S2)  
dan mencapai gelar Magister Pertanian

Oleh

**Imam Mustofa Al Mamfaluti  
NIM 151520201002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

**PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Istri Ika Kartika Sari, A.md.MI. tercinta dan tersayang;
2. Ibu Ratna Rahayuningsih dan Bapak Almarhum Masduki tercinta serta tersayang;
3. Ibu Mertua Asmiyatun dan Bapak Mertua Bambang Sugeng tercinta serta tersayang;
4. Kakak Isyqil Jamil Santoso, S.Pd dan Kakak Ipar Dwi Wahyuni, S.Pd tersayang;
5. Adik Qurrotun A'yuni tersayang dan seluruh keluargaku tersayang;

## MOTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(terjemahan Surat *Al-Mujadila* ayat 11)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(terjemahan Surat *Al-Insyirah* ayat 5-8)

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia  
(Nelson Mandela)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Mustofa Al Mamfaluti

NIM : 151520201002

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Konsentrasi Spasial serta Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2017

Yang menyatakan,

Imam Mustofa Al Mamfaluti  
NIM 151520201002

**TESIS**

**KONSENTRASI SPASIAL SERTA STRATEGI PENGEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS PENGOLAHAN  
PERIKANAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh

Imam Mustofa Al Mamfaluti  
NIM 151520201002

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : M. Rondhi, S.P., M.P., Ph.D.  
NIP. 19770706 200801 1 012

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Evita Soliha Hani, M.P.  
NIP. 19630903 199002 2 001

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul “**Konsentrasi Spasial serta Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo**”, telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 20 Desember 2017

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

M. Rondhi, S.P., M.P., Ph.D.  
NIP 19770706 200801 1 012

Dr. Ir. Evita Soliha Hani, M.P.  
NIP 19630903 199002 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M.  
NIP 19700626 199403 1 002

Lenny Widjyanthi, S.P., M.Sc., Ph.D.  
NIP 19681202 199403 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Agribisnis,

Lenny Widjyanthi, S.P., M.Sc., Ph.D.  
NIP 19681202 199403 2 001

Mengesahkan,  
Dekan,

Ir. Sigit Soeparjono, M.S., Ph.D.  
NIP 19600506 198702 1 001

## RINGKASAN

**Konsentrasi Spasial serta Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo;** Imam Mustofa Al Mamfaluti, 151520201002; 2017: 210 halaman; Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Di Kabupaten Situbondo terdapat 4 (empat) jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Dengan belum diketahuinya peta, keunggulan komparatif dan kompetitif serta strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo akan menyulitkan pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial, untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif serta strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017. Pemilihan Kabupaten Situbondo sebagai tempat penelitian disebabkan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan memiliki potensi serta keunggulan yang menjadi spesialisasi perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis/*geographic information system (GIS)*, sedangkan untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo menggunakan analisis *location quotient (LQ)*,

*shift share analysis* (SSA), dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) serta untuk menganalisis strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP).

Hasil penelitian dengan menggunakan *geographic information system* (GIS) menunjukkan bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi terkonsentrasi secara spasial di beberapa wilayah tertentu yang, sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA), dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) menunjukkan bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terdapat di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Situbondo serta hasil penelitian dengan menggunakan *analytical hierarchy process* (AHP) menunjukkan bahwa meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing merupakan alternatif strategi yang prioritas untuk dilakukan dalam rangka mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

## SUMMARY

**Spatial Concentration and Development Strategy of Small and Medium Scale Fishery Processing Industries in Situbondo Regency;** Imam Mustofa Al Mamfaluti, 151520201002; 2017: 210 pages; Agribusiness Master Degree Program of Agriculture Faculty, University of Jember.

In Situbondo regency, there are four types of small and medium scale fishery processing industries which consists of boiling, salting or drying, other methods of processing and preservation and freezing the fish and other water biota. In the current condition, there is no of map of comparative and competitive advantages and development strategy of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo regency which cause adversity for the government to determine the policy in regional economic growth development.

This study aims to determine the spatially concentrated map of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency, to analyze comparative and competitive advantages and development strategy of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency.

This research is using descriptive method with quantitative approach. This research was conducted in Situbondo Regency in year of 2017. The selection of Situbondo Regency as a place of research due to small and medium scale fishery processing industries has potential and advantage which become economy specialization so it can be expected to increase regional economic growth. To know the spatially concentrated map of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency is by using geographic information system (GIS) system, while to analyze comparative and competitive advantage of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency is by using location quotient analysis (LQ), shift share analysis (SSA), and growth ratio analysis (MRP) analysis and to analyze the strategy of developing small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency using analytical hierarchy process (AHP)

The result of research by using geographic information system (GIS) shows that the activity of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency on indicator of production value, the amount of labor and investment value tends spread in certain areas that have localization efficiency and urbanization efficiency, by using location quotient (LQ) analysis, shift share analysis (SSA), and growth ratio analysis (MRP) analysis showed that the activities of small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency with comparative and competitive advantages were found in some subdistricts in Situbondo and the results of research using analytical hierarchy process (AHP) shows that market opportunities enhancement in order the products can compete is a priority strategy alternative in order to develop small and medium scale fishery processing industries in Situbondo Regency.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis yang berjudul “Konsentrasi Spasial serta Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ir. Sigit Soeparjono, M.S., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember atas kesempatan dan bimbingannya yang diberikan.
2. Lenny Widjyanthi, S.P., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jember.
3. Lenny Widjyanthi, S.P., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Wali Mahasiswa atas nasehat, motivasi dan bimbingannya yang diberikan.
4. M. Rondhi, S.P., M.P., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala ilmu, nasehat dan bimbingannya yang diberikan selama penyusunan karya ilmiah ini.
5. Dr. Ir. Evita Soliha Hani, M.P. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas segala ilmu, nasehat dan bimbingannya yang diberikan selama penyusunan karya ilmiah ini.
6. Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M. selaku Penguji I atas ilmu dan bimbingannya yang diberikan.
7. Lenny Widjyanthi, S.P., M.Sc., Ph.D. selaku Penguji II atas ilmu dan bimbingannya yang diberikan.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Agribisnis yang telah memberikan ilmu selama kuliah.
9. Ibuku terhormat, termulia dan tercinta terima kasih atas semangat, dukungan serta do'anya yang diberikan selama ini.

10. Istriku tersayang dan tercinta terima kasih atas motivasi, semangat serta do'anya yang diberikan selama ini.
11. Dra. Hj. Tutik Margiyanti, S.T., M.Si. selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo atas masukan dan bimbingannya yang diberikan.
12. Hartoyo, S.Sos. selaku Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo atas masukan dan bimbingannya yang diberikan.
13. Tri Irawan Ichwan, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo atas ijin kuliah dan nasehat yang diberikan.
14. Kepala Badan dan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo atas masukan dan bimbingannya yang diberikan.
15. Hadi Prianto, S.Pd. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Komisi 2 Bidang Ekonomi.
16. Ach. Hasan, S.E. selaku Ketua Cabang PMII Kabupaten Situbondo atas bantuan serta dukungannya yang diberikan.
17. Herman Ariyanto, S.M. selaku teman satu ruangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo atas bantuannya yang diberikan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat.

Jember, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN/ SUMMARY</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Telaah Penelitian Terdahulu</b> .....	7
<b>2.2 Pengertian Industri</b> .....	17
<b>2.3 Industri Kecil dan Menengah Berbasis     Pengolahan Perikanan</b> .....	19
<b>2.4 Konsentrasi Spasial</b> .....	20
<b>2.5 Sistem Informasi Geografis</b> .....	22
<b>2.6 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan     Kompetitif Wilayah</b> .....	25
<b>2.7 Konsep Sektor Unggulan</b> .....	27
<b>2.8 Teori Basis Ekonomi</b> .....	29

	Halaman
<b>2.9 Konsep Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) .....</b>	29
<b>2.10 Konsep <i>Shift Share Analysis</i> (SSA) .....</b>	32
<b>2.11 Konsep Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .....</b>	33
<b>2.12 Manajemen Strategi .....</b>	34
2.12.1 Tahap-Tahap Manajemen Strategi .....	34
2.12.2 Analisis Lingkungan .....	35
<b>2.13 Metode Proses <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) .....</b>	39
<b>2.14 Kerangka Pemikiran .....</b>	47
<b>2.15 Hipotesis .....</b>	52
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	53
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	53
3.1.1 Jenis Penelitian .....	53
3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
<b>3.2 Populasi dan Sampel .....</b>	53
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	55
<b>3.4 Metode Analisis Data .....</b>	56
3.4.1 Sistem Informasi Geografis .....	56
3.4.2 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ), <i>Shift Share</i> Analysis (SSA) dan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .....	58
3.4.3 <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) .....	63
<b>3.5 Definisi Operasional Variabel .....</b>	68
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	70
<b>4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....</b>	70
4.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Situbondo.....	70
4.1.2 Wilayah Administrasi.....	70
4.1.3 Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	71
4.1.4 Kondisi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	71

	Halaman
<b>4.2 Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>76</b>
4.2.1 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terkonsentrasi Secara Spasial.....	76
4.2.2 Analisis Keunggulan Komparatif serta Kompetitif Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	89
4.2.3 Analisis Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	170
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>185</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>185</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>187</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>190</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>194</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Lima Sektor Penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015.....	2
2.1 Skala Penilaian Antar Kriteria.....	43
2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan.....	43
2.3 Nilai Random Index (RI).....	45
4.1 Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	73
4.2 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.....	73
4.3 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017.....	74
4.4 Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	75
4.5 Biaya Transportasi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	85
4.6 Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terkonsentrasi Secara Spasial yang Tinggi Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.....	88
4.7 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi.....	90
4.8 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi.....	94
4.9 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi.....	98

	Halaman
4.10 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi.....	102
4.11 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	104
4.12 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengerangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	108
4.13 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	112
4.14 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	118
4.15 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi.....	119
4.16 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengerangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi.....	123
4.17 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi.....	127
4.18 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi.....	131
4.19 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi.....	134
4.20 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	140
4.21 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Investasi.....	146

	Halaman
4.22 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi.....	153
4.23 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	157
4.24 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Investasi.....	161
4.25 Urutan Prioritas Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	171
4.26 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Pasar.....	175
4.27 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Manajemen.....	176
4.28 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Produk.....	177
4.29 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Ekonomi dan Sosial.....	178
4.30 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Lingkungan Industri.....	179
4.31 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Teknologi.....	180
4.32 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	181

**DAFTAR GAMBAR**

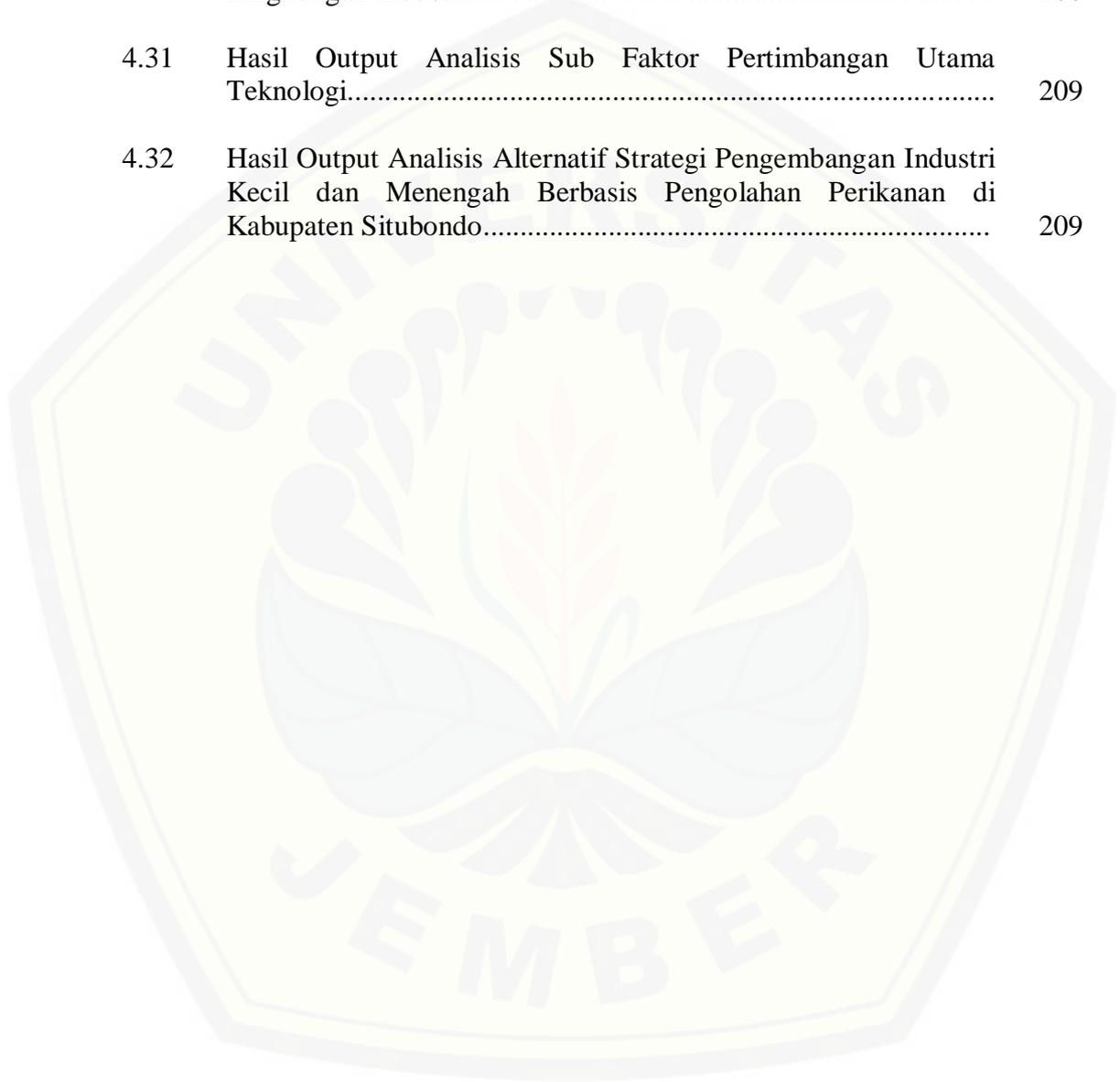
	Halaman
2.1 Model Struktur Hirarki (Saaty, 1993).....	47
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	51
3.1 Peta Administrasi Kabupaten Situbondo.....	56
3.2 Struktur Hirarki Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan.....	66
4.1 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Nilai Produksi.....	77
4.2 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	80
4.3 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Nilai Investasi.....	82
4.4 Alur Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	174

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
4.1 Nilai Produksi Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	194
4.2 Nilai Produksi Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	194
4.3 Nilai Produksi Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	195
4.4 Nilai Produksi Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	195
4.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	196
4.6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	196
4.7 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	197
4.8 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	197
4.9 Nilai Investasi Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	198
4.10 Nilai Investasi Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	198
4.11 Nilai Investasi Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	199
4.12 Nilai Investasi Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017.....	199
4.13 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi.....	200
4.14 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi.....	200

	Halaman
4.15 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi.....	201
4.16 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Nilai Produksi.....	201
4.17 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	202
4.18 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	202
4.19 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	203
4.20 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja.....	203
4.21 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi.....	204
4.22 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi.....	204
4.23 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi.....	205
4.24 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Nilai Investasi.....	205
4.25 Hasil Output Analisis Faktor Pertimbangan Utama.....	206
4.26 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Pasar.....	206
4.27 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Manajemen.....	207
4.28 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Produk.....	207

	Halaman
4.29 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Ekonomi dan Sosial.....	208
4.30 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Lingkungan Industri.....	208
4.31 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Teknologi.....	209
4.32 Hasil Output Analisis Alternatif Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo.....	209



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Situbondo dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal bagi kesejahteraan masyarakat.

Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektor yang menjadi spesialisasi perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah yaitu dengan mengembangkan kegiatan industri sebagai kegiatan ekonomi utama yang dapat memberikan efek ganda terhadap tumbuhnya sektor-sektor lainnya (Ferdiansyah dan Santoso, 2013). Salah satu kegiatan industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Sektor industri pengolahan saling berkaitan dengan sektor-sektor yang menyumbang bahan baku.

Sumber daya lokal Kabupaten Situbondo adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Sumber daya lokal tersebut merupakan 5 (lima) sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Lima Sektor Penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tertinggi di Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015

No	Lapangan Usaha	PDRB (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	35,45	35,79	35,94	36,32	36,24
2.	Pertambangan dan penggalian	2,33	2,17	2,03	1,95	1,94
3.	Industri Pengolahan	15,87	15,77	15,69	15,76	16,09
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
6.	Jasa lainnya	46,14	46,06	46,15	45,78	45,54
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo, 2016

Dengan adanya upaya pengembangan industri akan memacu serta meningkatkan pembangunan sektor-sektor lainnya lebih khusus pada sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor industri yang strategis karena bisa berperan sebagai sektor industri hulu maupun sebagai sektor industri hilir bagi sektor-sektor industri lainnya.

Di Kabupaten Situbondo terdapat 4 (empat) industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya, industri-industri tersebut terbagi menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (BPS, 2015).

Industri pemindangan ikan tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan dan Panji. Industri penggaraman atau pengeringan ikan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Kemudian industri pembekuan biota air

lainnya terdapat di Kecamatan Panarukan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017).

Industri tersebut tersebar di beberapa kecamatan dengan pola penyebaran yang tidak teratur atau merata, sehingga menyebabkan munculnya konsentrasi spasial. Konsentrasi kegiatan industri secara spasial ditandai dengan sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi perkotaan (Ferdiansyah dan Santoso, 2013). Dengan diketahuinya peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang terkonsentrasi secara spasial dapat memberikan informasi tentang kebutuhan input maupun pasar. Oleh sebab itu perlu melakukan analisis spasial agar mempermudah diketahuinya peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Konsentrasi spasial merupakan pengelompokan setiap industri tersebut berlokasi pada suatu wilayah tertentu. Konsentrasi spasial menunjukkan suatu wilayah yang mendominasi berlokasinya industri, maka menunjukkan bahwa industri terkonsentrasi secara spasial di wilayah tersebut.

Berbagai literatur menggunakan istilah aglomerasi dalam membahas konsentrasi industri dan aktifitas ekonomi secara spasial. Studi aglomerasi menerangkan bahwa konsentrasi spasial kegiatan industri secara spasial muncul karena pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi baik karena penghematan lokalisasi dan urbanisasi dengan mengambil lokasi yang berdekatan satu sama lain. Pendekatan lain menjelaskan bahwa konsentrasi industri secara spasial tumbuh karena adanya dorongan transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri (Ferdiansyah dan Santoso, 2013).

Keunggulan komparatif suatu komoditi atau produk dalam suatu negara atau daerah adalah merupakan suatu komoditi atau produk itu lebih unggul secara relatif dengan suatu komoditi atau produk lain di daerah atau wilayahnya. Dalam hal ini unggul merupakan bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi atau produk yang memiliki keunggulan

dalam bentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding dengan komoditi atau produk lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua daerah atau wilayah, sedangkan keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah atau wilayah untuk memasarkan produknya di luar daerah, luar negeri dan pasar global. Apabila produk yang dihasilkan oleh produsen dapat dijual di pasar global secara menguntungkan, dengan demikian produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif, sehingga keunggulan kompetitif tidak lagi membandingkan potensi produk atau komoditi yang sama di suatu daerah dengan daerah lainnya, melainkan membandingkan potensi komoditi suatu daerah terhadap komoditi semua daerah pesaingnya di pasar global (Tarigan, 2006).

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda. Industri tersebut belum teridentifikasi secara jelas tentang keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam menentukan produk unggulan yang memiliki daya saing. Jika industri yang terdapat di Kabupaten Situbondo khususnya industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan mengetahui tentang keunggulan komparatif dan kompetitif akan merangsang atau mendorong masing-masing industri untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam produksi.

Dalam menentukan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah atau suatu wilayah perlu adanya strategi pengembangan yang mendorong produsen. Dalam menyusun sebuah strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sepenuhnya berada didalam organisasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan, sedangkan faktor eksternal berada diluar organisasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Keberhasilan dalam mengelola faktor internal akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Kemampuan mengelola faktor internal serta kemampuan manajemen mengembangkan kompetensi inti yang terdapat pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berjalan seiring sehingga tujuan dari industri

tersebut tercapai secara maksimal. Sebelum menentukan strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan perlu dilakukan analisis lingkungan, baik lingkungan internal seperti sumberdaya manusia, pemasaran, produksi, keuangan, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi manajemen, sedangkan lingkungan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan industri (Kuncoro, 2006).

Pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo belum teridentifikasi dengan baik tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam mempertahankan maupun mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Jika pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo mengetahui dengan baik tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam mempertahankan maupun mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif akan meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat kondisi riil di Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Dimanakah peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial?
2. Bagaimanakah keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimanakah strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial.

2. Untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.
3. Untuk menganalisis strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pengusaha dan masyarakat di Kabupaten Situbondo dapat menambah informasi, wawasan dan pengetahuan tentang konsentrasi spasial, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan.
2. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menyusun kebijakan tentang strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (1) konsentrasi spasial, (2) keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, dan (3) strategi pengembangan.

Penelitian terdahulu terkait dengan konsentrasi spasial terdapat empat penelitian yaitu sebagai berikut :

Saputra (2015) melakukan penelitian tentang analisis spesialisasi dan konsentrasi spasial industri kecil dan menengah di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak industri kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi secara spasial, mengetahui pada subsektor apa industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur terspesialisasi sesuai dengan potensi wilayahnya, dan mengetahui apakah tingkat persaingan, nilai produktivitas, tenaga kerja dan upah berpengaruh terhadap konsentrasi spasial industri kecil dan menengah di Jawa Timur. Teknik analisa yang digunakan yaitu konsentrasi rasio, *location quotient* (LQ), dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi spasial industri kecil dan menengah di Jawa Timur berada di Kota Surabaya dengan nilai konsentrasi rasio sebesar 17,36%, Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,69%, Kabupaten Gresik sebesar 7,19% dan Kota Malang dengan nilai rasio konsentrasi sebesar 4,84%, sedangkan wilayah dengan nilai konsentrasi terendah berada di Kabupaten Pamekasan 0,07%, Kabupaten Pacitan 0,06% dan yang terakhir adalah Kabupaten Sampang sebesar 0,03%.

Ferdiansyah dan Santoso (2013) melakukan penelitian untuk melihat pola spasial kegiatan industri unggulan di Propinsi Jawa Timur studi kasus subsektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki. Penelitiannya bertujuan untuk melakukan perumusan pola spasial kegiatan industri unggulan tekstil, barang kulit dan alas kaki di Propinsi Jawa Timur dengan melakukan identifikasi daerah konsentrasi kegiatan industri, mengukur besarnya indeks spesialisasi dan aglomerasi. Teknik analisa yang digunakan yaitu analisa *static location quotient* (SLQ) dan *dynamic location quotient* (DLQ), analisa spasial *geographic*

*information system* (GIS), analisa indeks spesialisasi glaeser, dan indeks aglomerasi hirschman-herfindhal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan industri unggulan tekstil, barang kulit, dan alas kaki memiliki pola kegiatan industri unggulan yang terspesialisasi dan dispersi dengan konsentrasi industri yang tinggi di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian konsentrasi industri yang sedang di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kota Batu dan Kabupaten Probolinggo, sedangkan konsentrasi industri yang rendah di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pacitan.

Arifin (2006) melakukan penelitian tentang konsentrasi spasial industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur studi kasus industri besar dan sedang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lokasi industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur, mengetahui perkembangan industri manufaktur berbasis perikanan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur. Teknik analisa yang digunakan yaitu indek elison glaser, analisis regresi dengan data panel dan sistem informasi geografis (SIG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur tahun 1998 cenderung mengumpul di tiga kabupaten atau kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan dan Sidoarjo. Tahun 2003 terjadi perubahan pola dimana industri berstrata sangat tinggi di Jawa Timur terkonsentrasi di empat kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan, Sidoarjo dan Kota Surabaya. Tenaga kerja, input dan upah berpengaruh positif terhadap output industri manufaktur berbasis perikanan.

Arifin (2003) melakukan penelitian tentang dinamika spasial industri manufaktur di Jawa Barat Tahun 1990 sampai dengan 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati konsentrasi daerah industri di Jawa Barat periode waktu 1990 sampai tahun 1999 dan mengamati faktor-faktor penentu konsentrasi spasial industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Barat. Teknik analisa yang digunakan yaitu sistem informasi geografi (SIG), analisis regresi logistik, analisis regresi dengan data panel dan analisis konvergensi. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Barat pada periode pengamatan 1990-1999 tidak merata antar daerah. Industri manufaktur secara spasial masih terkonsentrasi pada wilayah BOTABEK (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) serta wilayah Metropolitan Bandung.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tentang konsentrasi spasial dapat diketahui bahwa kegiatan industri cenderung mengumpul. Dimana konsentrasi spasial ditentukan oleh biaya upah, biaya transportasi dan akses pasar serta eksternalitas dari konsentrasi spasial yang berkaitan dengan penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi, sedangkan spesialisasi dalam ekonomi merupakan suatu bentuk pembagian tenaga kerja individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan-kegiatan yang terbatas.

Penelitian terdahulu terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif terdapat empat penelitian yaitu sebagai berikut :

Agustina (2017) melakukan penelitian analisis sektor unggulan guna mendorong pembangunan daerah dan strategi pengembangannya studi kasus di Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian untuk pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan metode analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis *shift share*, analisis *location quotient* (LQ), analisis *overlay*, analisis *klassen typology* dan analisis swot. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka pada tahun 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat 2010. Hasil penelitian dari analisis MRP, analisis *shift share*, analisis LQ, analisis *overlay*, analisis *klassen typology* menunjukkan bahwa pertumbuhan serta kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Majalengka sebagai sektor basis serta yang memiliki kriteria sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, disusul sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Hasil penelitian dari analisis swot, strategi kebijakan pembangunan sektor unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan potensi sektor basis, meningkatkan kualitas pelayanan yang ada

pada bidang pendidikan, pelayanan bidang kesehatan, bidang sarana dan prasarana publik serta meningkatkan daya saing dalam perekonomian daerah.

Mubarok (2016) melakukan penelitian tentang analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan dan strategi pengembangannya studi kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2014. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010. Model analisis yang digunakan adalah analisis model rasio pertumbuhan (MRP), analisis *shift share*, analisis *location quotient* (LQ), analisis *overlay*, analisis *klassen typology* dan analisis swot. Hasil penelitian dari analisis MRP, analisis *shift share*, analisis LQ, analisis *overlay*, analisis *klassen typology* menunjukkan bahwa sektor basis yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor *real estate*, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi kebijakan pembangunan sektor unggulan yang perlu diambil adalah meningkatkan perekonomian daerah melalui potensi sektor basis, meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Hidayat dkk. (2014) melakukan kajian wilayah pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kompetitif komoditas unggulan pertanian berdasarkan luas tanam, mengidentifikasi desa-desa berbasis industri kecil pengolahan hasil pertanian, mengidentifikasi desa yang memiliki tingkat fasilitas pelayanan dan aksesibilitas tinggi untuk mendukung industri, mengidentifikasi potensial fisik lahan untuk pengembangan komoditas,

menentukan daerah pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian dan daerah pengembangan komoditasnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis location quotient (LQ), shift share (SSA), skalogram dan kesesuaian lahan. Komoditas pertanian yang diteliti adalah jagung, mangga, kedelai dan pisang. Hasil penelitian menunjukkan jagung unggul di 6 kecamatan, mangga unggul di 13 kecamatan, kedelai unggul di 1 kecamatan, dan pisang unggul di 3 kecamatan. Terdapat 179 desa berbasis industri kecil pengolahan hasil pertanian. Desa dengan tingkat fasilitas pelayanan dan aksesibilitas tinggi terdiri atas 50 desa. Fisik lahan yang sesuai untuk masing-masing wilayah pengembangan komoditas terdiri atas 21.862 hektar untuk jagung, 207.546 hektar untuk mangga, 4.073 hektar untuk kedelai, dan 20.669 hektar untuk pisang. Wilayah yang diarahkan untuk pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian terdiri atas 10 desa sebagai desa industri dan 6 kawasan industri yang merupakan gabungan dari beberapa desa, sedangkan arah prioritas pengembangan komoditas terdiri atas 3.264,24 hektar untuk jagung, 302,57 hektar untuk mangga, 3.694 hektar untuk kedelai dan 907,61 hektar untuk pisang.

Falatehan dan Wibowo (2008) melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif perusahaan komoditi jagung di Kabupaten Grobogan studi kasus Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani jagung di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM), menganalisis keunggulan kompetitif usahatani jagung di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan analisis Diamond Porter, menganalisis perubahan yang terjadi terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif jika terjadi perubahan harga output dan harga input. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan komoditi jagung di Desa Panunggalan menguntungkan, baik dilihat secara finansial maupun secara ekonomi, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Adapun kebijakan pemerintah terhadap perusahaan komoditi jagung di Desa Panunggalan belum berjalan dengan efektif. Pada analisis sensitivitas, meningkatnya harga benih sebesar 28,57 persen, meningkatnya harga tenaga kerja sebesar 25 persen, meningkatnya harga pupuk

Urea sebesar 12,79 persen dan TSP sebesar 10,71 persen, turunnya harga output sebesar 25 persen, serta gabungan keempatnya tidak menyebabkan hilangnya keunggulan komparatif dan kompetitif pada perusahaan komoditi jagung di Desa Panunggalan. Komponen yang paling sensitif terhadap keuntungan perusahaan komoditi jagung di Desa Panunggalan adalah komponen harga output. Pada Analisis Porter, secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa kondisi yang ada di daerah penelitian mendukung peningkatan daya saing perusahaan komoditi jagung di daerah penelitian.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tentang keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dapat diketahui bahwa dengan teridentifikasinya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, industri maupun sektor-sektor yang merupakan daerah atau wilayah basis dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian wilayah.

Penelitian terdahulu terkait dengan strategi pengembangan terdapat empat penelitian yaitu sebagai berikut :

Astutik dan Santoso (2013) melakukan penelitian tentang prioritas wilayah pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan menentukan prioritas wilayah pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Studi ini menggunakan alat analisis yang terdiri dari analisis delphi, analisis AHP dan multi kriteria. Analisis delphi digunakan untuk menentukan faktor-faktor pengembangan industri pengolahan perikanan. Analisis AHP dan multi kriteria untuk menentukan prioritas wilayah pengembangan industri pengolahan perikanan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor-faktor penentu pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep yaitu ketersediaan dan kontinuitas bahan baku sumber daya perikanan, potensi tenaga kerja di wilayah penelitian, ketersediaan pengolah ikan untuk industri pengolahan perikanan, ketersediaan nelayan untuk menunjang pengembangan industri pengolahan perikanan, ketersediaan jaringan listrik, air bersih dan jalan untuk industri pengolahan perikanan, keberadaan prasarana perikanan dan industri pengolahan perikanan untuk menunjang pengembangan industri. Berdasarkan

faktor-faktor tersebut didapatkan delapan kecamatan dari dua puluh kecamatan yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep yang kemudian dijadikan sebagai prioritas wilayah pengembangan yaitu Kecamatan Dungkek, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Raas, Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Nonggunong.

Hartini (2016) melakukan penelitian tentang peran peraturan tata ruang dalam strategi pengembangan usaha kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian: (1) Menganalisis sebaran dan kondisi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan di pesisir sebelum dan sesudah ditetapkannya RTRW Kabupaten Cirebon; (2) Menganalisis kontribusi pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan terhadap pengembangan perekonomian secara regional di wilayah kajian; (3) Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan, kondisi dan perkembangan UKM pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Cirebon; dan (4) Menyusun strategi prioritas untuk mendorong pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan agar berdampak bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dengan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan metode analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan UKM di wilayah kajian melalui metode analisis *Strengths, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (SWOT) dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan pendekatan kuantitatif dengan analisis sistem informasi geografis (SIG). Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi prioritas untuk mendorong pengembangan UKM pengolahan hasil perikanan dapat dilakukan melalui variasi, jenis dan distribusi dari produk hasil perikanan. UKM PHP meningkatkan variasi produk, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha mencapai Rp 2.000.000,- per bulan dengan omset mencapai Rp 30.000.000,- per bulan dan memberikan kontribusi terhadap PDRB melalui ekspor produk senilai US\$ 8.447.096,43, dengan prioritas utama pada pengembangan UKM adalah variasi produk.

Syahrudin (2008) melakukan penelitian tentang analisis strategi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis peras di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis di wilayah Kabupaten Kuningan dan menyusun strategi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis di wilayah Kabupaten Kuningan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode Proses Hierarki Analitik (PHA). Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyusun strategi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis di Kabupaten Kuningan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak pengusaha dan pihak pemerintah daerah sebagai pihak yang membuat kebijakan. Setelah itu dilakukan pemilihan terhadap strategi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis peras Kabupaten Kuningan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choise* versi 2000. Dari hasil wawancara dengan pihak pengusaha agroindustri minuman jeruk nipis peras dan pemerintah daerah maka dapat diidentifikasi faktor-faktor pertimbangan utama yang mempengaruhi penyusunan strategi pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis peras adalah pasar, manajemen, produk minuman jeruk nipis, dan ketersediaan lembaga penunjang. Subfaktor pertimbangan utama dari pasar adalah promosi dan jaringan informasi. Dari subfaktor pertimbangan manajemen adalah kualitas sumber daya manusia dan *entrepreneurship* yang berpengaruh terhadap sub faktor pertimbangan produk adalah bahan baku, adopsi teknologi, dan inovasi, sedangkan subfaktor pertimbangan lembaga penunjang adalah kebijakan pemerintah, ketersediaan lembaga permodalan, dan penelitian dan pengembangan. Dari hasil pengolahan horizontal diketahui bahwa prioritas pertama dari faktor pertimbangan utama dalam pengembangan agroindustri minuman jeruk nipis peras di Kabupaten Kuningan adalah pasar minuman jeruk nipis. Pasar mendapatkan prioritas pertama karena saat ini agroindustri minuman jeruk nipis belum dapat mempertahankan dan mengembangkan pasar terkait keterbatasan dalam promosi yang dilakukan. Faktor pertimbangan produk mendapat prioritas kedua karena kendala bahan baku kerap menyulitkan pelaku usaha dalam usaha

pengembangan pasar. Faktor manajemen mendapatkan prioritas ketiga karena kemunduran industri pengolahan diakibatkan oleh kurangnya kemampuan dalam pengelolaan perusahaan dan faktor lembaga penunjang mendapatkan prioritas terakhir karena agroindustri minuman jeruk nipis belum memanfaatkan lembaga penunjang secara maksimal. Dari hasil pengolahan vertikal dengan menggunakan metode PHA dapat diurutkan alternatif strategi berdasarkan prioritas yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kontinuitas bahan baku dilakukan menjalin kemitraan dengan petani jeruk nipis di Kabupaten Kuningan. Kemitraan bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan mutu bahan baku jeruk nipis sehingga menjaga kontinuitas produksi perusahaan, (2) kemudian meningkatkan pangsa pasar melalui strategi promosi dilakukan dengan ikut serta dalam setiap kegiatan pameran/ekspo yang diadakan oleh berbagai, promosi melalui radio lokal, melalui koran, majalah, penyebaran leaflet di outlet-outlet penjualan, dan memperluas jaringan distribusi dengan menambah agen penjualan yang dapat mempromosikan produk minuman jeruk nipis di luar daerah Kabupaten Kuningan, (3) meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait yaitu dilakukan dengan aktif menjangkau kerjasama dengan pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, serta lembaga penelitian dan pengembangan (4) mengembangkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk yaitu dilakukan dengan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dalam meningkatkan inovasi serta keamanan produk dan Universitas Pasundan dalam teknologi pengolahan dan (5) strategi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara kontinyu yaitu dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan perusahaan dan bekerjasama dengan Pusat Inkubator Bisnis Uniku dalam pelatihan-pelatihan bidang manajemen.

Suyedi (2007) melakukan penelitian tentang analisis pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji kendala yang mempengaruhi dan faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu serta mengkaji dan merumuskan strategi yang tepat dalam mengembangkan perikanan tangkap di

Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dengan menggunakan matrik EFE dan IFE, terhadap faktor-faktor strategis diatas, maka dilakukan perumusan strategi pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu dengan menggunakan matrik SWOT, DEA dan analisis potensi (SDI). Hasil perumusan strategi tersebut dijadikan dasar untuk membuat hirarki utama dengan menggunakan analisis proses hierarki analitik (PHA). Penentuan proses hierarki dengan menggunakan PHA ini untuk menentukan alternatif strategi pengembangan yang cocok, efektif dan efisien yang akan diterapkan sesuai dengan arah pengembangan perikanan tangkap dimasa akan datang. Perumusan strategi yang diperoleh dari analisis swot dalam rangka pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu, meliputi peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, dan infrastruktur, peningkatan kuantitas dan kemampuan sarana penangkapan ikan, kemitraan usaha, fasilitasi sumber permodalan. Penertiban pelaksanaan lelang serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparat dan nelayan. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan eksternal dan internal organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa faktor strategis eksternal dan internal yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu. Faktor-faktor penentu yang menjadi peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah peluang pemanfaatan potensi perikanan, arah dan kebijakan pembangunan sektor perikanan, terbukanya peluang ekspor, adanya peningkatan permintaan ikan baik lokal maupun regional, peluang menarik investor, komitmen eksekutif dan legislatif, berkembangnya teknologi dan informasi, adanya kerjasama dengan perguruan tinggi. Adapun faktor-faktor yang menjadi ancaman meliputi tingkat pendidikan masyarakat nelayan, mekanisme koordinasi, mekanisme pasar, dampak krisis moneter. Urutan prioritas tersebut adalah peningkatan kuantitas dan kemampuan sarana penangkapan ikan, menempati prioritas pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparat dan nelayan, merupakan prioritas kedua, prioritas ketiga fasilitas permodalan, prioritas keempat peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan infrastruktur, prioritas

keenam penertiban pelaksanaan lelang ikan, dan prioritas ketujuh adalah penerapan program manajemen mutu terpadu.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tentang strategi pengembangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan dapat disusun menjadi struktur hirarki sehingga mempermudah dalam menentukan serta mewujudkan strategi yang diprioritaskan dalam sebuah organisasi.

## 2.2 Pengertian Industri

Pada awal mulanya kata industri berasal dari bahasa Prancis Kuno yaitu *industrie* yang mempunyai makna atau pengertian aktifitas atau kerajinan. Dengan perkembangan tata bahasa serta ilmu pengetahuan yang semakin pesat, pengertian atau makna industri dapat didefinisikan secara spesifik.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama dan untuk pasar yang sama (Syahrudin, 2008). Dalam pengertian lain, kata industri sering disebut sektor industri manufaktur/pengolahan yaitu salah satu lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi (Hastina, 2007). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan atau

Peralatan Industri Kecil dan Menengah mengklasifikasikan industri menurut nilai investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan pada klasifikasi industri menurut jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang dan industri besar. Adapun penjelasan tentang industri berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan yaitu sebagai berikut (BPS Kabupaten Situbondo, 2016) :

- a. Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya : industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe dan tahu, dan industri makanan ringan.
- b. Industri kecil yaitu industri yang tenaga kerja berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 19 (sembilan belas) orang, ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya : industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
- c. Industri sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 (dua puluh) sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang, ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya : industri konveksi, industri bordir dan industri keramik.

- d. Industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, ciri industri besar adalah modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilik saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya : industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

### **2.3 Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan**

Industri pengolahan merupakan kategori yang meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlukan sebagai industri pengolahan. Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terdapat 4 (empat) yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya, industri tersebut terbagi menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (BPS, 2015).

Industri pemindangan ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng dan pindang tongkol. Industri pemindangan ikan termasuk industri kecil berdasarkan pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Di Kabupaten Situbondo terdapat 41 (empat puluh satu) pelaku usaha dibidang industri pemindangan ikan dengan menggunakan bahan baku ikan laut. Industri pemindangan ikan menghasilkan produk pindang ikan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017).

Industri penggaraman atau pengeringan ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses penggaraman atau pengeringan, seperti ikan tembang asin dan ikan teri asin. Industri penggaraman atau pengeringan ikan termasuk industri kecil berdasarkan pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Di Kabupaten Situbondo terdapat 20 (dua puluh) pelaku

usaha dibidang industri penggaraman atau pengeringan ikan dengan menggunakan bahan baku ikan laut. Industri penggaraman atau pengeringan ikan menghasilkan produk ikan asin, ikan kering, ikan teri kering dan teri nasi (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017).

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip dengan cara selain yang tercakup dalam proses penggaraman atau pengeringan dan pemindangan, seperti kecap ikan dan peda peragian. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan termasuk industri kecil berdasarkan pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Di Kabupaten Situbondo terdapat 82 (delapan puluh dua) pelaku usaha dibidang industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dengan menggunakan bahan baku ikan laut. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan menghasilkan produk dendeng ikan, kerupuk ikan, keripik ikan, teri crispy, petis ikan, bakso ikan, terasi, dan abon ikan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017).

Industri pembekuan biota air lainnya merupakan usaha pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku dan paha kodok beku. Industri pembekuan biota air lainnya termasuk industri menengah berdasarkan pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Di Kabupaten Situbondo terdapat 1 (satu) pelaku usaha dibidang industri pembekuan biota air lainnya dengan menggunakan bahan baku udang. Industri pembekuan biota air lainnya menghasilkan produk pembekuan udang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017).

#### **2.4 Konsentrasi Spasial**

Konsentrasi spasial merupakan pengelompokan setiap industri dan aktifitas ekonomi secara spasial, dimana industri tersebut berlokasi pada suatu wilayah tertentu (Fujita dkk., 1999). Para tokoh aliran klasik beranggapan bahwa konsentrasi aktifitas ekonomi secara spasial biasanya merujuk pada dua macam eksternalitas ekonomi yaitu penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi yang sering disebut ekonomi aglomerasi. Mereka juga mendefinisikan konsentrasi

spasial sebagai *regional share* yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu industri. Dampak atau efek dari konsentrasi spasial adalah terciptanya spesialisasi produk pada daerah tertentu, konsep ini sering disebut *Marshallian industrial district* (Sjafrizal, 2008).

Konsentrasi spasial didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang terspesialisasi dimana berkumpulnya perusahaan pada suatu lokasi atau wilayah akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang terspesialisasi, sehingga menguntungkan perusahaan dan tenaga kerja. Berkumpulnya perusahaan atau industri yang saling terkait akan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan input yang terspesialisasi serta lebih baik dan lebih murah, dengan adanya konsentrasi spasial akan mempermudah serta memperlancar informasi dan pengetahuan pada lokasi tersebut (Kuncoro, 2002).

Konsep konsentrasi spasial ekonomi bersumber dari fenomena nyata yang diawali oleh teori lokasi Weber. Menurut Weber ada tiga yang menjadikan alasan perusahaan menentukan lokasi industri yaitu sebagai berikut (Saputra, 2015) :

a. Perbedaan biaya transportasi

Produsen cenderung memilih lokasi yang memberikan keuntungan berupa penghematan biaya transportasi serta mendorong efisiensi efektifitas produksi. Perusahaan akan berkumpul pada daerah yang dekat bahan baku, atau dekat dengan pasar tujuan.

b. Perbedaan biaya upah

Produsen cenderung memilih lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktifitas ekonomi sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Adanya suatu wilayah dengan tingkat upah yang tinggi mendorong tenaga kerja untuk terkonsentrasi pada wilayah tersebut, fenomena ini dapat ditemui pada kota-kota besar dengan keberagaman tinggi.

c. Penghematan aglomerasi

Penghematan aglomerasi adalah penghematan yang terjadi akibat terkonsentrasinya aktifitas ekonomi secara spasial. Penghematan tersebut dapat terjadi dalam industri yang sama atau beberapa industri yang berbeda. Hoover

(Fujita dan Thiesse, 2002) menyatakan bahwa ada 2 macam penghematan konsentrasi spasial yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi karena konsentrasi spasial dalam industri yang sama meliputi penghematan transfer yang terjadi keseluruhan perusahaan dalam industri saling terkait satu sama lain, sehingga menyebabkan menurunnya biaya produksi perusahaan pada suatu industri ketika produksi total dari industri tersebut meningkat. Penghematan urbanisasi terjadi apabila industri-industri pada suatu wilayah terasosiasi dan terakumulasi dalam berbagai tingkatan aktifitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga mendorong terciptanya pendukung dari aktifitas ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan keuntungan secara komulatif bagi seluruh industri.

## 2.5 Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis atau *geographic information system* (GIS) merupakan suatu bidang kajian ilmu dan teknologi yang digunakan oleh berbagai bidang dan disiplin ilmu dan berkembang dengan cepat. Berikut adalah beberapa definisi SIG yang telah beredar di berbagai sumber pustaka (Prahasta, 2009) :

1. GIS adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. GIS dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, GIS merupakan sistem komputer yang memiliki 4 (empat) kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis: a. Masukan, b. Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), c. Analisis dan manipulasi data, d. Keluaran (Aronoff, 1989).
2. GIS adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia (*brainware*), organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi (Chrisman, 1997).

3. GIS adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini diimplementasikan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk: (a) akuisisi dan verifikasi data, (b) kompilasi data, (c) penyimpanan data, (d) perubahan dan atau *updating* data, (e) manajemen dan pertukaran data, (f) manipulasi data, (g) pemanggilan dan presentasi data, (h) analisa data (Bern, 1992).
4. GIS adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi (Demers, 1997).
5. GIS adalah sistem yang dapat mendukung (proses) pengambilan keputusan (terkait aspek) spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap akan mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi (Gistut, 1994).

Dari beberapa definisi SIG di atas maka dapat disimpulkan bahwa SIG merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaannya di permukaan bumi.

Data yang diolah pada SIG ada 2 macam yaitu data Geografis (data spasial dan data non-spasial). Data spasial adalah data yang berhubungan dengan kondisi geografi misalnya sungai, wilayah administrasi, gedung, jalan raya dan sebagainya. Data spasial didapatkan dari peta, foto udara, citra satelit, data statistik dan lain-lain. Hingga saat ini secara umum persepsi manusia mengenai bentuk representasi entity spasial adalah konsep raster dan vector, sedangkan data non-spasial adalah selain data spasial yaitu data yang berupa text atau angka, biasanya disebut dengan atribut.

Data non-spasial ini akan menerangkan data spasial atau sebagai dasar untuk menggambarkan data spasial. Dari data non-spasial ini nantinya dapat dibentuk data spasial. Misalnya jika ingin menggambarkan peta penyebaran

penduduk maka diperlukan data jumlah penduduk dari masing-masing daerah (data non-spasial), dari data tersebut nantinya kita dapat menggambarkan pola penyebaran penduduk untuk masing-masing daerah.

SIG merupakan suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi, SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data bereferensi geografi: (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran. (Aronoff, 1991 *dalam* Triyono dan Wahyudi, 2008). Secara konseptual sebuah teknologi SIG harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a. Lokasi, SIG harus mampu menunjukkan lokasi keberadaan suatu objek berdasarkan gambar yang disajikan pada peta. Lokasi objek didiskripsikan sebagai cara untuk mencapainya, misalnya nama tempat, kode pos, atau dapat pula menggunakan kedudukan objek secara geografis seperti garis lintang dan garis bujur.
- b. Kondisi, sebuah teknologi SIG harus dapat mengetahui kondisi dari suatu objek yang tergambar dalam peta. Kondisi ini misalnya jenis tanah, keberadaan flora dan fauna dan sebagainya.
- c. Tren, SIG harus mampu menunjukkan perubahan yang terjadi pada objek tertentu, setelah selang beberapa waktu.
- d. Pola, SIG harus mampu memberi informasi tentang pola suatu objek pada daerah tertentu, misalnya pencemaran pada daerah industri, kesibukan lalu lintas dan sebagainya.
- e. Pemodelan, SIG harus mampu membuat suatu pemodelan untuk mengembangkan sistem, misalnya: apa yang terjadi jika dilakukan

penambahan jaringan jalan. (Prahasta, 2001 *dalam* Triyono dan Wahyudi, 2008).

SIG merupakan sistem informasi geografi yang berbasis spasial (keruangan) dengan penyebaran data-data spasial, misalnya data-data lokasi wisata, data-data lokasi rawan banjir, data-data pertumbuhan penduduk yang semuanya itu diintegrasikan ke dalam peta sehingga dapat memuat informasi secara holistik, keruangan (spasial). Data spasial memiliki peran penting dalam setiap aktifitas pemerintahan. Lebih kurang 90% aktifitas pemerintahan senantiasa terkait dengan elemen spasial atau lokasi. Pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, kegiatan dan monitoring serta evaluasi tidak dapat lagi hanya berdasarkan data dan laporan tanpa mengetahui situasi di lapangan (Anonimus, 2010).

Peran data spasial dalam aktifitas pemerintahan antara lain yaitu (a) menampilkan (visualisasi) data dan informasi berikut sebarannya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu data/ informasi dibandingkan sajian data/ informasi hanya dalam bentuk redaksional, tabel atau grafik. (b) digunakan sebagai identifier (*common ID*) untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang terkait dengan suatu lokasi/ wilayah. (c) digunakan untuk melakukan analisis yang bersifat keruangan (*spatial analysis*) untuk membantu mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan terjadi di berbagai sektor serta mendukung aktifitas pemerintahan khususnya proses pengambilan keputusan yang efisien dan efektif.

## **2.6 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif Wilayah**

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat diperlukan informasi mengenai potensi ekonomi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk

dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang (Purwaningsih, 2009).

Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo dalam Salvatore (1996) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengeksport barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Pengembangan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif diharapkan dapat menggerakkan sektor ekonomi yang lain. Apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan segera, tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

Pada masa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keunggulan kompetitif mendapat perhatian lebih besar daripada keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan daerah untuk memasarkan produknya ke luar daerah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi di suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di daerah lainnya. Keunggulan kompetitif merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dalam suatu kurun waktu (Purwaningsih, 2009).

Dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif, maka keunggulan komparatif suatu kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu pertanda awal bahwa kegiatan ekonomi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Jika suatu sektor memiliki keunggulan komparatif karena besarnya potensi sektor tersebut maka kebijakan yang diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan ekonomi tersebut

dapat berimplikasi kepada terciptanya keunggulan kompetitif. Kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah (Purwaningsih, 2009).

Terkait dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu wilayah dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2003):

1. Memiliki potensi sumber daya alam,
2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan keterampilan-keterampilan khusus,
3. Aksebilitas wilayah yang baik,
4. Memiliki pasar yang baik atau dekat dengan pasar,
5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi,
6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki keterampilan yang baik dengan upah yang relatif rendah,
7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan,
8. Kebijakan pemerintah yang mendukung pada terciptanya keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

## **2.7 Konsep Sektor Unggulan**

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain, sedangkan pada lingkup nasional suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor diwilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar (Tumenggung, 1996). Mawardi (1997) menjelaskan bahwa sektor unggulan memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap dan kemajuan teknologi. Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan disuatu daerah sangat erat hubungannya dengan data produk domestik regional bruto (PDRB) dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu didalam produk domestik regional bruto (PDRB) terdapat informasi yang sangat penting untuk melihat kontribusi masing-masing sektor serta tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/ kota.

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya (Tarigan, 2005). Makna unggul tersebut bukan dalam bentuk nilai tambah riil melainkan dalam bentuk perbandingan. Jika keunggulan dalam bentuk nilai tambah riil dinamakan keunggulan absolut, sedangkan keunggulan dalam bentuk perbandingan suatu komoditi jika dikembangkan dapat menguntungkan dibanding dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah.

Faktor-faktor yang bisa membuat suatu daerah memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dapat berupa kondisi alam, yaitu sesuatu yang sudah *given* tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia. Faktor-faktor yang dapat membuat sesuatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat dikelompokkan (Tarigan, 2005), yaitu pemberian alam, masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir, masyarakatnya menguasai keterampilan khusus, wilayah itu

dekat dengan pasar, wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi, daerah konsentrasi/sentra dari suatu kegiatan sejenis, daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung, mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan dan kebijakan pemerintah.

## 2.8 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi pertama kali dikembangkan oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah itu sendiri. Oleh karena itu pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat tidak bebas tumbuh (*endogenous*). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2005).

Aktifitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

## 2.9 Konsep Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *location quotient* (LQ) adalah suatu metode untuk mengukur spesialisasi relatif dari suatu wilayah atau daerah dalam industri-industri tertentu. Metode LQ dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dengan menggunakan metode ini, perencana dapat mengetahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah yang tingkatannya lebih tinggi atau sektor lain yang memiliki kategori yang sama. (Tarigan, 2007).

Menggunakan analisis *location quotient* (LQ) sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor baru atau sedang tumbuh apalagi selama ini belum pernah ada, analisis *location quotient* (LQ) tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Namun lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi daerah-daerah lainnya (Savitri, 2008).

Untuk mengetahui potensi keunggulan komparatif komoditas yang merupakan indikasi komoditas basis dan bukan basis dapat digunakan metode analisis *location quotient* (LQ). Metode analisis *location quotient* (LQ) merupakan perbandingan relatif antara kemampuan komoditas yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Metode analisis *location quotient* (LQ) juga menunjukkan efisiensi relatif wilayah, dan terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor (Rustiadi dkk., 2009).

Metode analisis *location quotient* (LQ) digunakan untuk mengindikasikan kemampuan suatu daerah dalam memproduksi suatu komoditas dibandingkan dengan produksi komoditas tersebut dalam lingkup wilayah yang lebih luas (Hendayana, 2003). Metode analisis *location quotient* (LQ) mengasumsikan adanya sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografis, produktivitas tenaga kerja homogen, setiap industri menghasilkan barang yang sejenis didalam sektor yang bersangkutan. Kriteria  $LQ > 1$  menunjukkan peranan aktifitas ekonomi komoditas tersebut disuatu daerah menonjol dan surplus serta kemungkinan dapat mengekspor ke daerah lain karena komoditas tersebut lebih efisien dan murah sehingga mempunyai keunggulan komparatif. Analisis *location quotient* (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan dalam ekonomi geografi. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi basis aktifitas, mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah dan tingkat kecukupan barang/ jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Nilai LQ merupakan indeks untuk membandingkan

pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut secara total (Falatehan dan Novrilasari, 2009).

Analisis *Location Quotient* (LQ) dapat menjawab sejauh mana aktifitas industri tertentu terkonsentrasi dalam suatu wilayah (Nugroho dan Dahuri, 2012). Hasil analisis *location quotient* (LQ) menjelaskan apakah suatu sektor telah dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, kurang atau justru lebih (surplus). Sektor yang surplus ini adalah sektor yang dikatakan sebagai sektor basis dan memiliki potensi ekspor. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini yaitu (a) kondisi geografis relatif seragam, (b) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (c) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama. Hasil analisis *location quotient* (LQ) menunjukkan keunggulan komparatif suatu wilayah. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu daerah mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada daerah lainnya.

Koefisien lokasi dimaksudkan untuk mengukur relatif derajat spesialisasi suatu industri atau kelompok industri yang dimiliki oleh suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Rumus perhitungan analisis *location quotient* (LQ) (Rustiadi dkk., 2011) yaitu sebagai berikut :

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X}$$

Dimana :

- $X_{ij}$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan ke- $i$  di kecamatan  $j$  (Rp)
- $X_i$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di kecamatan  $j$  (Rp)
- $X_j$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan ke- $i$  di Kabupaten Situbondo (Rp)
- $X$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo (Rp)

### 2.10 Konsep *Shift Share Analysis* (SSA)

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan, sedangkan metode *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional (Tarigan, 2005).

Pertambahan lapangan kerja (*employment*) regional total ( $\Delta E_r$ ) dapat diurai menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula disebut komponen *national share*. Komponen *national share* (N) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Komponen *shift* adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah *shift netto* dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D). Adapun cara menghitungnya menurut Tarigan (2005) yaitu sebagai berikut :

- a. Pertambahan lapangan kerja regional sektor *i* ini dapat diperinci atas pengaruh dari *national share*, *proportional share* dan *differential shift*. Dalam notasi aljabar adalah :

$$\Delta E_{r,i,t} = (N_{s_i} + P_{r,i} + D_{r,i})$$

- b. Peranan *national share* ( $N_{si}$ ) adalah seandainya pertambahan lapangan kerja regional sektor  $i$  tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja nasional secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

- c. *Proportional shift* ( $P_{r,i}$ ) adalah melihat pengaruh sektor  $i$  secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor  $i$  pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left[ \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right] E_{r,i,t-n}$$

- d. *Differential shift* ( $D_{r,i}$ ) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor  $i$  di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor  $i$  secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left[ \frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right] E_{r,i,t-n}$$

## 2.11 Konsep Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis untuk melihat deskripsi kegiatan atau sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik eksternal maupun internal (Yusuf, 1999). Dalam analisis model rasio pertumbuhan (MRP) terdapat dua macam rasio pertumbuhan yaitu: (a) rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ ) dan (b) rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ ). Rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ ) merupakan perbandingan rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja kegiatan industri  $i$  di Kabupaten Situbondo dengan rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Situbondo. Rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ ) merupakan perbandingan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja kegiatan

industri i di tingkat Kecamatan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja kegiatan industri i di tingkat Kabupaten Situbondo. Adapun rumus perhitungan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) yaitu sebagai berikut:

a) Rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ )

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah referensi (} RP_R \text{)} = \frac{\Delta TK_{iR} / TK_{iR(t)}}{\Delta TK_R / TK_{R(t)}}$$

Keterangan :

$\Delta TK_{iR}$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi

$TK_{iR(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i awal periode di wilayah referensi

$\Delta TK_R$  : perubahan jumlah tenaga kerja di wilayah referensi

$TK_{R(t)}$  : jumlah tenaga kerja pada awal periode di wilayah referensi

b) Rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ )

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah studi (} RP_S \text{)} = \frac{\Delta TK_{ij} / TK_{iR(t)}}{\Delta TK_R / TK_{R(t)}}$$

Keterangan :

$\Delta TK_{ij}$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah studi

$TK_{iR(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i awal periode di wilayah studi

$\Delta TK_R$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi

$TK_{R(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i pada awal periode di wilayah referensi

## 2.12 Manajemen Strategi

Menurut David (2004) manajemen strategi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perumusan pelaksanaan dan evaluasi keputusan atau kebijakan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada upaya memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, informasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen untuk mencapai keberhasilan organisasi.

### 2.12.1 Tahap – Tahap Manajemen Strategi

Menurut David (2004) tahapan manajemen strategi terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut :

### 1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah mengembangkan misi bisnis, mengidentifikasi peluang serta ancaman eksternal perusahaan atau organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan atau organisasi, menetapkan sasaran jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan.

### 2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi ialah mengembangkan budaya untuk mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi atau perusahaan yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyusun anggaran, mengoptimalkan sistem implementasi serta mengkorelasikan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi atau perusahaan yang telah tercapai. Implementasi strategi menuntut organisasi atau perusahaan dalam menetapkan sasaran tahunan, melengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.

### 3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dalam manajemen strategi. Terdapat tiga macam aktifitas dasar dalam mengevaluasi strategi yaitu : (1) mengidentifikasi atau meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja atau prestasi karyawan, serta (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan, namun keberhasilan hari ini tidak menjamin akan berhasil dimasa yang akan datang.

#### **2.12.2 Analisis Lingkungan**

Analisis lingkungan perusahaan atau organisasi akan sangat penting dilakukan karena memberikan kesempatan kepada para perencana strategi untuk menentukan kebijakan terhadap pilihan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Menurut Umar (2003) lingkungan perusahaan atau bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal yang terdiri variabel kekuatan dan kelemahan dalam memantau manajemen perusahaan, serta lingkungan

eksternal yang dibagi menjadi dua kategori yaitu lingkungan jauh dan lingkungan industri yang meliputi variabel peluang dan ancaman yang diluar kendali atau kontrol manajemen perusahaan.

Lingkungan internal merupakan suatu kondisi yang ada didalam suatu perusahaan atau organisasi. Faktor internal perusahaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi arah dan kebijakan maupun tindakan perusahaan yang berasal dari kondisi internal perusahaan. Analisis lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang menjadi dasar bagi strategi perusahaan atau organisasi. Kekuatan meliputi sumberdaya, keterampilan, keunggulan yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin dilayani oleh perusahaan, sedangkan kelemahan meliputi keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menjadi hambatan atau kendala kinerja perusahaan (Glueck dan Jauch, 1991).

Menurut David (2004) fungsional perusahaan yang mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Aspek sumberdaya karyawan perusahaan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya manusia.
2. Aspek pemasaran merupakan faktor yang mendapatkan perhatian dalam rangka mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan. Faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam aspek produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Pemasaran yang efektif dapat membuat perusahaan tetap bertahan serta memperoleh keuntungan atau laba.
3. Aspek produksi atau operasi melihat apakah perusahaan memperoleh produk atau jasa, apakah perusahaan tersebut padat karya atau padat modal, dan bagaimana perusahaan dapat mengembangkan sistem operasi yang dapat menghasilkan produk dengan jumlah, waktu, dan biaya yang tepat. Produksi dan operasi diupayakan berjalan seefisien mungkin untuk dapat menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
4. Aspek keuangan berhubungan dengan cara mencari sumber dana yang paling cepat agar dapat membiayai kegiatan perusahaan kemudian bagaimana dana

tersebut dialokasikan dengan efisien serta bagaimana perusahaan mengontrol dana tersebut.

5. Aspek penelitian dan pengembangan memfokuskan pada teknologi yang digunakan oleh perusahaan namun tetap memperhatikan kemampuan sumberdaya khususnya sumberdaya manusia. Aspek ini dapat dijadikan sebagai cara memiliki keunggulan bersaing dengan menciptakan produk baru atau mengembangkan produk lama.
6. Aspek sistem informasi manajemen menekankan pada informasi yang digunakan perusahaan untuk mengikat semua fungsi bisnis menjadi satu dan menjadi dasar untuk semua kebijakan atau keputusan manajerial. Tujuan dari aspek sistem informasi manajemen adalah meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas kebijakan atau keputusan manajerial.

Lingkungan eksternal menurut Umar (2003) terdiri dari lingkungan jauh atau lingkungan umum dan lingkungan industri yaitu sebagai berikut :

- a. Lingkungan Jauh atau Lingkungan Umum

Lingkungan umum perusahaan terdiri dari faktor-faktor yang pada dasarnya diluar dan terlepas dari perusahaan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari :

1. Faktor Politik

Arah, kebijakan dan stabilitas politik pemerintah menjadi faktor penting bagi para pengusaha untuk berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. Beberapa hal utama yang harus diperhatikan adalah undang-undang tentang lingkungan dan perburuhan, peraturan tentang perdagangan luar negeri, stabilitas pemerintah, peraturan tentang keamanan dan kesehatan kerja dan sistem perpajakan.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi umum suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi iklim bisnis suatu perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi, semakin buruk pula iklim berbisnis. Adapun beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah siklus bisnis, ketersediaan energi, inflasi, suku bunga, investasi, harga-harga produk dan jasa, produktivitas dan tenaga kerja.

### 3. Faktor Sosial

Kondisi sosial masyarakat memang cepat berubah-ubah. Namun dengan adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi telah mempengaruhi perusahaan dan dapat dikendalikan atau diantisipasi oleh perusahaan.

### 4. Faktor Teknologi

Setiap kegiatan usaha yang diinginkan untuk berjalan terus menerus harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang dapat diterapkan pada produk atau jasa yang dihasilkan atau pada cara operasinya.

#### b. Lingkungan Industri

Terdapat lima aspek lingkungan industri yang akan lebih mengarah pada aspek persaingan dimana bisnis perusahaan itu berada (Kuncoro, 2006) yaitu sebagai berikut :

##### 1. Aspek Persaingan Sesama Pesaing Dalam Industri Yang Sama

Menurut Porter (1985) faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral kekuatan persaingan. Semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan mengindikasikan semakin tinggi pula profitabilitas industri, namun profitabilitas perusahaan mungkin menurun. Intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor yaitu : (1) pertumbuhan industri, (2) biaya tetap dan biaya penyimpanan, (3) Differensiasi produk, (4) identitas merek, (5) biaya pengalihan ke barang lain, (6) konsentrasi dan keseimbangan.

##### 2. Aspek Ancaman Masuknya Pendatang Baru

Sebuah perusahaan atau bisnis tertarik untuk terjun ke dalam suatu industri bila industri tersebut menawarkan keuntungan (*return*) yang tinggi. Secara makro dengan datangnya pemain baru akan membuat persaingan menjadi lebih ketat dan akhirnya berujung pada turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan memasuki suatu industri yaitu : (1) skala ekonomi (*economies of scale*), (2) Differensiasi produk (*proprietary products differences*), (3) identitas merek (*brand identity*), (4) biaya pengalihan (*switching cost*), (5) kebutuhan modal (*capital requirements*), (6) akses terhadap distribusi (*access to distribution*), (7)

keunggulan biaya absolut (*absolute cost advantage*), (8) kebijakan pemerintah (*government policy*), (9) reaksi pesaing (*expected retaliation*).

### 3. Aspek Ancaman Barang Substitusi

Barang substitusi merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adapun ancaman barang substitusi yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor berikut yaitu : (1) harga relatif dalam kinerja barang substitusi (*relative price performance of substitutes*), (2) biaya mengalihkan ke produk lain (*switching cost*), (3) kecenderungan pembeli untuk mensubstitusi (*buyer propensity to substitute*).

### 4. Aspek Daya Tawar Pembeli/ Konsumen

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan tawar pembeli. Faktor tersebut antara lain yaitu : (1) pangsa pembeli yang besar, (2) biaya mengalihkan ke produk lain yang relatif kecil, (3) banyaknya produk substitusi (daya tawar pembeli menjadi rendah jika tidak terdapat barang substitusi, sehingga mau tidak mau pembeli hanya mempunyai satu pilihan produk), (4) tidak atau minimnya Differensiasi produk.

### 5. Aspek Daya Tawar Penyedia Input (Pemasok)

Penyedia input mempunyai daya tawar yang tinggi bila perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penyedia bahan baku bagi perusahaan lain yang membutuhkan inputnya. Artinya, penyedia input memonopoli harga maupun kuantitas barang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tidaknya kekuatan daya tawar penyedia input (pemasok) yaitu : (1) industri pemasok didominasi hanya oleh sedikit perusahaan, (2) produk pemasok hanya memiliki sedikit pengganti barang substitusi, (3) pembeli bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok, (4) produk pemasok didiferensiasikan, (5) produk pemasok memiliki biaya pengalihan yang tinggi, (6) pemasok memiliki ancaman integrasi ke depan yang kuat.

## 2.13 Metode Proses *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau Proses Hirarki Analitik (PHA) pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, ahli matematika dari

University of Pittsburg, Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Proses Hierarki analitik merupakan cara alami manusia dalam bertingkah laku dan berpikir. Namun *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) memperbaiki proses alami itu dengan mempercepat proses berpikir dan meluaskan kesadaran agar mencakup lebih banyak faktor yang bisa dipertimbangkan. *Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang mempertimbangkan suatu persoalan sebagai suatu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya di dalam suatu hirarki. *Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) menangani persoalan kompleks sesuai dengan interaksi-interaksi pada persoalan sebagaimana dilihat dalam kompleksitasnya dan memperluas definisi dan strukturnya melalui pengulangan (Syahrudin, 2008).

Dalam *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA), untuk mengidentifikasi persoalan yang kritis, mendefinisikan strukturnya dan menemukan serta menyelesaikan konflik, memerlukan informasi dan pertimbangan dari beberapa peserta dalam proses itu. Melalui serangkaian kerja sistematis, *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) mensintesis penilaian-penilaian mereka menjadi suatu taksiran menyeluruh dari prioritas-prioritas relatif berbagai alternatif tindakan. Prioritas-prioritas yang dihasilkan *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) merupakan satuan dasar yang digunakan dalam semua jenis analisis, misalnya menjadi garis pedoman, untuk mengalokasikan sumber daya atau sebagai probabilitas dalam membuat ramalan (Syahrudin, 2008).

Pemilihan model ini didasarkan bahwa *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) merupakan proses yang sederhana untuk menganalisis masalah yang kompleks, memodelkan masalah yang tidak terstruktur. Selain itu *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) akan menunjukkan prioritas untuk suatu kriteria dan alternatif yang diturunkan dari hasil komparasi berpasangan dengan cara menentukan dan menginterpretasikan konsistensi dari penilaian pendapat kualitatif ke pendapat

kuantitatif, serta *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) menghargai subjektivitas pendapat responden (Dyer dan Ernest, 1991).

*Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk melaksanakan tindakan kreatif dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut. Selain itu untuk membantu para pemimpin menetapkan informasi apa yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relevan dalam situasi kompleks. *Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) juga dapat melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi peserta, sehingga para pemimpin mampu menilai mutu pengetahuan para pembantu mereka dan kemantapan pemecahan itu (Saaty, 1993).

*Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) memasukan aspek kualitatif dan kuantitatif pikiran manusia (Saaty, 1993). Aspek kualitatif mendefinisikan persoalan dan hirarkinya dan aspek kuantitatif mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat. Proses itu sendiri dirancang untuk mengintegrasikan dwi sifat ini. Proses ini dengan jelas menunjukkan bahwa demi pengambilan keputusan yang sehat dalam situasi kompleks, sehingga diperlukan untuk menetapkan prioritas dan melakukan pertimbangan (*trade off*). Untuk menghitung prioritas memerlukan suatu metode praktis untuk menghasilkan skala bagi pengukuran.

Pada dasarnya metode ini memecah suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya setiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. *Analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) dapat digunakan untuk pengambilan keputusan seperti : menetapkan prioritas, menghasilkan seperangkat alternatif, memilih alternatif, memilih alternatif kebijakan yang terbaik, menetapkan berbagai persyaratan, mengalokasikan sumberdaya, meramalkan hasil

dan menaksir resiko, mengukur prestasi, merancang sistem, mengoptimumkan, merencanakan dan memecahkan konflik (Saaty, 1993).

Ada tiga prinsip dasar *analytical hierarchy process* (AHP) atau proses hirarki analitik (PHA) (Saaty, 1993), yaitu : 1) Menggambarkan dan menguraikan secara hirarki. Menyusun secara hirarki adalah memecahkan persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah, 2) Pembedaan prioritas dan sintesis. Penetapan prioritas adalah menentukan peringkat elemen-elemen menurut pentingnya, 3) Konsistensi logis yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsistensi sesuai dengan kriteria yang logis. Adapun tahapan-tahapan dalam menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) ini yaitu sebagai berikut:

a) Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*)

Kelebihan dari metode AHP ini adalah mampu menggabungkan unsur-unsur kualitatif dan kuantitatif. Kuantifikasi dari hal-hal yang bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan persepsi perbandingan yang diskalakan secara berpasangan (*pairwise comparison scale*). Seseorang yang akan memberikan persepsi tersebut harus mengerti secara menyeluruh mengenai variabel-variabel yang diperbandingkan dan relevansinya terhadap tujuan yang dimaksudkan. Pertanyaan yang diajukan dalam melakukan perbandingan yaitu variabel mana yang lebih penting serta dan berapa kali lebih penting (Sukarme, 2011).

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah, logis dan akurat dalam memberikan persepsi perbandingan antara dua hal. Dalam melakukan perbandingan secara berpasangan, digunakan skala perbandingan (skala fundamental) yang diturunkan berdasarkan riset atau penelitian tentang psikologis atas kemampuan individu dalam membuat suatu perbandingan secara berpasangan terhadap beberapa elemen yang akan dibandingkan (Saaty, 1994). Skala perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Skala Penilaian Antar Kriteria

$X_{ij}$	Definisi Penilaian	Penjelasan
1	Sama Penting	Dua kriteria i dan j memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam memenuhi tujuan
3	Relatif Lebih Penting	Kriteria i sedikit lebih penting dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
5	Lebih Penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang cukup besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
7	Sangat Penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang sangat besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
9	Jauh Lebih Penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
2, 4, 6, 8	Nilai Antara	Penilaian diantara nilai relatif lainnya

Sumber : Saaty, 1994

Keterangan :  $X_{ij}$  merupakan perbandingan nilai relatif antara kriteria (i) dan kriteria (j)

b) Penyusunan *Pairwise Matrix*

Proses perhitungan matematis dalam metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dilakukan dengan menggunakan suatu matrik. Apabila dalam suatu sub sistem operasi terdapat n kriteria operasi yaitu  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , maka hasil perbandingan dari elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matrik A berukuran  $n \times n$  dengan bentuk seperti pada Tabel 2.2 (Saaty, 1994).

Tabel 2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	$A_1$	$A_2$	...	$A_n$
$A_1$	1	$A_{21}$	...	$A_{1n}$
$A_2$	$A_{12}$	1	...	$A_{2n}$
...	...	...	1	...
$A_n$	$A_{1n}$	$A_{2n}$	...	1

Sumber : Saaty, 1994

Pengisian nilai  $a_{ij}$  menggunakan aturan sebagai berikut (Saaty, 1994) :

- a. Jika  $a_{ij} = \infty$ , maka  $a_{ij} = 0$

- b. Jika antara elemen operasi  $A_i$  dengan  $A_j$  mempunyai tingkat kepentingan sama maka nilai  $a_{ij} = a_{ji} = 1$
- c. Nilai  $a_{ij} = 1$  untuk  $i = j$  (diagonal matrik memiliki nilai 1)

Dari matrik perbandingan berpasangan tersebut diatas, dilakukan pembobotan parsial dengan langkah sebagai berikut (Saaty, 1994) :

1. Menjumlahkan nilai setiap kolom dalam matrik perbandingan berpasangan
2. Membagi nilai  $a_{ij}$  pada setiap kolom dengan jumlah nilai pada kolom bersangkutan sehingga diperoleh matrik yang dinormalisasi
3. Menjumlahkan semua nilai setiap baris dari matrik yang telah dinormalisasi dan membaginya dengan jumlah elemen tiap baris, yang merupakan nilai bobot parsial.

c) Uji Konsistensi

Perbandingan berpasangan dari masing-masing elemen dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, kepentingan atau perasaan. Dalam penilaian perbandingan berpasangan sering terjadi ketidakkonsistenan dari preferensi yang diberikan oleh pengambil keputusan. Dalam metode AHP, konsistensi dari penilaian berpasangan tersebut dievaluasi dengan menghitung *Consistency Ratio* (CR). Apabila nilai CR lebih kecil atau sama dengan 10%, maka hasil penilaian tersebut dikatakan konsisten (Sukarnei, 2011).

Formulasi yang digunakan dalam menghitung CR (Saaty, 1994) adalah sebagai berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Keterangan :

- CR : *Consistency Ratio*
- CI : *Consistency Index*
- RI : *Random Consistency Index*

Nilai dari *Consistency Index* diperoleh dengan rumus (Saaty, 1994) sebagai berikut :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - 1}{(n - 1)}$$

Keterangan :

CI : *Consistency Index*

$\lambda_{\max}$  : Nilai maksimum dari *eigenvalue*

n : Ukuran matrik

Apabila CI bernilai nol, berarti matrik konsisten. Batas tidak konsisten diukur dengan menggunakan nilai pembangkit random (RI). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika pertimbangan numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 9 akan diperoleh nilai rata-rata konsistensi untuk matrik dengan ukuran yang berbeda seperti terlihat pada Tabel 2.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai Random Index (RI)

OM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,58

Sumber : Saaty, 1994

Keterangan : OM = Orde Matrik, RI = Random Index

AHP mendeskripsikan suatu pendekatan terstruktur dalam mengambil keputusan sebagai suatu pilihan umum diantara sejumlah alternatif yang dianggap mampu memenuhi serangkaian tujuan. Bobot relatif antar kriteria diperoleh dari *pairwise comparison* hasil persepsi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Inti dari AHP adalah pada metode untuk mengkonversi perkiraan subyektif dari tingkat kepentingan relatif ke dalam suatu per skor atau bobot total (Sukarme, 2011).

Dalam metode mendasar yang dikembangkan oleh Saaty (1994) untuk mengidentifikasi bobot suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar matriks dan menghitung bobot sebagai elemen dari suatu *eigenvector*

yang diasosiasikan dengan maksimum *eigenvector* dari suatu matriks. Prosedur estimasinya relatif kompleks, dengan alternatif yang lebih pantas adalah sebagai berikut :

1. Menghitung rata-rata geometrik dari setiap baris dalam matriks.
2. Menjumlahkan seluruh rata-rata geometrik yang dihasilkan pada langkah pertama.
3. Menormalisasi setiap rata-rata geometrik dengan membaginya dengan total seluruh rata-rata geometrik yang dihitung pada langkah kedua.

Bobot relatif antar kriteria dan skor yang dihitung dengan perbandingan berpasangan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan linear additive model (model penjumlahan linear), dimana semua alternatif memiliki skor terbobotkan.

#### d) Pembobotan

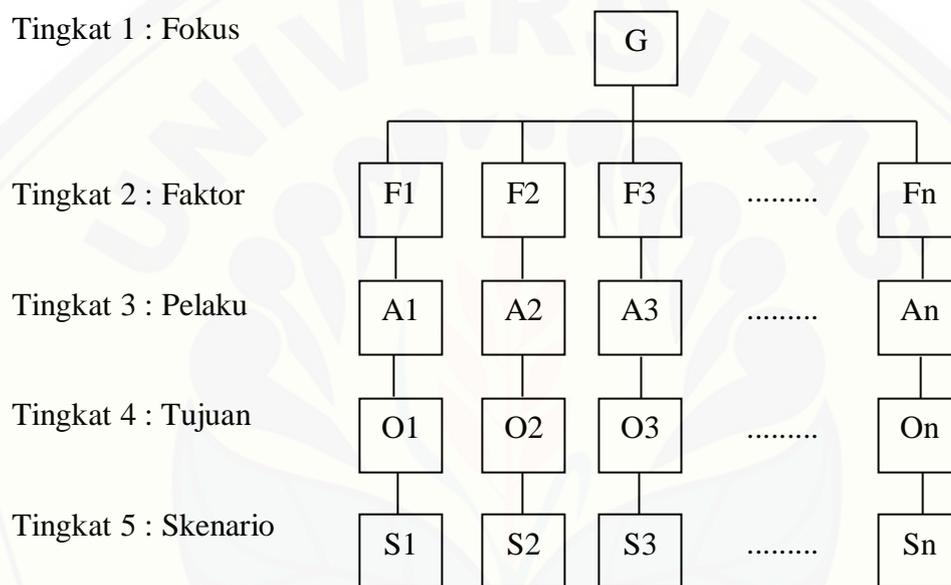
Untuk menyusun bobot antar kriteria perlu dilakukan survei terhadap *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang terlibat dan berkepentingan dengan proses pengembangan industri kecil berbasis pengolahan perikanan di lokasi studi. Setelah dilakukan survei, didapat data untuk memperoleh matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) sesuai persepsi responden dari setiap kriteria perencanaan yang diajukan (Sukarme, 2011).

Hasil wawancara dapat diterjemahkan kedalam bentuk matriks perbandingan berpasangan dan selanjutnya dapat dilakukan proses pembobotan. Penilaian bobot atau skoring alternatif terhadap kriteria umumnya dilakukan dalam skala antara 0 sampai 10 atau angka yang sifatnya numeris yang mewakili proporsi tingkat kepentingannya. Penilaian ini cenderung bersifat lebih subjektif tetapi sifat kuantitatifnya yang digunakan menjadi deskripsi dari persoalan yang akan dianalisis (Sukarme, 2011).

#### e) Proses Analisis Hirarki Atau Skoring

Proses pengambilan keputusan dengan model *Analytical Hierarchy Process (AHP)* mendeskripsikan suatu pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan. Pilihan di antara sejumlah alternatif dengan model *AHP*, dianggap mampu memenuhi serangkaian tujuan dalam pengambilan keputusan. Pada

intinya *AHP* membutuhkan dua masukan, yakni pembobotan (*weighting*) dan skoring (*scoring*). Pembobotan diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan hasil persepsi *stakeholders* (pemangku kepentingan), sedangkan skoring untuk jumlah alternatif yang paling cocok dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* (penilaian ahli). Porsi penilaian (*judgment*) dalam proses skoring dapat diminimalkan jika variabel alternatif diusahakan merupakan beberapa data kuantitatif yang dapat diperbandingkan secara langsung (Sukarme, 2011). Model struktur hirarki dapat dilihat pada Gambar 2.1 yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Struktur Hirarki (Saaty, 1993)

#### 2.14 Kerangka Pemikiran

Di Kabupaten Situbondo industri yang berpotensi pengembangan yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi pada pendapatan per kapita Kabupaten Situbondo. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Sektor industri pengolahan saling berkaitan dengan sektor-sektor yang menyumbang bahan baku. Industri pengolahan di Kabupaten Situbondo yang berbasis pengolahan perikanan terdapat empat jenis industri yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta industri

pembekuan biota air lainnya, industri tersebut terbagi menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS, 2015).

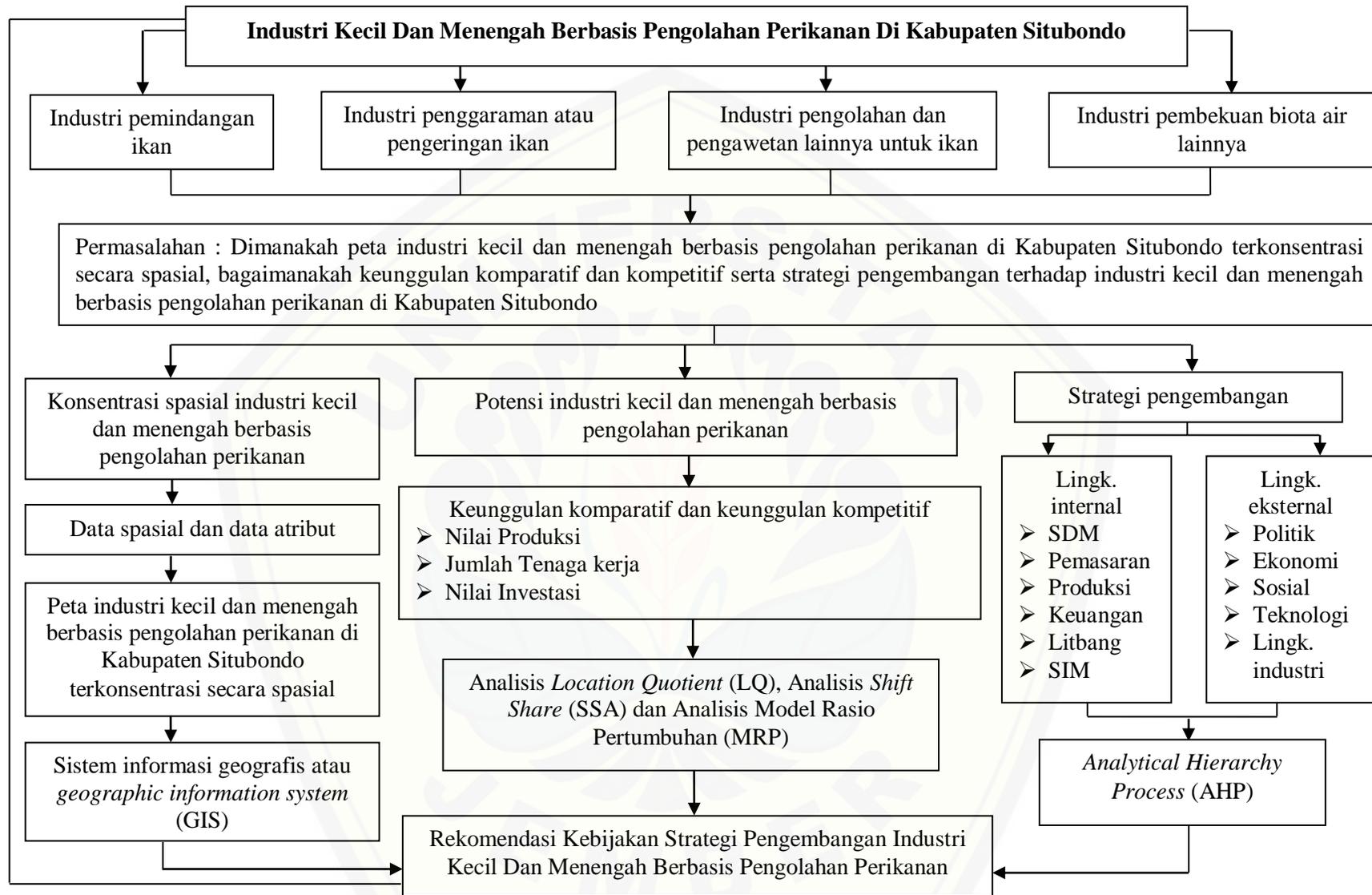
Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa kecamatan dengan pola penyebaran yang tidak teratur atau merata, sehingga menyebabkan munculnya konsentrasi spasial. Konsentrasi kegiatan industri secara spasial ditandai dengan sistem spasial berdasarkan akumulasi modal dan tenaga kerja dalam aglomerasi perkotaan (Ferdiansyah dan Santoso, 2013). Dengan diketahuinya peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang terkonsentrasi secara spasial dapat memberikan informasi tentang kebutuhan input maupun pasar. Oleh sebab itu perlu melakukan analisis secara spasial agar mempermudah diketahuinya peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk dapat mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang terkonsentrasi secara spasial menggunakan metode sistem informasi geografis (Ferdiansyah dan Santoso, 2013). Metode sistem informasi geografis merupakan alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi dimana peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial. Adapun beberapa prosedur baku dalam penyusunan dan penggunaan metode sistem informasi geografis yaitu pengumpulan data, pemrosesan data awal, membangun *database*, pencarian dan analisis spasial serta penampilan dan interpretasi dengan menggunakan peta (Kuncoro, 2012).

Selanjutnya potensi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan dapat dikatakan sektor basis apabila memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di suatu wilayah. Identifikasi komoditas basis secara komparatif dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan nilai *location quotient* (LQ). Hasil analisis *location quotient* (LQ) menunjukkan kemampuan aktifitas komoditas suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan kebutuhan daerah lain. Identifikasi komoditas basis secara kompetitif menggunakan *shift*

*share analysis* (SSA) untuk memahami pergeseran struktur aktifitas disuatu lokasi tertentu dibandingkan dengan daerah agregat yang lebih luas. Hasil *shift share analysis* (SSA) menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktifitas disuatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya didalam wilayah total. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi (Rustiadi dkk., 2011). Dalam menentukan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif suatu wilayah jika nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan total kabupaten atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya (Rustiadi dkk., 2011). Dalam menentukan sektor basis yang memiliki keunggulan kompetitif suatu wilayah jika terdapat pada kuadran satu, dimana kuadran satu differential shift positif dan proportional shift positif yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik (Chen dan Xu, 2007). Kemudian setelah diketahui terkait dengan wilayah basis yang memiliki keunggulan komparatif dan wilayah basis yang memiliki keunggulan komparatif dilanjutkan pada analisis model rasio pertumbuhan (MRP). Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) berfungsi untuk menganalisis deskripsi kegiatan ekonomi sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan potensi ekonomi wilayah. Dikatakan kegiatan industri ke  $i$  pada tingkat Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang menonjol dan pada tingkat Kecamatan juga mengalami pertumbuhan yang menonjol, kegiatan industri ini disebut dominan pertumbuhan apabila rasio pertumbuhan referensi ( $RP_R$ ) positif (+) dan rasio pertumbuhan studi ( $RP_S$ ) positif (+).

Setelah melakukan identifikasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan secara komparatif dan kompetitif dilakukan identifikasi strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang efektif diperlukan untuk dapat mencapai tujuan dari industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Salah satu caranya adalah dengan mencari strategi pengembangan yang tepat. Dalam merencanakan strategi pengembangan perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam

penyusunan strategi. Hal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan dalam penyusunan strategi pengembangan sesuai dengan kondisi serta keadaan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan strategi untuk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari (a) sumberdaya manusia, (b) pemasaran, (c) produksi atau operasi, (d) keuangan, (e) penelitian dan pengembangan, dan (f) sistem informasi manajemen (David, 2004). Kemudian untuk lingkungan eksternal terdiri dari (a) politik, (b) ekonomi, (c) sosial, (d) teknologi, dan (e) lingkungan industri. Lingkungan industri terdiri dari (1) persaingan sesama pesaing dalam industri yang sama, (2) ancaman masuknya pendatang baru, (3) ancaman barang substitusi, (4) daya tawar pembeli/ konsumen, (5) dan daya tawar penyedia input (pemasok) (Kuncoro, 2006). Untuk menentukan strategi yang tepat serta efektif tentang pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP). *Analytical hierarchy process* (AHP) berfungsi untuk mempermudah dalam menentukan strategi pengembangan yang telah dirumuskan struktur hirarki sebelumnya serta diperbaiki sesuai dengan masukan narasumber kunci atau utama (*key informan*). Metode *analytical hierarchy process* (AHP) ini membandingkan tingkat kepentingan atau prioritas antara faktor pertimbangan utama, sub-faktor pertimbangan utama serta alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Adapun kerangka pemikiran penelitian yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

### 2.15 Hipotesis

1. Kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial di beberapa wilayah tertentu;
2. Kegiatan Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
3. Strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing, meningkatkan serta mengembangkan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, meningkatkan serta mengembangkan produk agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar, mengembangkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar, mengembangkan daya saing industri dan kontinueitas penyediaan input agar dapat bersaing, dan mengembangkan teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012) bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan tentang konsentrasi spasial serta strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan.

#### **3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo pada tahun 2017. Pemilihan Kabupaten Situbondo sebagai tempat penelitian disebabkan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan memiliki potensi serta keunggulan yang menjadi spesialisasi perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Jadi

populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, namun meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek yang diteliti. Berdasarkan pada penjelasan Sugiyono (2012) tentang populasi, populasi penelitian ini adalah industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya disebabkan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (memakili) (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan narasumber kunci atau utama (*key informan*). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang disengaja atau berdasarkan pada kriteria-kriteria serta pertimbangan tertentu, narasumber kunci atau utama (*key informan*) merupakan orang yang dianggap peneliti mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber kunci atau utama (*key informan*) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Bidang Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo yaitu komisi dua bidang ekonomi.
6. Pengusaha industri kecil berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti sedangkan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012).

Data sekunder digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama dan kedua. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

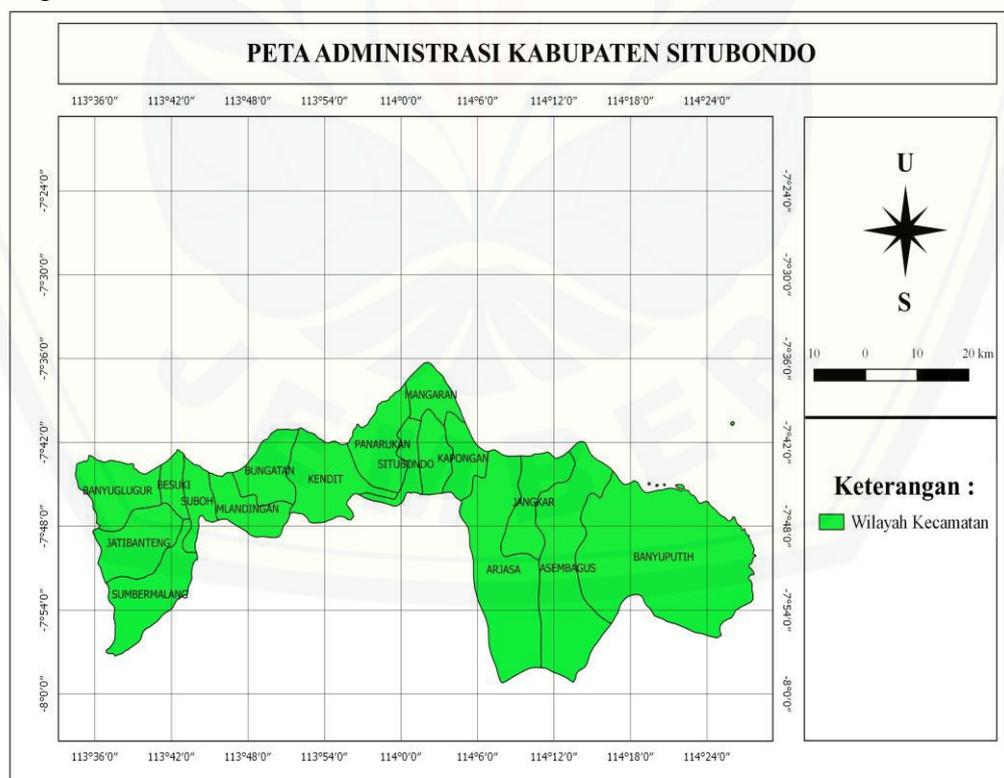
1. Data potensi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan yaitu (a) data nilai produksi, (b) data jumlah tenaga kerja, (c) data nilai investasi. Data diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
2. Peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan wilayah di NKRI. Peta yang digunakan adalah peta batas administrasi. Peta diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) atau Badan Informasi Geospasial (BIG).

Data primer yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga. Data primer adalah data preferensi narasumber kunci atau utama (*key informan*). Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui pendapat narasumber kunci atau utama (*key informan*) terkait dengan strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Narasumber kunci atau utama (*key informan*) yang dimaksud adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal ini komisi dua bidang ekonomi dan pelaku usaha atau pengusaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan.

### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Sistem Informasi Geografis/ *Geographic Information System* (GIS)

Sistem informasi geografis digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial. Analisis data spasial dalam sistem informasi geografis berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain peta administrasi Kabupaten Situbondo sampai pada tahapan hasil atau keluaran (*output*) yang menghasilkan suatu informasi baru. Data yang digunakan untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Adapun tahapan atau prosedur dalam penelitian ini yaitu : (1) desain peta administrasi Kabupaten Situbondo, (2) input data spasial dan atribut, (3) analisis data dan penyajian hasil analisis, (4) serta pengambilan keputusan. Adapun Gambar 3.1 peta administrasi Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Situbondo

Hasil analisis *Geographic Information System* (GIS) tersebut diinterpretasikan sebagai berikut yaitu:

- a) Jika wilayah yang tinggi  $> 1$ , menunjukkan kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar di beberapa wilayah tertentu yang memiliki penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi;
- b) Jika wilayah yang tinggi  $= 1$ , menunjukkan kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung mengumpul di beberapa wilayah tertentu yang memiliki penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi;
- c) Jika wilayah yang tinggi  $< 1$ , menunjukkan kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung tidak ada di beberapa wilayah tertentu yang memiliki penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi.

Berdasarkan pada hasil analisis *Geographic Information System* (GIS) yang berfungsi untuk mengetahui peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan yang terkonsentrasi secara spasial dengan kategori tinggi pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi merupakan wilayah berpotensi untuk dikembangkan, oleh sebab itu terdapat empat kriteria yaitu sebagai berikut:

- a) Wilayah kecamatan dikatakan potensi apabila lolos dari tiga indikator;
- b) Wilayah kecamatan dikatakan cukup potensi apabila lolos dari dua indikator;
- c) Wilayah kecamatan dikatakan kurang potensi apabila lolos dari satu indikator;
- d) Wilayah kecamatan dikatakan tidak potensi apabila tidak lolos dari tiga indikator.

### 3.4.2 Analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis* (SSA) dan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA) dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

Analisis *location quotient* (LQ) dalam penelitian ini dilakukan terhadap nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang bersumber dari data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Data nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus analisis *location quotient* (LQ) (Rustiadi dkk., 2011) yaitu sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_j/X}$$

Dimana :

- $X_{ij}$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan ke- $i$  di kecamatan  $j$  (Rp)
- $X_i$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di kecamatan  $j$  (Rp)
- $X_j$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan ke- $i$  di Kabupaten Situbondo (Rp)
- $X$  : total nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo (Rp)

Hasil analisis *location quotient* (LQ) tersebut diinterpretasikan sebagai berikut yaitu:

- a) Jika nilai  $LQ_{ij} > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan total kabupaten, atau terjadi pemusatan

aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya;

- b) Jika nilai  $LQ_{ij} = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten;
- c) Jika nilai  $LQ_{ij} < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten.

*Shift share analysis* (SSA) dalam penelitian ini dilakukan terhadap nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang bersumber dari data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Data nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus *shift share analysis* (SSA) (Tarigan, 2005) yaitu sebagai berikut:

1. Peranan *national share* ( $N_{si}$ ) adalah seandainya pertambahan jumlah tenaga kerja regional sektor  $i$  tersebut sama dengan proporsi pertambahan jumlah tenaga kerja nasional secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Ns_{i,t} = Tk_{r,i,t-n} (Tk_{N,t} / Tk_{N,t-n}) - Tk_{r,i,t-n}$$

Dimana :

$Ns$  : Kabupaten Situbondo

$Tk$  : Jumlah tenaga kerja

$r$  : Kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo

$i$  : Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

$t$  : Tahun

$t-n$  : Tahun awal

2. *Proportional shift* ( $P_{r,i}$ ) adalah melihat pengaruh sektor  $i$  secara nasional terhadap pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor  $i$  pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$P_{r,i,t} = \left[ \frac{\Delta Tk_{N,i,t}}{Tk_{N,i,t-n}} - \frac{\Delta Tk_{N,t}}{Tk_{N,t-n}} \right] Tk_{r,i,t-n}$$

Dimana :

$P$  : *Proportional shift*

$Tk$  : Jumlah tenaga kerja

$N$  : Kabupaten Situbondo

$r$  : Kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo

$i$  : Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

$t$  : Tahun

$t-n$  : Tahun awal

3. *Differential shift* ( $D_{r,i}$ ) menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor  $i$  di wilayah analisis terhadap pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor  $i$  secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$D_{r,i,t} = \left[ \frac{\Delta Tk_{r,i,t}}{Tk_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta Tk_{N,i,t}}{Tk_{N,i,t-n}} \right] Tk_{r,i,t-n}$$

Dimana :

$D$  : *Differential shift*

$Tk$  : Jumlah tenaga kerja

$N$  : Kabupaten Situbondo

$r$  : Kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo

$i$  : Industri kecil berbasis dan menengah pengolahan perikanan

$t$  : Tahun

$t-n$  : Tahun awal

Chen dan Xu (2007) hasil *shift share analysis* (SSA) dibagi kedalam empat kuadran yaitu sebagai berikut :

Kuadran 1 : *differential shift* positif dan *proportional shift* positif, bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kuadran 2 : *differential shift* negatif dan *proportional shift* positif, bermakna struktur industri baik, tetapi lemah dalam tingkat pertumbuhan.

Kuadran 3 : *differential shift* negatif dan *proportional shift* negatif, bermakna kondisi tidak baik, karena kedua komponen baik struktur maupun kompetitif lemah.

Kuadran 4 : *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif, bermakna industri dalam wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) dalam penelitian ini dilakukan terhadap nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang bersumber dari data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Pendekatan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) terdapat dua rasio yaitu (a) rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ ) dan (b) rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ ). Data nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus analisis model rasio pertumbuhan (MRP) (Yusuf, 1999) yaitu sebagai berikut:

1. Rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ )

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah referensi } (RP_R) = \frac{\Delta TK_{iR} / TK_{iR(t)}}{\Delta TK_R / TK_{R(t)}}$$

Keterangan :

$\Delta TK_{iR}$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi

$TK_{iR(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i awal periode di wilayah referensi

$\Delta TK_R$  : perubahan jumlah tenaga kerja di wilayah referensi

$TK_{R(t)}$  : jumlah tenaga kerja pada awal periode di wilayah referensi

Hasil analisis rasio pertumbuhan wilayah referensi ( $RP_R$ ) tersebut diinterpretasikan sebagai berikut yaitu:

- a) Jika nilai  $RP_R > 1$  positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja total wilayah referensi.
- b) Jika nilai  $RP_R < 1$  negatif (-), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i dalam wilayah referensi lebih rendah dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja total wilayah referensi.

## 2. Rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ )

$$\text{Rasio pertumbuhan wilayah studi (} RP_S \text{)} = \frac{\Delta TK_{ij} / TK_{iR(t)}}{\Delta TK_R / TK_{R(t)}}$$

Keterangan :

$\Delta TK_{ij}$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah studi

$TK_{iR(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i awal periode di wilayah studi

$\Delta TK_R$  : perubahan jumlah tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi

$TK_{R(t)}$  : jumlah tenaga kerja kegiatan i pada awal periode di wilayah referensi

Hasil analisis rasio pertumbuhan wilayah studi ( $RP_S$ ) tersebut diinterpretasikan sebagai berikut yaitu :

- a) Jika nilai  $RP_S > 1$  positif (+), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i wilayah referensi.
- b) Jika nilai  $RP_S < 1$  negatif (-), artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i tingkat wilayah studi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada kegiatan i wilayah referensi.

Hasil dari analisis model rasio pertumbuhan (MRP) ini dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut :

Klasifikasi 1 : nilai  $RP_R (+)$  dan  $RP_S (+)$  berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian

pula pada tingkat kecamatan. Kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan.

Klasifikasi 2 : nilai  $RP_R$  (+) dan  $RP_S$  (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol.

Klasifikasi 3 : nilai  $RP_R$  (-) dan  $RP_S$  (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol.

Klasifikasi 4 : nilai  $RP_R$  (-) dan  $RP_S$  (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Berdasarkan pada hasil analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA) dan model rasio pertumbuhan (MRP) yang berfungsi untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo, dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan, oleh sebab itu terdapat empat kriteria yaitu sebagai berikut :

- a) Wilayah kecamatan dikatakan prioritas apabila lolos dari tiga analisis;
- b) Wilayah kecamatan dikatakan cukup prioritas apabila lolos dari dua analisis;
- c) Wilayah kecamatan dikatakan kurang prioritas apabila lolos dari satu analisis;
- d) Wilayah kecamatan dikatakan tidak prioritas apabila tidak lolos dari tiga analisis.

### 3.4.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

*Analytical hierarchy process* (AHP) digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yaitu menganalisis strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Urutan *analytical hierarchy process* (AHP) dalam penelitian ini dibagi atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut :

Tahap 1 (satu) yaitu : menyusun struktur atau tingkat hirarki yang akan mencerminkan tingkat analisisnya. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak pengusaha dan pihak pemerintah daerah. Kemudian setelah itu melakukan pemilihan terhadap strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang telah dirumuskan sebelumnya serta diperbaiki sesuai dengan masukan dari narasumber kunci atau utama (*key informan*). Ada empat tingkat hirarki yang dianalisis. Tingkat ke-1 merupakan tujuan atau fokus (*goal*) yang diinginkan dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Tingkat ke-2 adalah faktor pertimbangan utama dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu pasar, manajemen, produk, ekonomi dan sosial, lingkungan industri serta teknologi. Tingkat ke-3 adalah sub-faktor pertimbangan utama yang mempengaruhi pengembangan dari faktor pertimbangan utama, sedangkan tingkat ke-4 adalah alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 struktur hirarki strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan.

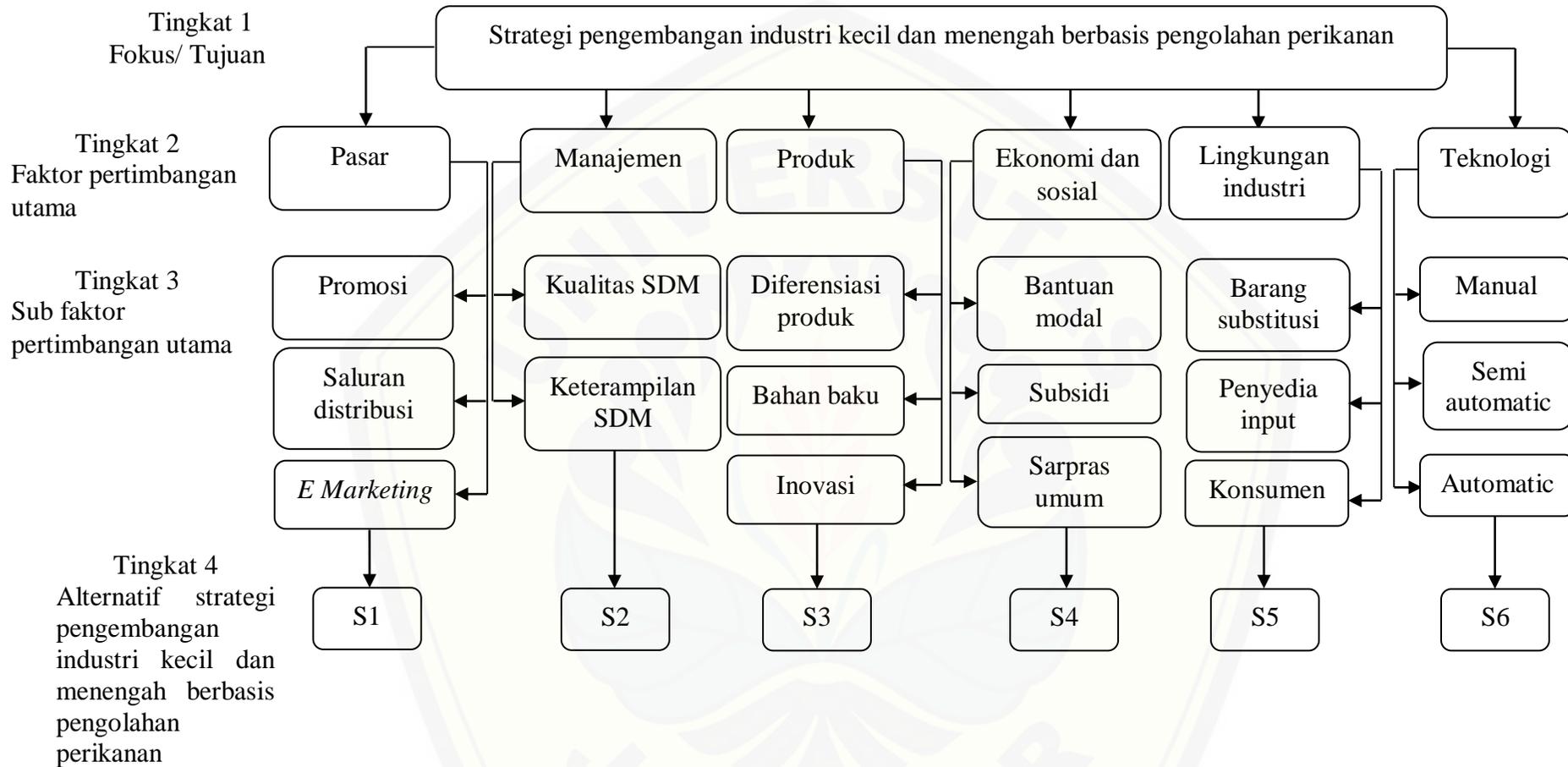
Tahap 2 (dua) yaitu melakukan perbandingan berpasangan dari unsur pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Terdapat langkah-langkah pada tahap ini yaitu :

1. Pada setiap tingkat hirarki dan setiap unsur keputusan dilakukan perbandingan berpasangan. Setiap unsur dibandingkan nilai relatif pentingnya dengan yang lain atas kontribusinya pada masing-masing tingkat hirarkinya.
2. Kemudian menambahkan nilai dalam kolom matriks perbandingan berpasangan, selanjutnya membagi setiap unsur dalam matriks perbandingan berpasangan dengan jumlah kolom tersebut dan terakhir menghitung rata-rata

unsur disetiap baris dari matriks standar dengan membagi jumlah nilai standar untuk setiap baris dengan jumlah kriteria.

3. Menentukan rasio konsistensi (*Consistency Ratio* atau CR) dari matriks perbandingan berpasangan. CR adalah ukuran berapa banyak perbedaan yang dapat diterima dan harus kurang dari atau sama dengan 0,1. Jika rasio konsistensi lebih besar dari 10%, matriks perbandingan berpasangan harus dihitung ulang.
4. Perhitungan indeks konsistensi (*Consistency Ratio* CI) didasarkan pada pengamatan bahwa  $\lambda$  adalah selalu lebih besar dari atau setara dengan sejumlah kriteria atau paramete r (n) di bawah pertimbangan untuk matriks timbal balik dan  $\lambda = n$  jika matriks perbandingan berpasangan terdiri matriks. Akibatnya,  $\lambda - n$  dianggap sebagai ukuran derajat dari inkonsistensi.

Tahap 3 (tiga) yaitu membuat peringkat prioritas secara keseluruhan. Pada tahap ini bobot komposit dibuat. Bobot komposit diperoleh dengan mengalihkan bobot relatif matriks pada setiap tingkat hirarki. Bobot komposit menunjukkan peringkat alternatif sehubungan dengan tujuan secara keseluruhan dan juga merupakan alternatif skor dari keputusan yang diambil.



Gambar 3.2 Struktur Hirarki Strategi Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan

Keterangan :

Tingkat 1 : fokus/ tujuan yaitu strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

Tingkat 2 : faktor pertimbangan utama strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

- 1) Pasar industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan
- 2) Manajemen industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan
- 3) Produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan
- 4) Ekonomi dan sosial industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan
- 5) Lingkungan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan
- 6) Teknologi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

Tingkat 3 : sub faktor pertimbangan utama strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

- 1) Promosi, saluran distribusi dan *E Marketing*;
- 2) Kualitas SDM dan keterampilan SDM;
- 3) Differensiasi produk, bahan baku dan inovasi;
- 4) Bantuan modal, subsidi dan sarpras umum;
- 5) Barang substitusi, penyedia input dan konsumen;
- 6) Manual, semi automatic dan automatic.

Tingkat 4 : alternatif-alternatif strategi pengembangan yaitu:

- 1) Meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing;
- 2) Meningkatkan serta mengembangkan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan serta mengembangkan produk agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar;
- 4) Mengembangkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar;
- 5) Mengembangkan daya saing industri dan kontinueitas penyediaan input;
- 6) Mengembangkan teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan adalah klasifikasi industri yang terdapat pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dimana industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu terdiri dari industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya.

2. Nilai produksi

Nilai produksi merupakan variabel yang digunakan dalam menentukan potensi, keunggulan sektor serta wilayah prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Satuan yang digunakan yaitu rupiah.

3. Jumlah tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja merupakan variabel yang digunakan dalam menentukan potensi, keunggulan sektor serta wilayah prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Satuan yang digunakan yaitu orang.

4. Nilai investasi

Nilai investasi merupakan variabel yang digunakan dalam menentukan potensi, keunggulan sektor serta wilayah prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Satuan yang digunakan yaitu rupiah.

5. Sistem Informasi Geografis

Sistem informasi geografis adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menjawab permasalahan tentang keruangan (spasial). Data yang digunakan dalam menjawab permasalahan tentang keruangan (spasial) industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tahun 2017.

#### 6. Wilayah berpotensi

Wilayah berpotensi adalah wilayah yang telah dianalisis dengan menggunakan metode alat analisis sistem informasi geografis berdasarkan pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tahun 2017. Wilayah dikatakan potensi apabila lolos dari tiga indikator.

#### 7. Keunggulan komparatif

Keunggulan komparatif adalah suatu industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten mengalami pemusatan aktifitas di Kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lain  $LQ_{ij} > 1$ .

#### 8. Keunggulan kompetitif

Keunggulan kompetitif adalah suatu industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten mengalami *differential shift* positif dan *proportional shift* positif, bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik, serta memiliki nilai  $RP_R (+)$  dan  $RP_S (+)$  bermakna kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan kecamatan mempunyai pertumbuhan yang menonjol atau merupakan wilayah dominan pertumbuhan.

#### 9. Wilayah prioritas

Wilayah prioritas adalah wilayah yang telah dianalisis dengan menggunakan metode alat analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA) dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) berdasarkan pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Wilayah dikatakan prioritas apabila lolos dari tiga analisis.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan daerah wisata pantai pasir putih yang letaknya berada diujung timur pulau Jawa bagian utara dengan posisi di antara  $7^{\circ} 35'$  -  $7^{\circ} 44'$  lintang selatan dan  $113^{\circ} 30'$  -  $114^{\circ} 42'$  bujur timur. Luas Kabupaten Situbondo yaitu 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, berbentuk memanjang dari barat ke timur lebih kurang 150 km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan disebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 km. Luas wilayah menurut kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih yaitu 461,67 km<sup>2</sup> disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian utara, sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km<sup>2</sup>. Letak Kabupaten Situbondo disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo (BPS Kab. Situbondo, 2016).

#### 4.1.2 Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, desa. Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, 4 (empat) kelurahan, dan 132 (seratus tiga puluh dua) desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Panji yaitu 12 (dua belas) desa dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit berada di Kecamatan Banyuputih yaitu hanya 5 (lima) desa. Letak atau posisi kelurahan di Kabupaten Situbondo berada di Kecamatan Panji yaitu Kelurahan Mimbaan dan Ardirejo, sedangkan di Kecamatan Situbondo yaitu Kelurahan Patokan dan Kelurahan Dawuhan (BPS Kab. Situbondo, 2016).

#### **4.1.3 Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Hasil proyeksi penduduk 2015, penduduk Kabupaten Situbondo berjumlah 669.713 jiwa terdiri dari 326.500 jiwa laki-laki dan 343.213 jiwa perempuan sehingga memiliki angka rasio sex sebesar 0.95 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Penduduk tahun 2014 berjumlah 666.013 jiwa dalam hal ini berarti bertambah 317 jiwa di tahun 2015. Kepadatan penduduk di Kabupaten Situbondo tahun 2015 mencapai 408.74 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Besuki dengan kepadatan sebesar 2.428,89 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Banyuputih sebesar 120,57 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Kab. Situbondo, 2016).

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Situbondo yang termasuk angkatan kerja sejumlah 364.834 jiwa terdiri dari penduduk yang bekerja sejumlah 351.821 jiwa dan pengangguran terbuka sejumlah 13.013 jiwa, sedangkan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bukan angkatan kerja sejumlah 164.656 jiwa, terdiri dari penduduk yang sekolah sejumlah 36.573 jiwa, mengurus rumah tangga sejumlah 115.783 jiwa dan lainnya sejumlah 12.300 jiwa (BPS Kab. Situbondo, 2016).

#### **4.1.4 Kondisi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo**

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terbagi 4 (empat) jenis menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri kecil dan menengah ini merupakan salah satu penyumbang atau memberikan kontribusi terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Situbondo sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah mengklasifikasikan industri menurut nilai

investasi dan jumlah tenaga kerja, pelaku usaha dibidang industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan rata-rata memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah tenaga kerja antara 5 (lima) sampai 19 (sembilan belas) orang sehingga tergolong pada industri kecil. Pelaku usaha dibidang industri pembekuan biota air lainnya memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan jumlah tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang sehingga tergolong pada industri menengah.

Industri pemindangan ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pemindangan dengan menggunakan bahan baku ikan laut serta menghasilkan produk berupa pindang ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses penggaraman atau pengeringan dengan menggunakan bahan baku ikan laut serta menghasilkan produk berupa ikan asin, ikan kering, ikan teri kering dan teri nasi. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan merupakan usaha pengolahan dan pengawetan ikan bersirip dengan cara selain yang tercakup dalam proses penggaraman atau pengeringan dan pemindangan dengan menggunakan bahan baku ikan laut serta menghasilkan produk berupa dendeng ikan, kerupuk ikan, keripik ikan, teri crispy, petis ikan, bakso ikan, terasi dan abon ikan. Industri pembekuan biota air lainnya merupakan usaha pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan dengan menggunakan bahan baku udang serta menghasilkan produk berupa pembekuan udang. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dari tahun 2013-2017 pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Adapun Tabel 4.1 nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan pada tingkat Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Pemindangan ikan	3.361	3.467	4.023	4.120	4.178
Penggaraman atau pengeringan ikan	6.905	7.020	7.143	7.297	7.383
Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	6.679	7.204	7.796	8.153	8.550
Pembekuan biota air lainnya	2.019	2.019	2.157	2.500	2.952
Jumlah	18.964	19.710	21.119	22.070	23.063
Rata-rata	2.880	2.821	2.892	3.144	3.527

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Keterangan:

\* : angka sampai dengan bulan juni 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai produksi industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan oleh tumbuhnya pelaku usaha atau perusahaan baru sehingga mempengaruhi nilai produksi. Adapun Tabel 4.2 pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017

Jenis Industri Kecil dan Menengah	Pelaku Usaha				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Pemindangan ikan	27	31	34	38	41
Penggaraman atau pengeringan ikan	11	12	14	17	20
Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	61	68	73	77	82
Pembekuan Biota Air Lainnya	1	1	1	1	1
Jumlah	100	112	122	133	144

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Keterangan:

\* : angka sampai dengan bulan juni 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah pelaku usaha industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, sedangkan industri pembekuan biota air lainnya selama 5 tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan atau tetap. Industri pemindangan ikan rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan sebesar 11,04%, industri penggaraman atau pengeringan ikan rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan sebesar 16,21%, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan sebesar 7,70% serta industri pembekuan biota air lainnya rata-rata tiap tahun tidak mengalami peningkatan atau tetap.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan merupakan industri yang mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan merupakan industri yang mengalami peningkatan terendah dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pemindangan ikan. Adapun Tabel 4.3 jumlah tenaga kerja industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan pada tingkat Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017

Jenis Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Pemindangan ikan	274	301	326	350	369
Penggaraman atau pengeringan ikan	268	276	285	302	313
Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	304	335	366	383	405
Pembekuan biota air lainnya	52	52	60	60	65
Jumlah	898	964	1.037	1.095	1.152
Rata-rata	91	90	95	92	95

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Keterangan:

\* : angka sampai dengan bulan juni 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan oleh tumbuhnya skala usaha dan pelaku usaha atau perusahaan baru sehingga mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun Tabel 4.4 nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan pada tingkat Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Jenis Industri Kecil dan Menengah	Nilai Investasi				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Pemindangan ikan	2.376	2.450	2.843	2.909	2.949
Penggaraman atau pengeringan ikan	4.141	4.191	4.241	4.304	4.339
Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	1.989	2.144	2.286	2.466	2.653
Pembekuan biota air lainnya	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jumlah	10.506	10.785	11.370	11.679	11.941
Rata-rata	2.497	2.460	2.418	2.362	2.321

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Keterangan:

\* : angka sampai dengan bulan juni 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, sedangkan industri pembekuan biota air lainnya selama 5 tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan atau tetap. Kondisi ini disebabkan oleh tumbuhnya pelaku usaha atau perusahaan baru sehingga mempengaruhi terhadap nilai investasi.

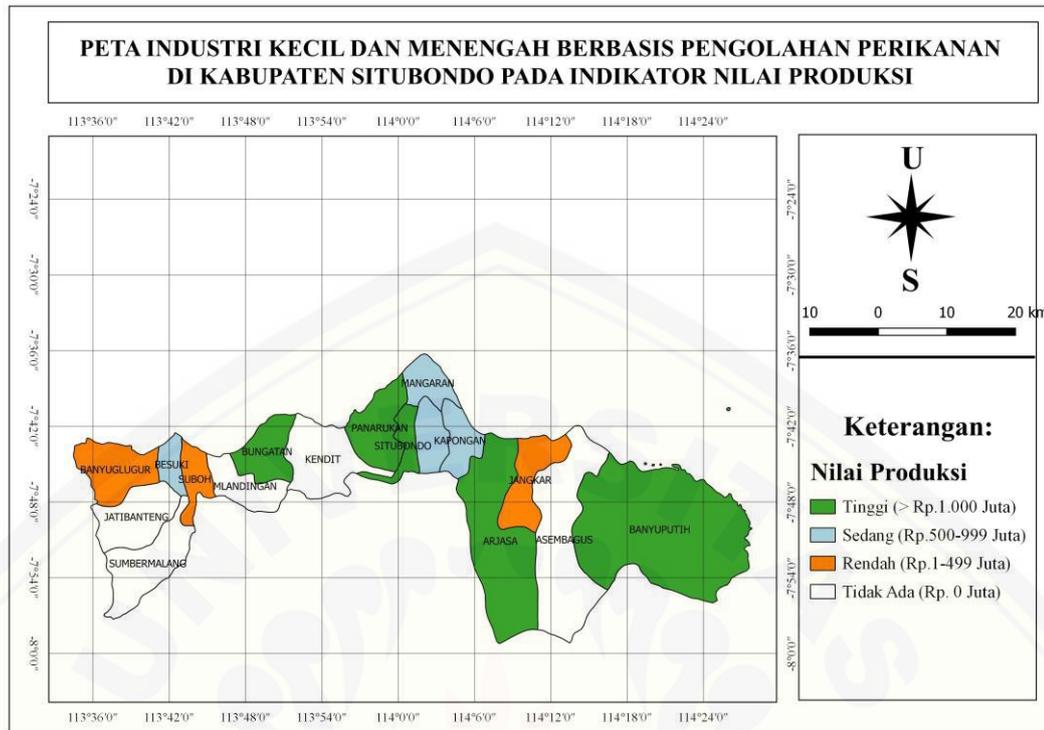
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo melakukan pendataan terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah agar mengetahui serta memperoleh data nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi

dengan menggunakan metode wawancara serta penyebaran formulir pendataan industri kecil dan menengah oleh tenaga penyuluh lapangan industri. Adapun Tabel nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2013-2017 yaitu terdapat pada lampiran.

## **4.2. Hasil dan Pembahasan**

### **4.2.1 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terkonsentrasi Secara Spasial**

Sistem informasi geografi merupakan metode analisis untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keruangan. Tahapan dalam menggunakan metode analisis sistem informasi geografi yaitu (1) mendesain peta administrasi Kabupaten Situbondo, (2) input data spasial dan data atribut, data spasial diperoleh dari Bakosurtanal sedangkan data atribut diperoleh dari data industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan tahun 2017 pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, (3) analisis data serta penyajian hasil analisis berupa peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan (4) pengambilan keputusan. Adapun hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.1 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai produksi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Nilai Produksi

Berdasarkan pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai produksi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi menyebar di wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo. Wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo memiliki nilai produksi lebih dari Rp. 1.000 juta.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang sedang menyebar di wilayah Kecamatan Besuki, Kapongan, Mangaran dan Panji. Wilayah Kecamatan Besuki, Kapongan, Mangaran dan Panji memiliki nilai produksi Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 999 juta.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang rendah menyebar di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Jangkar dan Suboh. Wilayah Kecamatan Banyuglugur, Jangkar dan Suboh memiliki nilai produksi Rp. 1 juta sampai dengan 499 juta, sedangkan di wilayah Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan

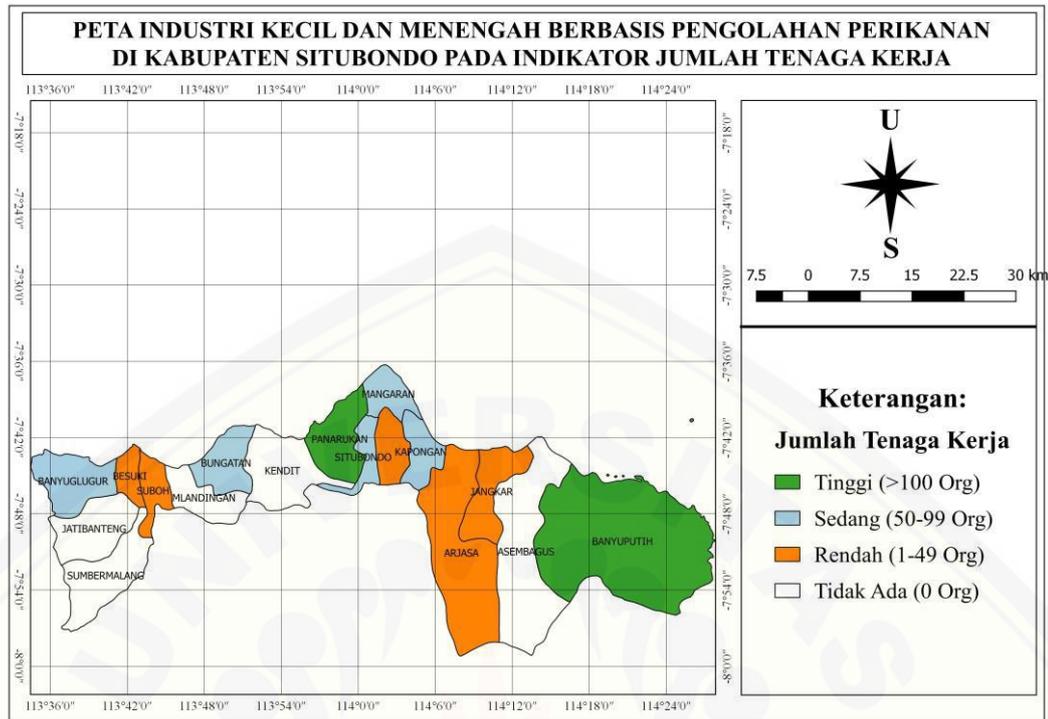
dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Kategori tinggi, rendah, sedang dan tidak ada diperoleh dari pengklasifikasian nilai produksi, dikatakan tinggi yaitu lebih dari Rp. 1.000 juta, sedang yaitu Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 999 juta, rendah yaitu Rp. 1 juta sampai dengan 499 juta dan tidak ada yaitu Rp. 0 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai produksi yang tinggi yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuputih memiliki nilai produksi sebesar Rp. 1.954 juta. Industri penggaraman atau pengeringan ikan terletak di Kecamatan Arjasa dan Bungatan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Arjasa memiliki nilai produksi sebesar Rp. 7.383 juta, sedangkan industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Bungatan memiliki nilai produksi sebesar Rp. 5.168 juta. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terletak di Kecamatan Panarukan dan Situbondo. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Panarukan memiliki nilai produksi sebesar Rp. 4.124 juta, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Situbondo memiliki nilai produksi sebesar Rp. 1.504 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai produksi yang sedang yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Besuki memiliki nilai produksi sebesar Rp. 894 juta. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Mangaran memiliki nilai produksi sebesar Rp. 549 juta. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terletak di Kecamatan Kapongan dan Panji. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Kapongan memiliki nilai produksi sebesar Rp. 730 juta, sedangkan

industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Panji memiliki nilai produksi sebesar Rp. 777 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai produksi yang rendah yaitu industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuglugur memiliki nilai produksi sebesar Rp. 435 juta. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terletak di Kecamatan Jangkar dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Jangkar memiliki nilai produksi sebesar Rp. 130 juta, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Suboh memiliki nilai produksi sebesar Rp. 273 juta. Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Adapun hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.2 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator jumlah tenaga kerja tahun 2017 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi menyebar di wilayah Kecamatan Banyuwutih dan Panarukan. Wilayah Kecamatan Banyuwutih dan Panarukan memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang sedang menyebar di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kapongan, Mangaran dan Situbondo. Wilayah Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kapongan, Mangaran dan Situbondo memiliki jumlah tenaga kerja 50 orang sampai dengan 99 orang.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang rendah menyebar di wilayah Kecamatan Arjasa, Besuki, Jangkar, Panji dan Suboh. Wilayah Kecamatan Arjasa, Besuki, Jangkar, Panji dan Suboh memiliki jumlah tenaga kerja 1 orang sampai dengan 49 orang, sedangkan di wilayah Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada

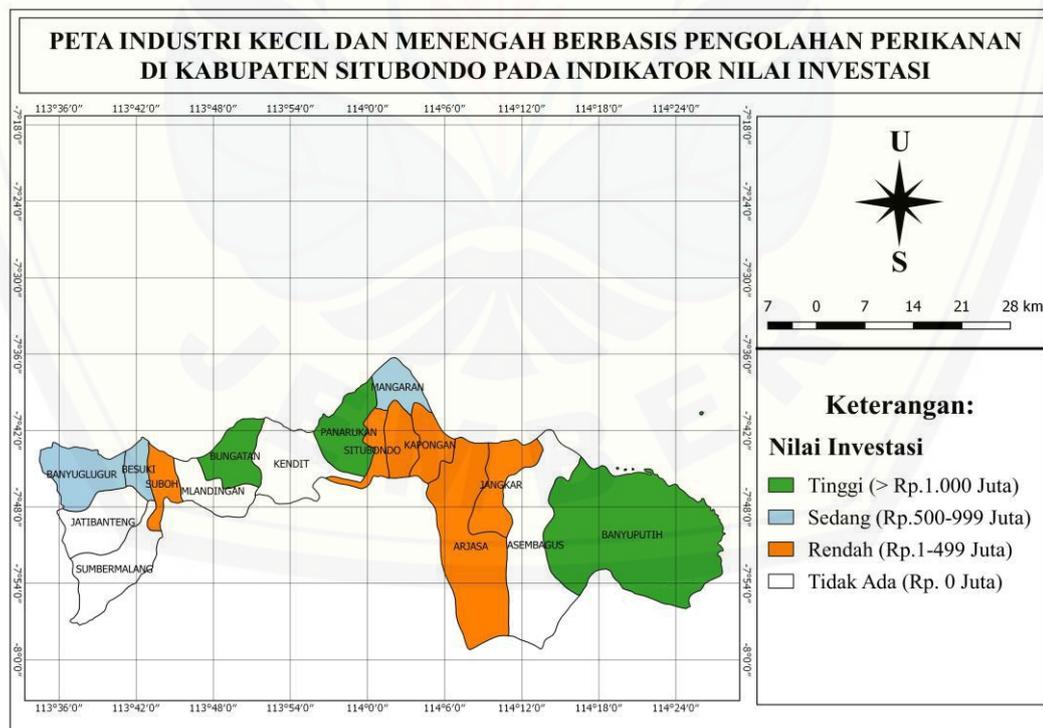
kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Kategori tinggi, rendah, sedang dan tidak ada diperoleh dari pengklasifikasian jumlah tenaga kerja, dikatakan tinggi yaitu lebih dari 100 orang, sedang yaitu 50 orang sampai dengan 99 orang, rendah yaitu 1 orang sampai dengan 49 orang dan tidak ada yaitu 0 orang.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang tinggi yaitu industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuputih memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 188 orang. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Panarukan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 173 orang.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang sedang yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Kapongan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 70 orang. Industri penggaraman atau pengeringan ikan terletak di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuglugur memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 61 orang, sedangkan industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Bungatan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 94 orang, sedangkan industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan mangaran memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 77 orang. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Situbondo memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 57 orang.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang rendah yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Besuki memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 45

orang. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Arjasa memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 18 orang. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terletak di Kecamatan Jangkar, Panji dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang tertelak di Kecamatan Jangkar memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Panji memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 39 orang, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Suboh memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang. Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Adapun hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.3 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai investasi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.3 Peta Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Pada Indikator Nilai Investasi

Berdasarkan pada Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi menyebar di wilayah Kecamatan Banyuputih, Bungatan dan Panarukan. Wilayah Kecamatan Banyuputih, Bungatan dan Panarukan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 1.000 juta.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang sedang menyebar di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Besuki dan Mangaran. Wilayah Kecamatan Banyuglugur, Besuki dan Mangaran memiliki nilai investasi Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 999 juta.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang rendah menyebar di wilayah Kecamatan Arjasa, Jangkar, Kapongan, Panji, Situbondo dan Suboh. Wilayah Kecamatan Arjasa, Jangkar, Kapongan, Panji, Situbondo dan Suboh memiliki nilai investasi Rp. 1 juta sampai dengan 499 juta, sedangkan di wilayah Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Kategori tinggi, rendah, sedang dan tidak ada diperoleh dari pengklasifikasian nilai investasi, dikatakan tinggi yaitu lebih dari Rp. 1.000 juta, sedang yaitu Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 999 juta, rendah yaitu Rp. 1 juta sampai dengan 499 juta dan tidak ada yaitu Rp. 0 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai investasi yang tinggi yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuputih memiliki nilai investasi sebesar Rp. 1.382 juta. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Bungatan memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.394 juta. Industri pembekuan biota air lainnya yang terletak di Kecamatan Panarukan memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.000 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai investasi yang sedang yaitu industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Besuki memiliki nilai investasi sebesar Rp. 626 juta. Industri penggaraman atau pengeringan ikan terletak di Kecamatan Banyuglugur dan Mangaran. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Banyuglugur memiliki nilai investasi sebesar Rp. 545 juta, sedangkan industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Mangaran memiliki nilai investasi sebesar Rp. 576 juta.

Wilayah kecamatan dengan tingkat konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan berdasarkan pada nilai investasi yang rendah yaitu industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan terletak di Kecamatan Kapongan dan Panji. Industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Kapongan memiliki nilai investasi sebesar Rp. 421 juta, sedangkan industri pemindangan ikan yang terletak di Kecamatan Panji memiliki nilai investasi sebesar Rp. 358 juta. Industri penggaraman atau pengeringan ikan yang terletak di Kecamatan Arjasa memiliki nilai investasi sebesar Rp. 80 juta. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terletak di Kecamatan Jangkar, Situbondo dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang tertelak di Kecamatan Jangkar memiliki nilai investasi sebesar Rp. 45 juta, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Situbondo memiliki nilai investasi sebesar Rp. 395 juta, sedangkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan yang terletak di Kecamatan Suboh memiliki nilai investasi sebesar Rp. 92 juta. Kecamatan Asembagus, Jatibanteng, Kendit, Mlandingan dan Sumbermalang merupakan wilayah yang tidak ada kegiatan usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Terjadinya konsentrasi spasial di beberapa wilayah disebabkan oleh biaya transportasi untuk memperoleh bahan

baku serta memasarkan produk. Adapun Tabel 4.5 biaya transportasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

#### 4.5 Biaya Transportasi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Perikanan di Kabupaten Situbondo

Kecamatan	Tujuan Pasar	Jarak (Km)	Biaya Transportasi (Rp)
Arjasa	Arjasa	1	252.500
Arjasa	Banyuputih	65	412.500
Arjasa	Bungatan	57	392.500
Arjasa	Panarukan	33,1	332.750
Arjasa	Situbondo	26,5	316.250
Banyuglugur	Arjasa	80,3	450.750
Banyuglugur	Banyuputih	116	540.000
Banyuglugur	Bungatan	27,9	319.750
Banyuglugur	Panarukan	48,2	370.500
Banyuglugur	Situbondo	51,7	379.250
Banyuputih	Arjasa	64,9	412.250
Banyuputih	Banyuputih	1	252.500
Banyuputih	Bungatan	94,1	485.250
Banyuputih	Panarukan	72,4	431.000
Banyuputih	Situbondo	65,8	414.500
Besuki	Arjasa	69,1	422.750
Besuki	Banyuputih	105	512.500
Besuki	Bungatan	16,7	291.750
Besuki	Panarukan	37	342.500
Besuki	Situbondo	40,5	351.250
Bungatan	Arjasa	57,1	392.750
Bungatan	Banyuputih	93,1	482.750
Bungatan	Bungatan	1	252.500
Bungatan	Panarukan	25	312.500

Kecamatan	Tujuan Pasar	Jarak (Km)	Biaya Transportasi (Rp)
Bungatan	Situbondo	28,4	321.000
Jangkar	Arjasa	15,9	289.750
Jangkar	Banyuputih	50,4	376.000
Jangkar	Bungatan	57,1	392.750
Jangkar	Panarukan	35,4	338.500
Jangkar	Situbondo	28,7	321.750
Kapongan	Arjasa	20,4	301.000
Kapongan	Banyuputih	55,4	388.500
Kapongan	Bungatan	40,2	350.500
Kapongan	Panarukan	18,5	296.250
Kapongan	Situbondo	11,9	279.750
Mangaran	Arjasa	33	332.500
Mangaran	Banyuputih	67,3	418.250
Mangaran	Bungatan	38,9	347.250
Mangaran	Panarukan	15,2	288.000
Mangaran	Situbondo	10,5	276.250
Panarukan	Arjasa	35,6	339.000
Panarukan	Banyuputih	71,7	429.250
Panarukan	Bungatan	25	312.500
Panarukan	Panarukan	1	252.500
Panarukan	Situbondo	7	267.500
Panji	Arjasa	23,3	308.250
Panji	Banyuputih	62,7	406.750
Panji	Bungatan	33,3	333.250
Panji	Panarukan	11,6	279.000
Panji	Situbondo	4,9	262.250
Situbondo	Arjasa	28,1	320.250
Situbondo	Banyuputih	64,7	411.750
Situbondo	Bungatan	29,2	323.000
Situbondo	Panarukan	6,6	266.500

Kecamatan	Tujuan Pasar	Jarak (Km)	Biaya Transportasi (Rp)
Situbondo	Situbondo	1	252.500
Suboh	Arjasa	67	417.500
Suboh	Banyuputih	103	507.500
Suboh	Bungatan	14,6	286.500
Suboh	Panarukan	34,9	337.250
Suboh	Situbondo	38,4	346.000

Sumber : Purnoto, 2016 (data diolah)

Berdasarkan pada hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.1 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai produksi dapat diketahui bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar diwilayah Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo. Kecamatan Arjasa dan Bungatan terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan, Kecamatan Panarukan dan Situbondo terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial.

Berdasarkan pada hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.2 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator jumlah tenaga kerja dapat diketahui bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar diwilayah Kecamatan Banyuputih dan Panarukan. Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan dan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Wilayah Kecamatan Banyuputih dan Panarukan merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial.

Berdasarkan pada hasil analisis sistem informasi geografi berupa Gambar 4.3 peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai investasi dapat diketahui bahwa kegiatan industri

kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar di wilayah Kecamatan Banyuputih, Bungatan dan Panarukan. Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan, Kecamatan Bungatan terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan dan Kecamatan Panarukan terdapat industri pembekuan biota air lainnya. Wilayah Kecamatan Banyuputih, Bungatan dan Panarukan merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial. Adapun Tabel 4.6 industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi berdasarkan pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi yaitu sebagai berikut:

4.6 Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terkonsentrasi Secara Spasial yang Tinggi Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan			
	Nilai Produksi	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Keterangan
Arjasa	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang potensi
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	lolos	lolos	lolos	potensi
Besuki	-	-	-	-
Bungatan	lolos	tidak lolos	lolos	cukup potensi
Jangkar	-	-	-	-
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	-	-	-	-
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	-	-	-	-
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	lolos	lolos	potensi
Panji	-	-	-	-
Situbondo	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang potensi
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.6 industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi berdasarkan pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi dapat diketahui bahwa wilayah yang memiliki potensi untuk

dikembangkan yaitu Kecamatan Banyuputih dan Panarukan. Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan, sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Wilayah Kecamatan Bungatan merupakan wilayah yang cukup berpotensi untuk dikembangkan dengan industri yang dimiliki yaitu industri penggaraman atau pengeringan ikan, sedangkan wilayah Kecamatan Arjasa dan Situbondo merupakan wilayah yang kurang berpotensi untuk dikembangkan. Kecamatan Arjasa terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, sedangkan Kecamatan Situbondo terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

#### **4.2.2 Analisis Keunggulan Komparatif serta Kompetitif Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo**

Analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA) dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) merupakan metode analisis yang berfungsi untuk mengetahui wilayah basis yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Perhitungan analisis *location quotient* (LQ), *shift share analysis* (SSA) dan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) dilakukan terhadap industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan data nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan basis apabila memiliki keunggulan secara komparatif dan kompetitif. Analisis *location quotient* (LQ) menjelaskan tentang pangsa aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan pada wilayah kecamatan terhadap pangsa aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan wilayah kabupaten. Nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya;  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah

berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten;  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Adapun Tabel 4.7 hasil perhitungan analisis LQ industri pemindangan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	<b>2,77</b>	<b>2,86</b>	<b>2,58</b>	<b>2,62</b>	<b>2,68</b>
Besuki	<b>2,38</b>	<b>2,35</b>	<b>2,02</b>	<b>2,09</b>	<b>2,17</b>
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,12</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	<b>2,63</b>	<b>2,18</b>	<b>2,01</b>	<b>1,95</b>	<b>1,97</b>
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12
Panji	0,00	0,00	<b>1,16</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai produksi terdapat di 5 (lima) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan, 5 (lima) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan dan Panji. Pada tahun 2017 Kecamatan Banyuputih merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi pertama, Kecamatan Besuki merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi kedua, Kecamatan Kapongan merupakan wilayah basis industri

pemindangan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi ketiga, Kecamatan Panji merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi keempat dan Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi kelima.

Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai produksi industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan

lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar dan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Jangkar dan Panji merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Jangkar dan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan

perikanan kabupaten. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran pada tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Mangaran merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan.

Kecamatan Mangaran selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.8 hasil perhitungan analisis LQ industri penggaraman atau pengeringan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	<b>1,79</b>	<b>1,85</b>	<b>1,91</b>	<b>1,93</b>	<b>1,98</b>
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,90	0,90	<b>1,07</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>
Bungatan	<b>1,95</b>	<b>2,00</b>	<b>2,07</b>	<b>2,09</b>	<b>2,13</b>
Jangkar	0,52	0,54	0,47	0,48	0,34
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,15	0,13	0,13	0,24	0,24
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	<b>1,23</b>	<b>1,31</b>	<b>1,35</b>	<b>1,30</b>	<b>1,63</b>
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai produksi terdapat di 4 (empat) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan, 4 (empat) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan dan Mangaran. Pada tahun 2017 Kecamatan Bungatan merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi pertama, Kecamatan Banyuglugur merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi kedua, Kecamatan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi ketiga dan Kecamatan Besuki merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai produksi tertinggi keempat.

Berdasarkan pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai produksi industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan,

namun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Besuki pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.9 hasil perhitungan analisis LQ industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15
Banyuputih	0,11	0,10	0,18	0,18	0,18
Besuki	0,41	0,45	0,41	0,37	0,36
Bungatan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Jangkar	<b>1,49</b>	<b>1,45</b>	<b>1,19</b>	<b>1,18</b>	<b>1,51</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	<b>1,06</b>	<b>1,28</b>	<b>1,27</b>	<b>1,21</b>	<b>1,18</b>
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,77	0,70	0,68	0,73	0,89
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>1,61</b>	<b>1,57</b>	<b>1,61</b>	<b>1,57</b>	<b>1,51</b>
Panji	1,00	1,00	0,92	0,91	0,90
Situbondo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Suboh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai produksi terdapat di 3 (tiga) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan, 3 (tiga) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan. Pada tahun 2017 Kecamatan Jangkar dan Panarukan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai produksi tertinggi pertama serta Kecamatan Kapongan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai produksi tertinggi kedua.

Berdasarkan pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai produksi industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis

pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Panji selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, dan Mangaran

merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga

mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.10 hasil perhitungan analisis LQ industri pembekuan biota air lainnya disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>3,60</b>	<b>3,69</b>	<b>3,55</b>	<b>3,37</b>	<b>3,13</b>
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator nilai produksi terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan, 1 (satu) kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Panarukan. Pada tahun 2017 Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator nilai produksi tertinggi pertama.

Berdasarkan pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa industri nilai produksi pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan

secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai produksi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai produksi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai produksi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.11 hasil perhitungan analisis LQ industri pemindangan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	<b>2,02</b>	<b>2,04</b>	<b>1,97</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
Besuki	0,88	0,73	0,47	<b>1,21</b>	<b>1,37</b>
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	<b>1,43</b>	<b>1,41</b>	<b>1,13</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	<b>2,08</b>	<b>2,02</b>	<b>2,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,82</b>
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,47	0,46	0,40	0,38	0,34
Panji	0,00	0,00	0,59	0,58	0,58
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pemindangan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja terdapat di 4 (empat) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan, 4 (empat) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar dan Kapongan. Pada tahun 2017 Kecamatan Banyuputih merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi pertama, Kecamatan Kapongan merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi kedua, Kecamatan Besuki merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi ketiga dan Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi keempat.

Berdasarkan pada Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya

konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuputih dan Kapongan merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Banyuputih dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan, namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya.

Kecamatan Besuki pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Jangkar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panji merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran pada tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Mangaran merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan.

Kecamatan Mangaran selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.12 hasil perhitungan analisis LQ industri penggaraman atau pengeringan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	<b>1,99</b>	<b>2,07</b>	<b>2,13</b>	<b>2,12</b>	<b>2,15</b>
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,90	0,79	0,93	<b>1,01</b>	0,93
Bungatan	<b>2,05</b>	<b>2,12</b>	<b>2,19</b>	<b>2,18</b>	<b>2,20</b>
Jangkar	0,78	0,81	0,65	0,65	0,53
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,42	0,22	0,23	0,45	0,46
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	<b>1,73</b>	<b>1,68</b>	<b>1,74</b>	<b>1,68</b>	<b>2,35</b>
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,17	0,18	0,16	0,15	0,23
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja terdapat di 3 (tiga) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan, 3 (tiga) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran. Pada tahun 2017 Kecamatan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi pertama, Kecamatan Bungatan merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi kedua dan Kecamatan Banyuglugur merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi ketiga.

Berdasarkan pada Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan, namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Besuki pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Jangkar selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja

yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.13 hasil perhitungan analisis LQ industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Banyuputih	0,08	0,07	0,14	0,14	0,14
Besuki	<b>1,19</b>	<b>1,42</b>	<b>1,53</b>	0,80	0,72
Bungatan	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Jangkar	<b>1,20</b>	<b>1,16</b>	0,89	0,90	<b>1,24</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,54	0,73	0,71	0,67	0,67
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,35	0,44	0,43	0,46	0,64
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>1,66</b>	<b>1,64</b>	<b>1,67</b>	<b>1,73</b>	<b>1,71</b>
Panji	1,00	1,00	<b>1,37</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
Situbondo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Suboh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator jumlah tenaga kerja terdapat di 3 (tiga) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan, 3 (tiga) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Jangkar, Panarukan dan Panji. Pada tahun 2017 Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi pertama. Kecamatan Panji merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi kedua dan Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi ketiga.

Berdasarkan pada Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki

oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 merupakan wilayah basis industri pengolahan

dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Besuki pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Jangkar pada tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panji pada tahun 2017 merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Jangkar pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Panji selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Bungatan, Kapongan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Bungatan, Kapongan dan Mangaran merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Bungatan, Kapongan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.14 hasil perhitungan analisis LQ industri pembekuan biota air lainnya disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>4,18</b>	<b>4,42</b>	<b>4,16</b>	<b>4,24</b>	<b>4,01</b>
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator jumlah tenaga kerja terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan, 1 (satu) kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Panarukan. Pada tahun 2017 Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator jumlah tenaga kerja tertinggi pertama.

Berdasarkan pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.15 hasil perhitungan analisis LQ industri pemindangan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pemindangan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	<b>1,77</b>	<b>1,81</b>	<b>1,71</b>	<b>1,75</b>	<b>1,80</b>
Besuki	<b>1,60</b>	<b>1,57</b>	<b>1,39</b>	<b>1,47</b>	<b>1,52</b>
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	<b>1,65</b>	<b>1,66</b>	<b>1,24</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	<b>2,77</b>	<b>2,52</b>	<b>2,32</b>	<b>2,26</b>	<b>2,29</b>
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,16	0,16	0,14	0,13	0,13
Panji	0,00	0,00	<b>1,15</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi terdapat di 5 (lima) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan, 5 (lima) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan dan Panji. Pada tahun 2017 Kecamatan Kapongan merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi pertama, Kecamatan Banyuputih merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi kedua, Kecamatan Besuki merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi ketiga, Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi keempat dan Kecamatan Panji merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi kelima.

Berdasarkan pada Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki

oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar dan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Jangkar dan Panji merupakan wilayah basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Jangkar dan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang

dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran pada tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Mangaran merupakan wilayah non basis industri pemindangan ikan.

Kecamatan Mangaran selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol

dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.16 hasil perhitungan analisis LQ industri penggaraman atau pengeringan ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	<b>1,43</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>1,52</b>	<b>1,55</b>
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,91	0,91	<b>1,01</b>	1,00	1,00
Bungatan	<b>1,47</b>	<b>1,50</b>	<b>1,53</b>	<b>1,56</b>	<b>1,60</b>
Jangkar	0,63	0,65	0,47	0,48	0,36
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,13	0,12	0,13	0,20	0,21
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	<b>1,24</b>	<b>1,22</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>1,77</b>
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai investasi terdapat di 3 (tiga) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan, 3 (tiga) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran. Pada tahun 2017 Kecamatan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi pertama, Kecamatan Bungatan merupakan

wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi kedua dan Kecamatan Banyuglugur merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan pada indikator nilai investasi tertinggi ketiga.

Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan, namun pada tahun 2015 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Besuki pada tahun 2015 merupakan wilayah basis industri penggaraman atau pengeringan ikan, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Besuki pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Besuki selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai  $LQ$ .

Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Arjasa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan nilai

investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan merupakan wilayah non basis industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan,

kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.17 hasil perhitungan analisis LQ industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
Banyuputih	0,08	0,07	0,12	0,11	0,11
Besuki	0,46	0,52	0,50	0,45	0,42
Bungatan	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Jangkar	<b>1,76</b>	<b>1,69</b>	<b>1,17</b>	<b>1,12</b>	<b>1,77</b>
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,69	0,98	0,98	0,91	0,86
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,50	0,57	0,55	0,58	0,78
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>1,58</b>	<b>1,52</b>	<b>1,63</b>	<b>1,68</b>	<b>1,72</b>
Panji	1,00	1,00	0,81	0,79	0,76
Situbondo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Suboh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai investasi terdapat di 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan, 2 (dua) kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Jangkar dan Panarukan. Pada tahun 2017 Kecamatan Jangkar merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai investasi tertinggi pertama dan Kecamatan Panarukan

merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan pada indikator nilai investasi tertinggi kedua.

Berdasarkan pada Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Jangkar dan Panarukan merupakan wilayah basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Jangkar dan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Jangkar selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan, serta pembekuan biota air lainnya. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri

kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Situbondo dan Suboh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami stagnan nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 memiliki nilai  $LQ = 1$ , maka pada kecamatan mempunyai aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan setara dengan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Panji pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Panji pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh stagnan nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Panji selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ < 1$ , maka kecamatan mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktifitas industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kabupaten. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan dan Mangaran merupakan wilayah non basis industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan,

Kapongan dan Mangaran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuglugur dan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh kedua industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Besuki selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

Kecamatan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh ketiga industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ. Adapun Tabel 4.18 hasil perhitungan analisis LQ industri pembekuan biota air lainnya disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Analisis LQ Industri Pembekuan Biota Air Lainnya disetiap Kecamatan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asembagus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuglugur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banyuputih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bungatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jangkar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jatibanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kendit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mangaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mlandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Panarukan	<b>3,42</b>	<b>3,49</b>	<b>3,55</b>	<b>3,50</b>	<b>3,39</b>
Panji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situbondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suboh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbermalang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Pada tahun 2017 wilayah kecamatan yang merupakan basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator nilai investasi terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan, 1 (satu) kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Panarukan. Pada tahun 2017

Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya pada indikator nilai investasi tertinggi pertama.

Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai investasi industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan terjadinya konsentrasi industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kabupaten, atau terjadi pemusatan aktifitas di kecamatan dan mengindikasikan potensi ekspor ke wilayah lainnya. Kecamatan Panarukan merupakan wilayah basis industri pembekuan biota air lainnya. Kecamatan Panarukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan oleh stagnan dan meningkatnya nilai investasi ditingkat kecamatan, sedangkan pada tingkat kabupaten nilai investasi mengalami peningkatan tiap tahun sehingga mempengaruhi terhadap nilai LQ.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan adanya perbedaan nilai investasi yang dimiliki oleh keempat industri tersebut ditingkat kecamatan dan kabupaten sehingga mempengaruhi nilai LQ.

*Shift share analysis* (SSA) menjelaskan bagaimana tingkat persaingan (*competitiveness*) suatu aktifitas komoditas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total komoditas dalam wilayah. Hasil perhitungan *shift share analysis* (SSA) dibagi kedalam 4 (empat) kuadran yaitu kuadran 1 menjelaskan bahwa *differential shift* positif dan *proportional shift* positif, bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik, kuadran 2 menjelaskan bahwa *differential shift* negatif dan *proportional shift* positif, bermakna struktur industri baik, tetapi lemah dalam tingkat pertumbuhan, kuadran 3 menjelaskan bahwa *differential shift* negatif dan *proportional shift* negatif, bermakna kondisi tidak baik, karena kedua komponen baik struktur maupun kompetitif lemah dan

kuadran 4 menjelaskan bahwa *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif, bermakna industri dalam wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial. Adapun Tabel 4.19 hasil perhitungan *shift share analysis* (SSA) per jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:



Tabel 4.19 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			Jumlah
	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	
Arjasa	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.45
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	68.32	-40.98	790.00	<b>6.57</b>	<b>4.08</b>	<b>76.00</b>	0.00	0.00	0.00	903.99
Banyuputih	494.92	-45.66	3.696.00	0.00	0.00	0.00	<b>39.37</b>	<b>1.83</b>	<b>294.00</b>	0.00	0.00	0.00	4,480.46
Besuki	<b>142.50</b>	<b>42.87</b>	<b>1.525.00</b>	110.73	-69.72	1,185.00	<b>48.96</b>	<b>24.46</b>	<b>524.00</b>	0.00	0.00	0.00	3,533.81
Bungatan	0.00	0.00	0.00	894.06	-536.27	10,337.50	<b>9.95</b>	<b>6.17</b>	<b>115.00</b>	0.00	0.00	0.00	10,826.40
Jangkar	0.00	0.00	0.00	12.18	-10.43	50.70	33.64	-14.02	140.00	0.00	0.00	0.00	212.07
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	<b>111.38</b>	<b>33.51</b>	<b>1.192.00</b>	13.08	-8.24	140.00	<b>8877</b>	<b>44.35</b>	<b>950.00</b>	0.00	0.00	0.00	2,564.86
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	198.22	-169.67	825.00	119.89	-49.97	499.00	0.00	0.00	0.00	1,422.48
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	<b>33.37</b>	<b>4.15</b>	<b>308.70</b>	21.08	-14.33	195.00	<b>646.49</b>	<b>191.45</b>	<b>5.980.00</b>	<b>436.44</b>	<b>497.06</b>	<b>4,970.50</b>	12,336.42
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.83	-486.07	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,771.75
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.39	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	3,054.39
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	622.51
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kab. Situbondo	782.18	34.87	6,721.70	1,327.63	-849.63	13,810.70	2,149.38	-277.73	13,357.00	436.44	497.06	4,970.50	42,026.60

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai produksi industri pemindangan ikan terdapat di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif, yang artinya industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri diwilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Besuki, Kapongan dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan

lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat di Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Arjasa memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur selain industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat juga industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan, Panarukan, Situbondo dan Suboh memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar, Mangaran dan Panji memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift*

negatif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Banyuglugur selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat juga industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Kecamatan Panji, Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

Industri pembekuan biota air lainnya terdapat di Kecamatan Panarukan. Industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Adapun Tabel 4.20 hasil perhitungan *shift share analysis* (SSA) per jenis industri kecil dan menengah pada indikator jumlah tenaga kerja sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			Jumlah
	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	
Arjasa	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	14.55	-4.98	112.83	<b>1.02</b>	<b>0.31</b>	<b>6.67</b>	0.00	0.00	0.00	130.40
Banyuputih	<b>54.60</b>	<b>1.23</b>	<b>320.65</b>	0.00	0.00	0.00	2.37	-0.05	12.67	0.00	0.00	0.00	391.47
Besuki	<b>3.42</b>	<b>0.74</b>	<b>22.65</b>	3.42	-1.40	22.83	<b>5.13</b>	<b>0.85</b>	<b>34.67</b>	0.00	0.00	0.00	92.31
Bungatan	0.00	0.00	0.00	23.99	-8.21	186.83	<b>1.02</b>	<b>0.31</b>	<b>6.67</b>	0.00	0.00	0.00	210.61
Jangkar	0.00	0.00	0.00	3.60	-2.93	6.83	6.30	-3.98	12.67	0.00	0.00	0.00	22.50
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	<b>19.94</b>	<b>4.33</b>	<b>138.65</b>	1.99	-0.82	12.83	<b>5.70</b>	<b>0.95</b>	<b>38.67</b>	0.00	0.00	0.00	222.24
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	58.52	-47.61	128.83	13.51	-8.52	28.67	0.00	0.00	0.00	173.40
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	<b>8.77</b>	<b>1.98</b>	<b>60.65</b>	3.11	-1.26	20.83	<b>34.22</b>	<b>5.98</b>	<b>240.67</b>	14.71	-1.71	115.75	490.70
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30	-47.34	76.67	0.00	0.00	0.00	89.63
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	0.00	96.67	0.00	0.00	0.00	112.95
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00	45.31
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kab. Situbondo	86.72	8.28	542.61	112.21	-67.21	526.66	152.49	-51.49	593.35	14.71	-1.71	115.75	2,019.37

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.20 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja industri pemindangan ikan terdapat di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat di Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan

Panarukan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Arjasa memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur selain industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat juga industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Kapongan, Panarukan, Situbondo dan Suboh memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Mangaran dan Panji memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Banyuglugur selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat juga industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol

dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pemindangan ikan lebih menonjol dibandingkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Kecamatan Panji, Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

Industri pembekuan biota air lainnya terdapat di Kecamatan Panarukan. Industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Adapun Tabel 4.21 hasil perhitungan *shift share analysis* (SSA) per jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Perhitungan SSA Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan			Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			Jumlah
	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	Ns	P	D	
Arjasa	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.82
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	74.56	-49.28	1,060.00	<b>2.81</b>	<b>3.87</b>	<b>40.00</b>	0.00	0.00	0.00	1,131.96
Banyuputih	371.05	-55.69	2,618.00	0.00	0.00	0.00	<b>14.17</b>	<b>2.54</b>	<b>100.00</b>	0.00	0.00	0.00	3,050.07
Besuki	<b>90.39</b>	<b>38.71</b>	<b>1,071.68</b>	89.40	-64.12	1,060.00	<b>21.93</b>	<b>21.53</b>	<b>260.00</b>	0.00	0.00	0.00	2,589.51
Bungatan	0.00	0.00	0.00	336.78	-222.60	4,788.00	<b>2.81</b>	<b>3.87</b>	<b>40.00</b>	0.00	0.00	0.00	4,948.86
Jangkar	0.00	0.00	0.00	9.33	-8.61	30.00	12.44	-5.75	40.00	0.00	0.00	0.00	77.40
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	<b>71.10</b>	<b>30.45</b>	<b>843.00</b>	5.99	-4.30	71.00	<b>14.84</b>	<b>14.57</b>	<b>176.00</b>	0.00	0.00	0.00	1,222.66
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	319.27	-294.78	1,027.00	62.18	-28.75	200.00	0.00	0.00	0.00	1,284.92
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	<b>15.02</b>	<b>11.48</b>	<b>220.00</b>	5.87	-3.82	86.00	<b>125.71</b>	<b>182.00</b>	<b>1,841.00</b>	273.14	-273.14	4,000.00	6,483.27
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.87	-301.01	406.00	0.00	0.00	0.00	473.86
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.33	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	805.33
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	184.37	0.00	0.00	0.00	215.18
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kab. Situbondo	547.55	24.95	4,752.68	845.01	-647.51	8,282.00	771.91	-107.11	3,977.37	273.14	-273.14	4,000.00	22,446.85

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai investasi industri pemindangan ikan terdapat di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif, yang artinya industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri diwilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Besuki, Kapongan dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pemindangan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Panarukan selain industri pemindangan ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan, serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan

pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat di Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Arjasa memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Arjasa hanya terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Kecamatan Banyuglugur selain industri penggaraman atau pengeringan ikan terdapat juga industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri

pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri penggaraman atau pengeringan ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan, Panarukan, Situbondo dan Suboh memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* positif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu). Dimana kuadran 1 (satu) bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar, Mangaran dan Panji memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Banyuglugur selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat juga industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Banyuputih selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri pemindangan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Besuki dan Kapongan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan serta penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Bungatan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan, kondisi ini disebabkan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Kecamatan Jangkar dan Mangaran selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, namun tidak ada yang menonjol kondisi ini disebabkan industri penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya

untuk ikan terdapat pada kuadran 4 (empat) yang bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pembekuan biota air lainnya. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik. Kecamatan Panji, Situbondo dan Suboh hanya terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

Industri pembekuan biota air lainnya terdapat di Kecamatan Panarukan. Industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan memiliki nilai *differential shift* positif dan *proportional shift* negatif yang artinya industri pembekuan biota air lainnya terdapat pada kuadran 4 (empat). Dimana kuadran 4 (empat) bermakna industri di wilayah ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ekonomi dan sosial.

Kecamatan Panarukan selain industri pembekuan biota air lainnya juga terdapat industri pemindangan ikan, penggaraman atau pengeringan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan lebih menonjol dibandingkan industri penggaraman atau pengeringan ikan dan pembekuan biota air lainnya, kondisi ini disebabkan industri pemindangan ikan serta pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan terdapat pada kuadran 1 (satu) yang bermakna komponen kompetitif dan struktural memiliki kinerja yang baik.

Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan analisis alternatif guna mengetahui potensi kegiatan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Dalam analisis model rasio pertumbuhan (MRP) ini membandingkan pertumbuhan suatu jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kecamatan dengan pertumbuhan suatu

jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di tingkat kabupaten. Terdapat dua analisis dalam model rasio pertumbuhan (MRP) yaitu analisis rasio pertumbuhan referensi ( $RP_R$ ) dan analisis rasio pertumbuhan studi ( $RP_S$ ). Hasil dari analisis model rasio pertumbuhan (MRP) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu klasifikasi 1 nilai  $RP_R$  (+) dan  $RP_S$  (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan. Kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan, klasifikasi 2 nilai  $RP_R$  (+) dan  $RP_S$  (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol, klasifikasi 3 nilai  $RP_R$  (-) dan  $RP_S$  (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol dan klasifikasi 4 nilai  $RP_R$  (-) dan  $RP_S$  (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah. Adapun Tabel 4.22 hasil perhitungan model rasio pertumbuhan (MRP) per jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai produksi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan				Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			
	RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>	
	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N
Arjasa	0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Asembagus	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Banyuglugur	0,00		0,00		0,40	-	1,10	+	1,62	+	0,00		0,00		0,00	
Banyuputih	0,91	-	0,51	-	0,00		0,00		<b>1,05</b>	+	<b>7,19</b>	+	0,00		0,00	
Besuki	1,30	+	0,76	-	0,37	-	1,46	+	1,50	+	0,67	-	0,00		0,00	
Bungatan	0,00		0,00		0,40	-	0,00		1,62	+	0,00		0,00		0,00	
Jangkar	0,00		0,00		0,14	-	0,00		0,58	-	0,76	-	0,00		0,00	
Jatibanteng	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Kapongan	1,30	+	0,00		0,37	-	3,00	+	<b>1,50</b>	+	<b>1,96</b>	+	0,00		0,00	
Kendit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Mangaran	0,00		0,00		0,14	-	0,86	-	0,58	-	1,00		0,00		0,00	
Mlandingan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Panarukan	1,12	+	0,00		0,32	-	1,17	+	1,30	+	0,94	-	<b>2,14</b>	+	<b>1,15</b>	+
Panji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,31	-	0,00		0,00		0,00	
Situbondo	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
Suboh	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	
Sumbermalang	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai produksi industri pemindangan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Besuki, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuputih yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  negatif di Kecamatan Banyuputih dan Besuki yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Besuki terdapat pada klasifikasi 2 (dua), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Mangaran yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Kapongan dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 3 (tiga), dimana kegiatan

tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Mangaran terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_R$  negatif di Kecamatan Jangkar, Mangaran dan Panji yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuputih dan Kapongan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Besuki, Jangkar dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuputih dan Kapongan terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Besuki dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 2 (dua), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar terdapat pada

klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Industri pembekuan biota air lainnya memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Panarukan yang artinya industri pembekuan biota air lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Panarukan yang artinya industri pembekuan biota air lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo. Industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan. Adapun Tabel 2.23 hasil perhitungan model rasio pertumbuhan (MRP) per jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di setiap kecamatan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.23 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan				Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				Pembekuan Biota Air Lainnya			
	RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>	
	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N
Arjasa	0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Asembagus	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Banyuglugur	0.00		0.00		0.66	-	1.07	+	1.30	+	0.00		0.00		0.00	
Banyuputih	1.02	+	0.80	-	0.00		0.00		0.98	-	5.49	+	0.00		0.00	
Besuki	<b>1.22</b>	+	<b>2.10</b>	+	0.59	-	0.89	-	1.17	+	0.34	-	0.00		0.00	
Bungatan	0.00		0.00		0.66	-	0.00		1.30	+	0.00		0.00		0.00	
Jangkar	0.00		0.00		0.19	-	0.00		0.37	-	0.52	-	0.00		0.00	
Jatibanteng	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Kapongan	1.22	+	0.00		0.59	-	6.93	+	<b>1.17</b>	+	<b>2.43</b>	+	0.00		0.00	
Kendit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Mangaran	0.00		0.00		0.19	-	0.43	-	0.37	-	1.88	+	0.00		0.00	
Mlandingan	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Panarukan	1.23	+	0.00		0.59	-	1.90	+	<b>1.17</b>	+	<b>1.28</b>	+	0.88	-	0.75	-
Panji	0.00		0.00		0.00		0.00		0.21	-	0.00		0.00		0.00	
Situbondo	0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
Suboh	0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
Sumbermalang	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan Tabel 4.23 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja industri pemindangan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Besuki yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Banyuputih yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih terdapat pada klasifikasi 2 (dua), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Besuki terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Besuki dan Mangaran yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Kapongan dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 3 (tiga), dimana kegiatan tersebut pada tingkat

kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Besuki terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Mangaran dan Panji yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuputih, Kapongan, Mangaran dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Besuki dan Jangkar yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuputih dan Mangaran terdapat pada klasifikasi 3 (tiga), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Besuki terdapat pada klasifikasi 2 (dua), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol namun pada tingkat kecamatan belum menonjol. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai

pertumbuhan yang rendah. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Kapongan dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan.

Industri pembekuan biota air lainnya memiliki nilai nominal  $RP_R$  negatif di Kecamatan Panarukan yang artinya industri pembekuan biota air lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  negatif di Kecamatan Panarukan yang artinya industri pembekuan biota air lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo. Industri pembekuan biota air lainnya di Kecamatan Panarukan terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah. Adapun Tabel 2.24 hasil perhitungan model rasio pertumbuhan (MRP) per jenis industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan disetiap kecamatan berdasarkan pada indikator nilai investasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24 Hasil Perhitungan MRP Per Jenis Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan disetiap Kecamatan Berdasarkan Pada Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan				Industri Penggaraman Atau Pengeringan Ikan				Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan				Pembekuan Biota Air Lainnya			
	RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>		RP <sub>R</sub>		RP <sub>S</sub>	
	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N	R	N
Arjasa	0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Asembagus	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Banyuglugur	0.00		0.00		0.34	-	1.04	+	2.38	+	0.00		0.00		0.00	
Banyuputih	0.85	-	0.77	-	0.00		0.00		<b>1.18</b>	+	<b>6.90</b>	+	0.00		0.00	
Besuki	<b>1.43</b>	+	<b>1.04</b>	+	0.28	-	0.92	-	<b>1.98</b>	+	<b>1.17</b>	+	0.00		0.00	
Bungatan	0.00		0.00		0.34	-	0.00		2.38	+	0.00		0.00		0.00	
Jangkar	0.00		0.00		0.08	-	0.00		0.54	-	0.73	-	0.00		0.00	
Jatibanteng	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Kapongan	1.43	+	0.00		0.28	-	4.09	+	<b>1.98</b>	+	<b>4.54</b>	+	0.00		0.00	
Kendit	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Mangaran	0.00		0.00		0.08	-	0.56	-	0.54	-	2.55	+	0.00		0.00	
Mlandingan	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Panarukan	1.76	+	0.00		0.35	-	3.18	+	<b>2.45</b>	+	<b>3.19</b>	+	0.00		0.00	
Panji	0.00		0.00		0.00		0.00		0.18	-	0.00		0.00		0.00	
Situbondo	0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00	
Suboh	0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00	
Sumbermalang	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Berdasarkan Tabel 4.24 menunjukkan bahwa nilai investasi industri pemindangan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Besuki, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuputih yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Besuki yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Banyuputih yang artinya industri pemindangan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Banyuputih terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah. Industri pemindangan ikan di Kecamatan Besuki terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan.

Industri penggaraman atau pengeringan ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  negatif di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Besuki dan Mangaran yang artinya industri penggaraman atau pengeringan ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri

penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Banyuglugur, Kapongan dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 3 (tiga), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol. Industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kecamatan Besuki dan Mangaran terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah.

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan memiliki nilai nominal  $RP_R$  positif di Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Kapongan dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_R$  negatif di Kecamatan Jangkar, Mangaran dan Panji yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dan  $RP_S$  positif di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan, Mangaran dan Panarukan yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo serta  $RP_S$  negatif di Kecamatan Jangkar yang artinya industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Banyuputih, Besuki, Kapongan dan Panarukan terdapat pada klasifikasi 1 (satu), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kecamatan kemudian kegiatan ini selanjutnya disebut dominan pertumbuhan. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Jangkar terdapat pada klasifikasi 4 (empat), dimana kegiatan tersebut pada tingkat

kabupaten dan pada tingkat kecamatan mempunyai pertumbuhan yang rendah. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kecamatan Mangaran terdapat pada klasifikasi 3 (tiga), dimana kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang tidak menonjol namun pada tingkat kecamatan termasuk menonjol. Industri pembekuan biota air lainnya tidak memiliki nilai nominal  $RP_R$  maupun  $RP_S$  yang artinya industri pembekuan biota air lainnya tidak mengalami pertumbuhan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

Berdasarkan pada Lampiran 4.13 wilayah prioritas pengembangan industri pemindangan ikan berdasarkan pada indikator nilai produksi dapat diketahui bahwa industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 7 (tujuh) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan dan Panji. Terdapat 2 (dua) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Besuki dan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Besuki dan Kapongan lolos dari dua analisis. Terdapat 4 (empat) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Panarukan dan Panji, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Panarukan dan Panji lolos dari satu analisis dan terdapat 1 (satu) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Mangaran tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.14 wilayah prioritas pengembangan industri penggaraman atau pengeringan ikan berdasarkan pada indikator nilai produksi dapat diketahui bahwa industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 8 (delapan) kecamatan terdiri dari Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Terdapat 5 (lima) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan dan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuglugur,

Besuki, Bungatan dan Mangaran lolos dari satu analisis dan terdapat 3 (tiga) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.15 wilayah prioritas pengembangan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan berdasarkan pada indikator nilai produksi dapat diketahui bahwa industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 11 (sebelas) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Kapongan lolos dari tiga analisis. Terdapat 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih dan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih dan Panarukan lolos dari dua analisis. Terdapat 6 (enam) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Situbondo dan Suboh, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Situbondo dan Suboh lolos dari satu analisis dan terdapat 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Mangaran dan Panji, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Mangaran dan Panji tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.16 wilayah prioritas pengembangan industri pembekuan biota air lainnya berdasarkan pada indikator nilai produksi dapat diketahui bahwa industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Panarukan. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan yang merupakan wilayah prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan

Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Panarukan lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.17 wilayah prioritas pengembangan industri pemindangan ikan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja dapat diketahui bahwa industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 7 (tujuh) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan dan Panji. Terdapat 3 (tiga) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih, Besuki dan Kapongan lolos dari dua analisis. Terdapat 2 (dua) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Jangkar, dan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Jangkar dan Panarukan lolos dari satu analisis dan terdapat 2 (dua) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Mangaran dan Panji, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Mangaran dan Panji tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.18 wilayah prioritas pengembangan industri penggaraman atau pengeringan ikan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja dapat diketahui bahwa industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 8 (delapan) kecamatan terdiri dari Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Terdapat 4 (empat) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Bungatan dan Mangaran lolos dari satu analisis dan terdapat 4 (empat) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Besuki, Jangkar, Kapongan dan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Besuki, Jangkar, Kapongan dan Panarukan tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.19 wilayah prioritas pengembangan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja dapat diketahui bahwa industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 11 (sebelas) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah prioritas pengembangan yaitu Kecamatan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Panarukan lolos dari tiga analisis. Terdapat 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Besuki dan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Besuki dan Kapongan lolos dari dua analisis. Terdapat 6 (enam) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Jangkar, Panji, Situbondo dan Suboh, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Jangkar, Panji, Situbondo dan Suboh lolos dari satu analisis dan terdapat 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih dan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih dan Mangaran tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.20 wilayah prioritas pengembangan industri pembekuan biota air lainnya berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja dapat diketahui bahwa industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Panarukan. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas pengembangan yaitu Kecamatan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Panarukan lolos dari satu analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.21 wilayah prioritas pengembangan industri pemindangan ikan berdasarkan pada indikator nilai investasi dapat diketahui bahwa industri pemindangan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 7 (tujuh)

kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 7 (tujuh) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuputih, Besuki, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan dan Panji. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah prioritas pengembangan yaitu Kecamatan Besuki, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Besuki lolos dari tiga analisis. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Kapongan lolos dari dua analisis. Terdapat 4 (empat) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Panarukan dan Panji, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Panarukan dan Panji lolos dari satu analisis dan terdapat 1 (satu) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas pengembangan yaitu Kecamatan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Mangaran tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.22 wilayah prioritas pengembangan industri penggaraman atau pengeringan ikan berdasarkan pada indikator nilai investasi dapat diketahui bahwa industri penggaraman atau pengeringan ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 8 (delapan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 8 (delapan) kecamatan terdiri dari Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran dan Panarukan. Terdapat 5 (lima) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas pengembangan yaitu Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan dan Mangaran, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuglugur, Besuki, Bungatan dan Mangaran lolos dari satu analisis dan terdapat 3 (tiga) kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Jangkar, Kapongan dan Panarukan tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.23 wilayah prioritas pengembangan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan berdasarkan pada indikator nilai

investasi dapat diketahui bahwa industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan di Kabupaten Situbondo terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 11 (sebelas) kecamatan terdiri dari Kecamatan Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo dan Suboh. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Panarukan lolos dari tiga analisis. Terdapat 3 (tiga) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah cukup prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih, Besuki, dan Kapongan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuputih, Besuki, dan Kapongan lolos dari dua analisis. Terdapat 5 (lima) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Jangkar, Situbondo dan Suboh, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Jangkar, Situbondo dan Suboh lolos dari satu analisis dan terdapat 2 (dua) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang merupakan wilayah tidak prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Mangaran dan Panji, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Mangaran dan Panji tidak lolos dari tiga analisis.

Berdasarkan pada Lampiran 4.24 wilayah prioritas pengembangan industri pembekuan biota air lainnya berdasarkan pada indikator nilai investasi dapat diketahui bahwa industri pembekuan biota air lainnya di Kabupaten Situbondo terdapat di 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Panarukan. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 1 (satu) kecamatan yang merupakan wilayah kurang prioritas dalam pengembangan yaitu Kecamatan Panarukan, hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Panarukan lolos dari satu analisis.

Berdasarkan pada hasil analisis LQ, SSA dan MRP dapat diketahui bahwa wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan indikator nilai produksi yaitu Kecamatan Kapongan dan Panarukan. Kecamatan Kapongan terdapat industri pengolahan dan

pengawetan lainnya untuk ikan, sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pembekuan biota air lainnya sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan pada hasil analisis LQ, SSA dan MRP dapat diketahui bahwa wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan indikator jumlah tenaga kerja yaitu Kecamatan Panarukan. Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pada hasil analisis LQ, SSA dan MRP dapat diketahui bahwa wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan indikator nilai investasi yaitu Kecamatan Besuki dan Panarukan. Kecamatan Besuki terdapat industri pemindangan ikan, sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.

#### **4.2.3 Analisis Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP) menggunakan alat bantu yaitu *expert choice* terhadap faktor-faktor penyusun strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang dibobot oleh narasumber kunci atau utama (*key informan*). Hasil analisis secara horizontal dapat dilihat pada Tabel 4.25 urutan prioritas faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25 Urutan Prioritas Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo

Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Pasar	0,279	1
Produk	0,230	2
Lingkungan industri	0,145	3
Teknologi	0,135	4
Manajemen	0,112	5
Ekonomi dan social	0,099	6
Rasio Inkonsistensi	0,01	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.25 penilaian diperoleh bahwa prioritas terbesar hingga terkecil dari faktor pertimbangan utama dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo adalah pasar sebesar 0,279, produk sebesar 0,230, lingkungan industri sebesar 0,145, teknologi sebesar 0,135, manajemen sebesar 0,112 serta ekonomi dan sosial sebesar 0,099. Pasar merupakan prioritas pertama dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Peningkatan pasar dilakukan karena pemasaran industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan masih berada di wilayah Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan produksi dan promosi yang dilakukan sehingga industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo belum dapat mengembangkan pasar meskipun pelaku usaha mengetahui bahwa produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo memiliki peluang yang cukup besar bahkan berpotensi untuk mencapai pasaran wilayah lain maupun ekspor.

Produk merupakan prioritas kedua dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku yaitu ikan laut, apabila bahan baku melimpah pelaku usaha dapat memenuhi permintaan pasar dan sebaliknya apabila bahan baku berkurang bahkan tidak ada pelaku usaha tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha industri

kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo banyak yang berwirausaha lain. Kendala ini mengakibatkan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo tidak bisa mempertahankan serta mengembangkan pasar. Perlu adanya upaya pengembangan pasar yang diarahkan pada kemampuan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang menghasilkan produk secara terus menerus dengan mengatasi permasalahan atau keterbatasan bahan baku.

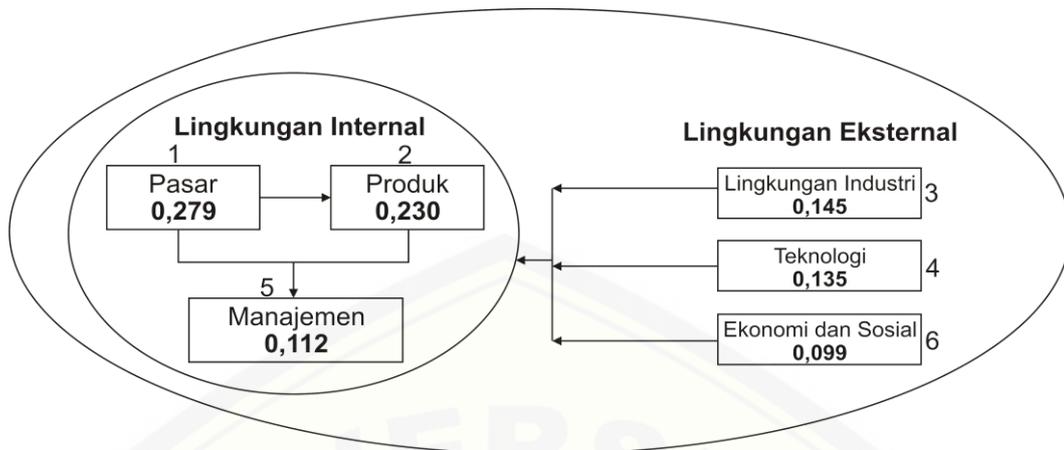
Lingkungan industri merupakan prioritas ketiga dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo belum mengetahui dengan baik terkait dengan lingkungan industri dalam mendukung terwujudnya perkembangan usahanya. Perlu adanya upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang lingkungan industri sehingga pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo mengetahui cara untuk mengatasi terjadinya ancaman yang datangnya dari lingkungan industri.

Teknologi merupakan prioritas keempat dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo belum seluruhnya memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendukung terwujudnya perkembangan usahanya. Perlu adanya upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan tentang tata cara mengoperasikan alat berteknologi yang digunakan sehingga pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis

pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo mengetahui dengan baik tata cara mengoperasikan alat berteknologi.

Manajemen merupakan prioritas kelima dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo belum mengetahui dengan baik manfaat dari manajemen dalam mendukung terwujudnya perkembangan usahanya. Perlu adanya upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan tentang manajemen perusahaan sehingga pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo mengetahui dengan baik manfaat dari manajemen.

Ekonomi dan sosial merupakan prioritas keenam dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo membutuhkan peran pemerintah dalam rangka mewujudkan perkembangan usahanya melalui dengan fasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan, subsidi yang terus menerus diberikan kepada pelaku usaha serta memberikan bantuan sarana prasarana umum misalnya berupa bantuan hibah peralatan, sehingga pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat terus mempertahankan usahanya serta bersaing. Adapun Gambar 4.4 alur strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.4 Alur Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pada Gambar 4.4 alur strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa dengan cara mengembangkan serta meningkatkan pasar berupa promosi, *e-marketing* dan saluran distribusi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha maupun fasilitas dari pemerintah kabupaten akan memberikan peluang terhadap produk yang dihasilkan, proses produksi membutuhkan bahan baku yang memiliki kualitas atau jaminan mutu terbaik dan inovasi serta *differensiasi* produk juga akan mendukung terhadap kemampuan produk untuk bersaing, namun pelaku usaha juga harus memperhatikan lingkungan industri berupa kebutuhan maupun kepuasan konsumen agar dapat memenuhi permintaan pasar dan melakukan kerjasama dengan penyedia input yang memiliki bahan baku agar pelaku usaha dapat berproduksi secara terus menerus serta dapat bersaing dengan munculnya barang substitusi, oleh sebab itu perlu adanya dukungan berupa peralatan berteknologi agar kapasitas produksi meningkat sehingga dapat bersaing serta menjalin kerjasama untuk dapat meningkatkan maupun mengembangkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia didalam manajemen dengan adanya pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan kemudian fasilitas yang diberikan berupa ekonomi dan sosial yaitu mempermudah dalam memperoleh bantuan modal maupun pinjaman dengan bunga ringan serta sarpras umum berupa jalan yang baik serta subsidi sehingga industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat membantu dalam

meningkatkan perekonomian wilayah. Lingkungan internal bisa dikontrol oleh perusahaan atau pelaku usaha sedangkan lingkungan eksternal tanggung jawab pemerintah. Adapun hasil analisis secara horizontal dapat dilihat Tabel 4.26 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor pasar yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.26 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Pasar

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Promosi	0,495	1
<i>E-Marketing</i>	0,314	2
Saluran distribusi	0,191	3
Rasio Inkonsistensi	0,0001	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.26 hasil analisis pada tingkat 3 (tiga) yaitu sub faktor pertimbangan utama dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo. Hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu pasar dapat diketahui bahwa promosi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pengembangan pasar dengan nilai sebesar 0,495 kemudian *e-marketing* sebesar 0,314 dan saluran distribusi sebesar 0,191. Promosi mendapatkan prioritas utama atau pertama karena dengan kegiatan promosi dapat memperkenalkan produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kepada masyarakat lokal maupun luar daerah dan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Kegiatan promosi juga diarahkan untuk membangun persepsi konsumen bahwa produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan merupakan produk yang aman dikonsumsi setiap hari. Kegiatan promosi produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan lebih banyak dilakukan secara menjajakan atau menawarkan dan mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yang membuat kegiatan promosi belum maksimal.

Elektronik marketing atau pemasaran melalui media elektronik merupakan prioritas kedua karena dengan kegiatan *e-marketing* dapat memperkenalkan produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan kepada masyarakat lokal maupun luar daerah dan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Kegiatan *e-marketing* juga dapat memperkuat cara mempromosikan produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Saluran distribusi merupakan prioritas ketiga karena pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan lebih sering melakukan sendiri yang artinya pelaku usaha langsung menjual kepada konsumen sehingga tidak melibatkan saluran distribusi. Adapun hasil analisis secara horizontal dapat dilihat Tabel 4.27 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor manajemen yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.27 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Manajemen

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Kualitas SDM	0,584	1
Keterampilan SDM	0,416	2
Rasio Inkonsistensi	0	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.27 hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu manajemen dapat diketahui bahwa kualitas sumberdaya manusia dengan nilai sebesar 0,584 dan keterampilan sumberdaya manusia dengan nilai sebesar 0,416. Kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan manajemen. Kualitas sumberdaya manusia merupakan kemampuan dalam mengelola perusahaan mulai aspek manajerial perusahaan hingga keterampilan pekerjanya. Kualitas sumberdaya manusia diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha karena kemunduran beberapa pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajemen pelaku usaha. Selain itu kualitas sumberdaya manusia yang baik dapat mempermudah perusahaan dalam menyerap tenaga kerja yang terampil. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan manajerial perusahaan yang diadakan oleh perusahaan tersebut atau bekerja sama dengan pihak pemerintah.

Keterampilan sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang memiliki keterampilan dalam bekerja sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan berwirausaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Beberapa industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo sering melakukan kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia dengan adanya pelatihan keterampilan kerja. Adapun hasil analisis secara horizontal dapat dilihat Tabel 4.28 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor produk yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.28 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Produk

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Bahan baku	0,515	1
Inovasi	0,259	2
Differensiasi produk	0,226	3
Rasio Inkonsistensi	0	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.28 hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu produk dapat diketahui bahwa bahan baku merupakan yang sangat berpengaruh dalam faktor produk yaitu dengan nilai sebesar 0,515 kemudian inovasi dengan nilai sebesar 0,259 dan differensiasi produk dengan nilai sebesar 0,226. Bahan baku merupakan sub faktor yang berpengaruh terhadap produk, apabila bahan baku berkurang atau tidak ada pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan tidak dapat memproduksi produknya, oleh sebab itu ketersediaan bahan baku secara terus menerus akan dapat membantu pelaku usaha dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Kemudian setelah tersedianya bahan baku untuk memproduksi produk dibutuhkan inovasi misalnya bentuk kemasan maupun citarasa agar konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya serta

mencapai pada tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Differensiasi produk berfungsi untuk bersaing dengan produk yang sejenis sehingga pelaku usaha dapat bertahan dalam berwirausaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Adapun hasil analisis secara horizontal dapat dilihat Tabel 4.29 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor ekonomi dan sosial yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.29 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Ekonomi Dan Sosial

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Bantuan modal	0,433	1
Subsidi	0,377	2
Sarpras umum	0,190	3
Rasio Inkonsistensi	0	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.28 hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu ekonomi dan sosial dapat diketahui bahwa bantuan modal merupakan yang sangat berpengaruh dalam faktor ekonomi dan sosial yaitu dengan nilai sebesar 0,433 kemudian subsidi dengan nilai sebesar 0,377 dan sarpras umum dengan nilai sebesar 0,190. Bantuan modal sangat dibutuhkan misalnya berupa fasilitas terkait dengan pinjaman lunak bagi pelaku usaha namun beberapa pelaku usaha lebih membutuhkan bantuan modal tanpa bunga yaitu dari pemerintah memberikan bantuan hibah berupa uang atau modal. Subsidi juga dibutuhkan oleh pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan dalam rangka untuk mengembangkan maupun meningkatkan kinerja perusahaan misalnya subsidi listrik, bahan bakar minyak dan garam. Sarpras umum berupa peralatan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan misalnya alat pemindangan ikan, alat pengeringan ikan serta alat pencabik ikan. Adapun hasil analisis secara horizontal

dapat dilihat Tabel 4.30 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor lingkungan industri yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.30 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Lingkungan Industri

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Konsumen	0,408	1
Penyedia input	0,356	2
Barang substitusi	0,236	3
Rasio Inkonsistensi	0,07	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.30 hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu lingkungan industri dapat diketahui bahwa konsumen merupakan yang sangat berpengaruh dalam faktor lingkungan industri yaitu dengan nilai sebesar 0,408 kemudian penyedia input dengan nilai sebesar 0,356 dan barang substitusi dengan nilai sebesar 0,236. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen menjadi prioritas utama dalam pendukung sub faktor lingkungan industri karena konsumen merupakan titik akhir dari penjualan produk industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan, pelaku usaha sangat ditentukan oleh konsumen dalam rangka untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Penyedia input serta barang substitusi merupakan pendukung sub faktor lingkungan industri yang juga dipertimbangkan dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Adapun hasil analisis secara horizontal dapat dilihat Tabel 4.31 urutan prioritas sub faktor pertimbangan utama pada industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap faktor teknologi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.31 Urutan Prioritas Sub Faktor Pertimbangan Utama Pada Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo Terhadap Faktor Teknologi

Sub Faktor Pertimbangan Utama	Pembobotan	Prioritas
Automatic	0,426	1
Semi automatic	0,339	2
Manual	0,235	3
Rasio Inkonsistensi	0,002	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.31 hasil analisis sub faktor pertimbangan utama yaitu teknologi dapat diketahui bahwa automatic merupakan yang sangat berpengaruh dalam faktor teknologi yaitu dengan nilai sebesar 0,426 kemudian semi automatic dengan nilai sebesar 0,339 dan manual dengan nilai sebesar 0,235. Beberapa pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo menggunakan alat berteknologi automatic serta semi automatic namun dalam menggunakan alat berteknologi tersebut pelaku usaha belum dapat menggunakan dengan baik sehingga hasil produksi belum maksimal, sedangkan pelaku usaha yang menggunakan alat berteknologi manual, hal ini disebabkan dengan keterbatasan modal serta sarana prasarana sehingga belum dapat memaksimalkan serta mengembangkan usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan. Adapun hasil analisis secara vertikal dapat dilihat Tabel 4.32 urutan prioritas alternatif strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.32 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo

Alternatif Strategi Pengembangan	Pembobotan	Prioritas
Meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing	0,365	1
Mengembangkan daya saing industri dan kontinueitas penyediaan input	0,137	2
Mengembangkan teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi	0,137	3
Mengembangkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar	0,132	4
Meningkatkan serta mengembangkan produk agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar	0,127	5
Meningkatkan serta mengembangkan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan	0,102	6
Rasio Inkonsistensi	0,02	

Sumber: Data primer, 2017

Berdasarkan Tabel 4.32 penilaian diperoleh bahwa prioritas alternatif strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dari terbesar hingga terkecil yaitu meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing sebesar 0,365, mengembangkan daya saing industri dan kontinueitas penyediaan input sebesar 0,137, mengembangkan teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 0,137, mengembangkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar sebesar 0,132, meningkatkan serta mengembangkan produk agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar sebesar 0,127 dan meningkatkan serta mengembangkan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan.

Meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan dalam menjual serta memasarkan produk. Pasar

merupakan hal yang sulit atau sukar bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo sehingga produk tidak dapat bersaing. Hal ini yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam memasarkan produk yang dimiliki sehingga perekonomian menurun, oleh sebab itu pelaku usaha diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak terkait misalnya pemerintah kabupaten yang telah memfasilitasi melalui toko pusat oleh-oleh yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.

Mengembangkan daya saing industri dan kontinuitas penyediaan input merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dalam melayani maupun memenuhi keinginan konsumen terhadap produk yang telah dipasarkan agar konsumen mendapat kepuasan, selain itu penyedia input atau penyedia bahan baku perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan baku terus menerus ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar dan mencegah adanya barang substitusi yang beredar dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait sehingga pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Mengembangkan teknologi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, namun dengan adanya keterbatasan pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terhadap teknologi sehingga belum dapat memaksimalkan produksi. Oleh sebab itu pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo diharapkan menerima serta menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten agar mengikuti perkembangan zaman sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang menggunakan alat berteknologi yaitu industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan serta

pembekuan biota air lainnya, sedangkan industri pemindangan ikan dan penggaraman atau pengeringan ikan masih menggunakan metode manual.

Mengembangkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten misalnya berupa subsidi, bantuan modal dengan bunga ringan serta sarpras umum berupa bantuan peralatan. Pemerintah kabupaten memiliki peranan penting dalam mendorong serta meningkatkan akses permodalan dan sarpras umum agar dapat meningkatkan produksi serta mempermudah akses pasar yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

Meningkatkan serta mengembangkan produk agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo agar dapat bersaing serta memenuhi permintaan pasar, misalnya dengan cara memilih bahan baku yang berkualitas baik dan segar sehingga konsumen mendapatkan kepuasan.

Meningkatkan serta mengembangkan manajemen dengan adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu strategi yang juga dibutuhkan oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten misalnya adanya pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan sehingga memberikan efek yang baik terhadap kebutuhan dalam meningkatkan kualitas serta keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan pada hasil analisis secara horizontal dan vertikal dapat diketahui bahwa strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo yang diprioritaskan adalah meningkatkan peluang pasar sehingga produk dapat bersaing, oleh sebab itu

pelaku usaha dibidang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo serta pemerintah kabupaten melakukan kerjasama agar dapat mewujudkan strategi pengembangan yang telah diprioritaskan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian tentang konsentrasi spasial serta strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode sistem informasi geografi (SIG) berupa peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai produksi diketahui bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar di 5 (lima) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo. Kecamatan Arjasa dan Bungatan terdapat industri penggaraman atau pengeringan ikan, Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan serta Kecamatan Panarukan dan Situbondo terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial.

Peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator jumlah tenaga kerja diketahui bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar di 2 (dua) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Banyuputih dan Panarukan. Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan dan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan, wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial.

Peta industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo pada indikator nilai investasi diketahui bahwa kegiatan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo cenderung menyebar di 3 (tiga) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Banyuputih, Bungatan dan Panarukan. Kecamatan Banyuputih terdapat industri pemindangan ikan, Kecamatan Bungatan terdapat

industri penggaraman atau pengeringan ikan dan Kecamatan Panarukan terdapat industri pembekuan biota air lainnya, wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah yang terkonsentrasi secara spasial.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator nilai produksi dengan menggunakan metode analisis LQ, SSA dan MRP dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Kapongan dan Panarukan. Kecamatan Kapongan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pembekuan biota air lainnya. Wilayah Kecamatan Kapongan dan Panarukan merupakan wilayah kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja dengan menggunakan metode analisis LQ, SSA dan MRP dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Panarukan. Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Wilayah Kecamatan Panarukan merupakan wilayah kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.

Industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator nilai investasi dengan menggunakan metode analisis LQ, SSA dan MRP dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Kecamatan Besuki dan Panarukan. Kecamatan Besuki terdapat industri pemindangan ikan sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Wilayah Kecamatan Besuki dan Panarukan merupakan wilayah kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas

pengembangan sehingga dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan pada hasil penelitian menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP) menggunakan alat bantu yaitu *expert choice* dapat diketahui bahwa strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dengan cara mengembangkan serta meningkatkan pasar berupa promosi, *e-marketing* dan saluran distribusi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha maupun fasilitas dari pemerintah kabupaten akan memberikan peluang terhadap produk yang dihasilkan, proses produksi membutuhkan bahan baku yang memiliki kualitas atau jaminan mutu terbaik dan inovasi serta *differensiasi* produk juga akan mendukung terhadap kemampuan produk untuk bersaing, namun pelaku usaha juga harus memperhatikan lingkungan industri berupa kebutuhan maupun kepuasan konsumen agar dapat memenuhi permintaan pasar dan melakukan kerjasama dengan penyedia input yang memiliki bahan baku agar pelaku usaha dapat berproduksi secara terus menerus serta dapat bersaing dengan munculnya barang substitusi, oleh sebab itu perlu adanya dukungan berupa peralatan berteknologi agar kapasitas produksi meningkat sehingga dapat bersaing serta menjalin kerjasama untuk dapat meningkatkan maupun mengembangkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia didalam manajemen dengan adanya pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan kemudian fasilitas yang diberikan berupa ekonomi dan sosial yaitu mempermudah dalam memperoleh bantuan modal maupun pinjaman dengan bunga ringan serta sarpras umum berupa jalan yang baik serta subsidi sehingga industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian wilayah.

## 5.2. Saran

Saran pertama untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi secara spasial yang tinggi berdasarkan pada indikator nilai produksi, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi terdapat 5 (lima) kecamatan dari

17 (tujuh belas), 5 (lima) kecamatan terdiri dari Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Bungatan, Panarukan dan Situbondo. Terdapat 2 (dua) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang merupakan wilayah potensi pengembangan yaitu Kecamatan Banyuputih dan Panarukan. Terdapat 1 (satu) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang merupakan wilayah cukup potensi pengembangan yaitu Kecamatan Bungatan dan terdapat 2 (dua) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang merupakan wilayah kurang potensi pengembangan yaitu Kecamatan Arjasa dan Situbondo.

Saran kedua untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator nilai produksi terdapat 2 (dua) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yaitu Kecamatan Kapongan dan Panarukan. Kecamatan Kapongan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pembekuan biota air lainnya.

Saran ketiga untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator jumlah tenaga kerja terdapat 1 (satu) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yaitu Kecamatan Panarukan. Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

Saran keempat untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada indikator nilai investasi terdapat 2 (dua) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta prioritas pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan yaitu Kecamatan Besuki dan Panarukan. Kecamatan Besuki terdapat industri pemindangan ikan sedangkan Kecamatan Panarukan terdapat industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.

Saran kelima untuk Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang strategi pengembangan industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada hasil *analytical hierarchy process* (AHP) menggunakan alat bantu yaitu *expert choice* dapat diketahui bahwa dengan cara mengembangkan serta meningkatkan pasar berupa promosi, *e-marketing* dan saluran distribusi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha maupun fasilitas dari pemerintah kabupaten akan memberikan peluang terhadap produk yang dihasilkan, proses produksi membutuhkan bahan baku yang memiliki kualitas atau jaminan mutu terbaik dan inovasi serta *differensiasi* produk juga akan mendukung terhadap kemampuan produk untuk bersaing, namun pelaku usaha juga harus memperhatikan lingkungan industri berupa kebutuhan maupun kepuasan konsumen agar dapat memenuhi permintaan pasar dan melakukan kerjasama dengan penyedia input yang memiliki bahan baku agar pelaku usaha dapat memproduksi secara terus menerus serta dapat bersaing dengan munculnya barang substitusi, oleh sebab itu perlu adanya dukungan berupa peralatan berteknologi agar kapasitas produksi meningkat sehingga dapat bersaing serta menjalin kerjasama untuk dapat meningkatkan maupun mengembangkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia didalam manajemen dengan adanya pelatihan secara berkesinambungan atau berkelanjutan kemudian fasilitas yang diberikan berupa ekonomi dan sosial yaitu mempermudah dalam memperoleh bantuan modal maupun pinjaman dengan bunga ringan serta sarpras umum berupa jalan yang baik serta subsidi sehingga industri kecil dan menengah berbasis pengolahan perikanan di Kabupaten Situbondo dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian wilayah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, H. R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Z. 2003. Dinamika spasial industri manufaktur di Jawa Barat tahun 1990-1999. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(2): 111-121.
- \_\_\_\_\_. Konsentrasi spasial industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur. *Jurnal Humanity*. 1(2): 142-151.
- Agustina, N. A. 2017. Analisis Sektor Unggulan Guna Mendorong Pembangunan Daerah Dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2015). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astutik, Y. dan E. B. Santoso. 2013. Prioritas wilayah pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Teknik Pomits*. 2(1): 20-24.
- Aronoff, S. 1989. *Geographic Information System; A Management Perspective*, Ottawa. WDL, Publications.
- \_\_\_\_\_. *Geographic Information System A Management Perspective*, Ottawa Canada. WDL, Publications.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Situbondo Dalam Angka*. September. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Situbondo Dalam Angka*. Agustus. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- Chrisman, N. 1997. *Exploring Geographic Information System*. John Willey dan Sons, Inc., New York.
- Chen, W. dan Xu J. 2007. An Application Of Shift Share Model To Economic Analysis Of Country. *World Journal of Modelling and Simulation*. 3(2): 90-99.
- Demers, M. N. 1997. *Fundamental Geographic Information System*. John Willey dan Sons, Inc., New York.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. 2017. *Profil Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Situbondo*. Situbondo: Disdagin.
- David, F. R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ferdiansyah, D. dan E. B. Santoso. 2013. Pola spasial kegiatan industri unggulan di Provinsi Jawa Timur (studi kasus: subsektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki). *Jurnal Teknik Pomits*. 2(1): 31-36.
- Falatehan, A. F. dan A. Wibowo. 2008. Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif perusahaan komoditi jagung di Kabupaten Grobogan (studi kasus: Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*. 2(1): 1-15.
- Falatehan, A. F. dan D. Novrilasari. 2009. Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 1(1): 62-73.
- Fujita, M., P. Krugman, dan A. J. Venables. 1999. *The Spatial Economy: Cities, Region and International Trade*. Cambridge and London: The MIT Press.
- Gistut. 1994. *Sistem Informasi Geografis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, E., A. Sutandi, dan B. Tjahjono. 2014. Kajian wilayah pengembangan industri kecil berbasis komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Majalah Ilmiah Globe*. 16(2): 101-108.
- Hartini, T. 2016. Peran Peraturan Tata Ruang Dalam Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Cirebon. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ekonomika Aglomerasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mubarrok, W. 2016. Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2014). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11/M-IND/PER/3/2014. *Program Restrukturisasi Mesin dan atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah*. 10 Maret 2014. Jakarta

- Prahasta, E. 2001. *Sistem Informasi Geografi*. Nova. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar*. Bandung: Informatika Bandung.
- Purnoto, S. 2016. *Biaya Transportasi dan Penyusunan Tarif Transportasi Darat*. Banten.
- Rustiadi, E., DR. Panuju, dan S. Saefulhakim. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta (ID): Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Rustiadi, E. dan DR. Panuju. 2012. *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bogor (ID): Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah. Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Institut Pertanian Bogor.
- Saputra, A. K. 2015. Analisis Spesialisasi Dan Konsentrasi Spasial Industri Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Suyedi, R. 2007. Analisis Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kota Bengkulu. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Savitri, D. 2008. Analisis Identifikasi Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Pulau Sumatera. *Skripsi*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Syahrudin, R. 2008. Analisis Strategi Pengembangan Agroindustri Minuman Jeruk Nipis Peras Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Saaty, T. L. 1993. *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks* (Terjemahan). Jakarta (ID): PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 1994. *The Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process*. Pittsburgh: RWS Publications.
- Sukarme, D. 2011. Pengaruh Metode Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Terhadap Hasil Pekerjaan Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Tesis*. Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Triyono, J. dan K. Wahyudi. 2008. Aplikasi sistem informasi geografi tingkat pencemaran industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknologi*. 1(1): 1-8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984. *Perindustrian*. 29 Juni 1984. Jakarta.
- Umar, H. 2003. *Strategic Manajemen in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, M. 1999. Model rasio pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu alat analisis alternatif dalam perencanaan wilayah dan kota. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 47(2): 105-233.

Lampiran 4.1 Nilai Produksi Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	1,848.00	1,954.50	1,954.50	1,954.50	1,954.50
Besuki	762.50	762.50	762.50	859.05	894.05
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	47.25	47.25	47.25
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	596.00	596.00	596.00	596.00	596.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	154.35	154.35	154.35	154.35	154.35
Panji	0.00	0.00	508.75	508.75	508.75
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.2 Nilai Produksi Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	6,905.35	7,020.35	7,142.85	7,297.35	7,383.35
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	395.00	395.00	395.00	395.00	435.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	592.50	592.50	715.00	790.00	790.00
Bungatan	5,168.75	5,168.75	5,168.75	5,168.75	5,168.75
Jangkar	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	70.00	70.00	70.00	127.50	127.50
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	412.50	527.50	527.50	549.50	549.50
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	97.50	97.50	97.50	97.50	143.50
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.3 Nilai Produksi Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
Banyuputih	147.00	147.00	267.00	267.00	267.00
Besuki	262.00	302.00	302.00	302.00	302.00
Bungatan	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50
Jangkar	70.00	70.00	70.00	70.00	130.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	475.00	730.00	730.00	730.00	730.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	249.50	289.50	289.50	346.50	346.50
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	2,990.00	3,070.00	3,542.65	3,787.65	4,124.65
Panji	777.00	777.00	777.00	777.00	777.00
Situbondo	1,339.50	1,449.50	1,449.50	1,504.50	1,504.50
Suboh	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.4 Nilai Produksi Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	2,018.50	2,018.50	2,156.50	2,500.00	2,952.00
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan (Org)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	161.00	188.00	188.00	188.00	188.00
Besuki	12.00	12.00	12.00	36.00	45.00
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
Panji	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan (Org)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	57.00	57.00	57.00	57.00	61.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	12.00	12.00	21.00	26.00	26.00
Bungatan	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
Jangkar	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	7.00	7.00	7.00	15.00	15.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	65.00	73.00	73.00	77.00	77.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	11.00	11.00	11.00	11.00	18.00
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (Org)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Banyuputih	7.00	7.00	15.00	15.00	15.00
Besuki	18.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Bungatan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Jangkar	7.00	7.00	7.00	7.00	12.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	20.00	28.00	28.00	28.00	28.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	15.00	23.00	23.00	27.00	27.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	121.00	124.00	147.00	156.00	173.00
Panji	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Situbondo	49.00	53.00	53.00	53.00	57.00
Suboh	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.8 Jumlah Tenaga Kerja Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (Org)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	52.00	52.00	60.00	60.00	65.00
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.9 Nilai Investasi Industri Pemindangan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	1,309.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	1,382.50
Besuki	535.84	535.84	535.84	601.84	626.84
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	421.50	421.50	421.50	421.50	421.50
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Panji	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.10 Nilai Investasi Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	530.00	530.00	530.00	530.00	545.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	530.00	530.00	580.00	610.00	610.00
Bungatan	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00
Jangkar	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	35.50	35.50	35.50	55.50	55.50
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	513.50	563.50	563.50	576.00	576.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	43.00	43.00	43.00	43.00	63.00
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.11 Nilai Investasi Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Banyuputih	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00
Besuki	130.00	155.00	155.00	155.00	155.00
Bungatan	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Jangkar	20.00	20.00	20.00	20.00	45.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	88.00	143.00	143.00	143.00	143.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	100.00	135.00	135.00	155.00	155.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	920.50	935.50	1,052.50	1,187.75	1,350.30
Panji	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00
Situbondo	345.00	370.00	370.00	395.00	395.00
Suboh	92.18	92.18	92.18	92.18	92.18
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.12 Nilai Investasi Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Per Kecamatan Tahun 2013-2017

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya (Rp Juta)				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Arjasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asembagus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuglugur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banyuputih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Besuki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bungatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jangkar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jatibanteng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapongan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kendit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mangaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mlandingan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Panarukan	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Panji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situbondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suboh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumbermalang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Lampiran 4.13 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Besuki	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Panji	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.14 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Bungatan	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.15 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Besuki	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Bungatan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	lolos	lolos	lolos	prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Panji	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Situbondo	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Suboh	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.16 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Nilai Produksi

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	-	-	-	-
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	-	-	-	-
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	-	-	-	-
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	-	-	-	-
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	lolos	lolos	prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.17 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Besuki	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Panji	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.18 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Bungatan	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.19 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Besuki	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Bungatan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	lolos	lolos	prioritas
Panji	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Situbondo	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Suboh	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.20 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Jumlah Tenaga Kerja

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	-	-	-	-
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	-	-	-	-
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	-	-	-	-
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	-	-	-	-
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.21 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pemindangan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pemindangan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Besuki	lolos	lolos	lolos	prioritas
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	lolos	lolos	tidak lolos	cukup prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Panji	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.22 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Penggaraman atau Pengeringan Ikan			Keterangan
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	
Arjasa	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Bungatan	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.23 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan Berdasarkan Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan			
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	Keterangan
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Banyuputih	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Besuki	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Bungatan	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jangkar	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	tidak lolos	lolos	lolos	cukup prioritas
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	lolos	lolos	prioritas
Panji	tidak lolos	tidak lolos	tidak lolos	tidak prioritas
Situbondo	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Suboh	tidak lolos	lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Sumbermalang	-	-	-	-

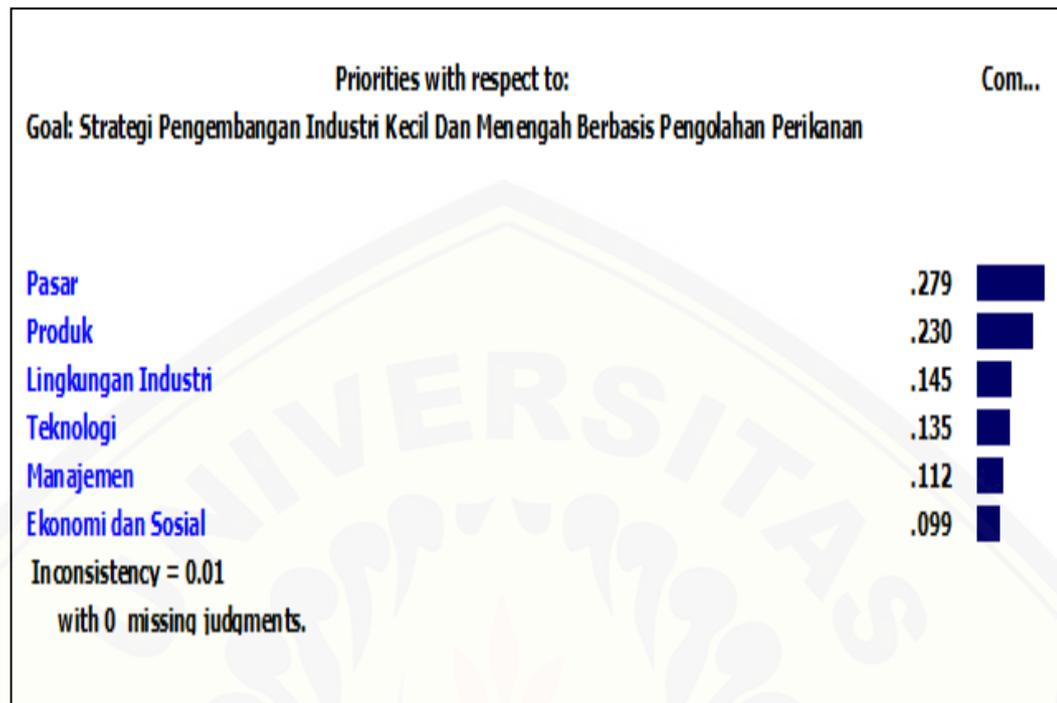
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.24 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri Pembekuan Biota Air lainnya Berdasarkan Indikator Nilai Investasi

Kecamatan	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya			
	LQ > 1	SSA (D (+) dan P (+))	MRP (RP <sub>R</sub> (+) dan RP <sub>S</sub> (+))	Keterangan
Arjasa	-	-	-	-
Asembagus	-	-	-	-
Banyuglugur	-	-	-	-
Banyuputih	-	-	-	-
Besuki	-	-	-	-
Bungatan	-	-	-	-
Jangkar	-	-	-	-
Jatibanteng	-	-	-	-
Kapongan	-	-	-	-
Kendit	-	-	-	-
Mangaran	-	-	-	-
Mlandingan	-	-	-	-
Panarukan	lolos	tidak lolos	tidak lolos	kurang prioritas
Panji	-	-	-	-
Situbondo	-	-	-	-
Suboh	-	-	-	-
Sumbermalang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (data diolah), 2017

Lampiran 4.25 Hasil Output Analisis Faktor Pertimbangan Utama



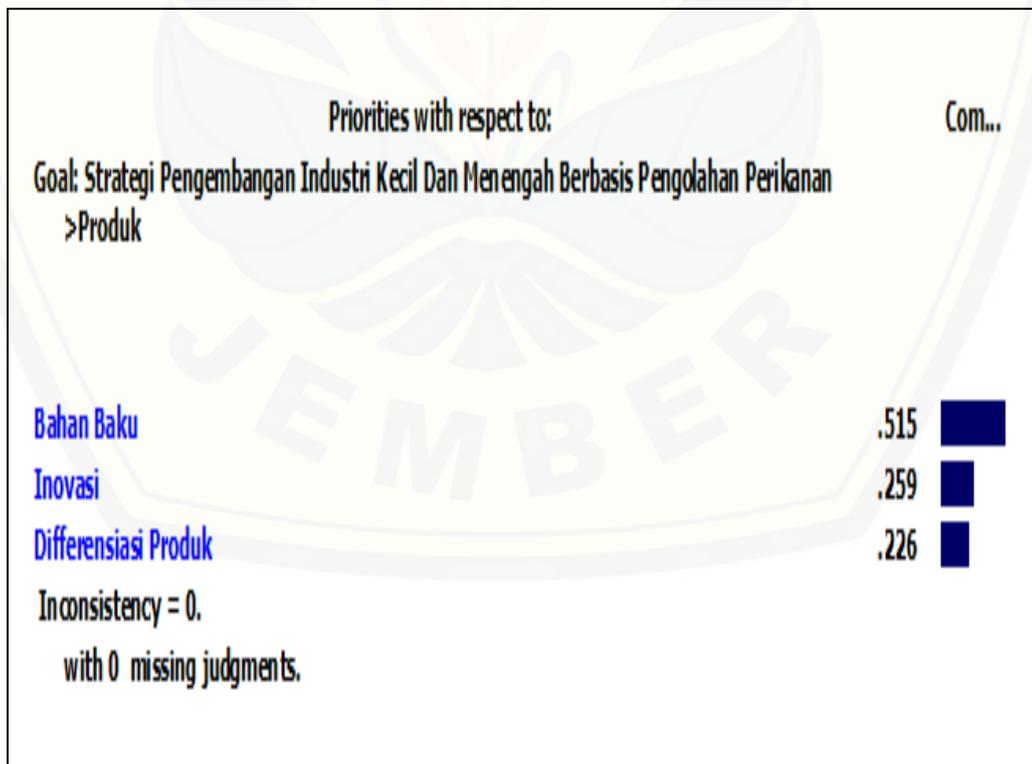
Lampiran 4.26 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Pasar



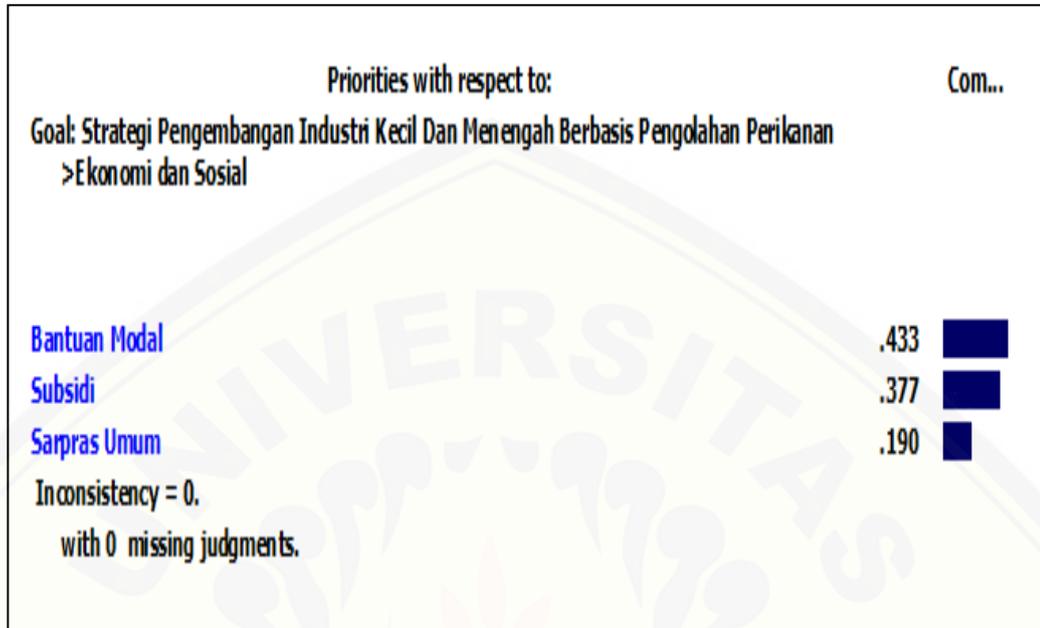
Lampiran 4.27 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Manajemen



Lampiran 4.28 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Produk



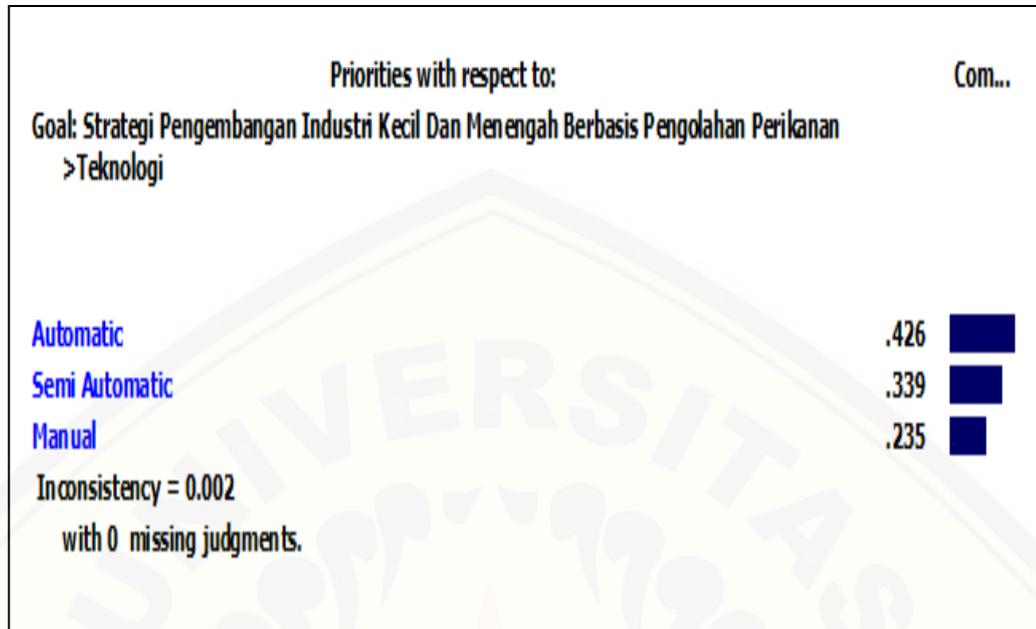
Lampiran 4.29 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Ekonomi dan Sosial



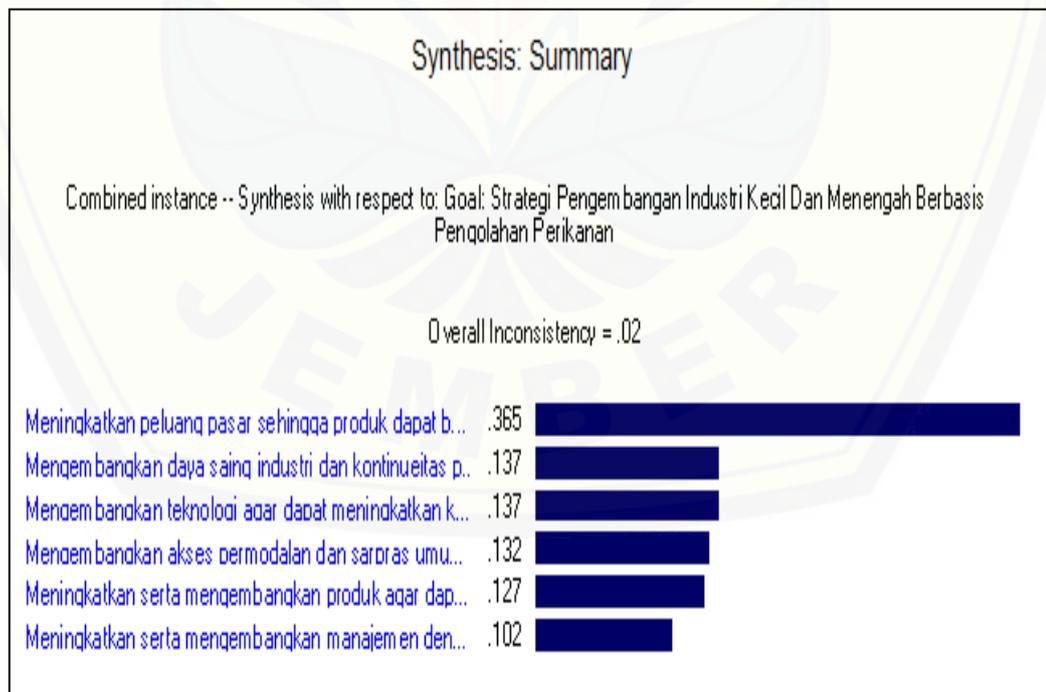
Lampiran 4.30 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Lingkungan Industri



Lampiran 4.31 Hasil Output Analisis Sub Faktor Pertimbangan Utama Teknologi



Lampiran 4.32 Hasil Output Analisis Alternatif Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Pengolahan Perikanan di Kabupaten Situbondo



## AUTOBIOGRAFI



Imam Mustofa Al Mamfaluti

Lahir di Situbondo, 13 Desember 1988, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah dari pasangan Alm. Masduki, S.Pd dan Ratna Rahayuningsih. Imam adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sederhana, Alm. Ayah seorang guru pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, sedangkan ibu seorang guru bantu di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Situbondo. Imam memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo tahun 2013. Sejak tahun 2013 bekerja sebagai honorer di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Setelah bekerja selama dua tahun mendapat kesempatan melanjutkan studi S2 di Universitas Jember. Ketertarikan dalam mengembangkan diri pada dunia pendidikan yang lebih tinggi membuatnya termotivasi untuk melanjutkan studi S2. Program studi yang diminati yaitu agribisnis, berdasarkan pada ilmu pengetahuan saat masih dibangku kuliah S1 membuatnya memilih program studi yang sama agar semakin mendalami ilmu pengetahuan tentang agribisnis.